PERADABAN
ISLAM

PERADABAN ISLAM:
Penelusuran Jejak Sejarah

Khoiro Ummatin

PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan karunia dan kasih-sayangNya, sehingga penulis bisa menyelesaiakan proses penyempurnaan buku "Peradaban Islam: Penelusuran Jejak Sejarah" harapannya dapat memberi makna bagi khasanah Peradaban Islam dan pengembangannya. Pembaca bisa melakukan pelacakan terhadap data-data peradaban Islam pada jaman keemasan Islam dan mendayagunakan di era kekinian.

Penulis menyadari, sajian buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan barangkali juga masih menyisakan permasalahan berkaitan dengan data kemajuan peradaban Islam yang belum masuk dalam pembahasan. Meski masih banyak kekurangan, tapi paling tidak, buku ini akan memudahkan pembaca yang ingin melihat hasil peradaban Islam pada setiap periode, karena memang buku ini tidak memprioritaskan kajian perjalanan kekhalifahan Islam dari perspektif politik, terutama sekali dalam hal perebutan kekuasaan. Masih banyak sisi-sisi yang bisa dikaji lebih mendalam lagi, sehingga dengan kajian lanjutan itu bisa mendapatkan informasi peradaban lebih detail dan lebih progresif yang bisa disumbangkan untuk dokumen sejarah Islam.

Buku ini merupakan satu dari sekian banyak buku yang mengungkapkan kembali tentang sejarah Islam, dimulai dari masa pra Islam, awal Islam dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan pasca kenabian. Hanya saja, penulis tidak memfokuskan pada pembahasan tentang sejarah perang dan perebutan kekuasaan dalam Islam secara lengkap. Kalau pun ada pembahasan menyinggung soal perang dan perebutan kekuasaan, itu

semata-mata penulis tempatkan sebagai informasi skunder yang sifatnya melengkapi kajian tentang perkembangan Peradaban Islam itu sendiri.

Penulis menyadari, kajian peradaban Islam yang kurang memprioritaskan persoalan sisi politik, akan menemui banyak kesulitan dalam pembahasan. Pada kenyataannya, memang banyak data sejarah Peradaban Islam yang sarat dengan politik dan perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, bicara soal sejarah umat Islam, mau tidak mau harus bersinggungan dengan politik, peperangan dan perebutan kekuasaan. Untuk mengantisipasi berbagai kesulitan dalam pembahasan yang sudah penulis perkirakan tersebut, akhirnya mendorong untuk berfikir serius menemukan hasil peradaban Islam sebagai jendela pembuka pertama. Langkah kedua adalah mengklasifikasi dengan penuh hati-hati di setiap zaman pada pemegang kekuasaan yang lengkap dengan pasang surutnya untuk ditemukan hasil peradaban yang telah dicapainya. Data sejarah ini tentu akan menjadi bukti sisi-sisi kemajuan dan kemuliaan peradaban Islam yang memanusiakan manusia di setiap jamannya.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan pada Bapak KH. Warson Munawwir (alm), yang membimbing penulis selama nyantri di Pondok Pesantren Al Munawwir Komp Q Krapyak Yogyakarta. Juga pada ayahanda KH. Ahmad Damanhuri Ya'qub (alm) dan ibunda Hj. S. Rohmah (almh), yang selama hidupnya tidak henti-hentinya memotivasi dan mendoakan penulis di setiap aktifitas termasuk dalam penyelesaian buku ini. Penulis sampaikan rasa terima kasih pula kepada suami penulis, Imam Ghozali, MA yang merelakan waktunya untuk mendampingi penulis.

Karya ini penulis persembahkan juga kepada putra-putri penulis, Muhammad Wildan Hilmi, Silvi Nadiyatul Hasanah dan si bungsu Asya Aisyal Mardliyah yang telah banyak kehilangan waktu dan perhatian, "semoga kalian menjadi anak yang sholih atau sholihah", sehingga buku ini bisa dijadikan sumber inspirasi dan sumber belajar. Akhirnya penulis

juga berharap dibalik keberanian dan kelemahan dalam pembahasan buku ini, menjadi peluang untuk dibahas lebih lanjut, sehingga kajian lanjutan Peradaban Islam bisa terus hadir dengan lebih menarik dan lebih sempurna. Amin.

Piyungan, 28 Maret 2021

Khoiro Ummatin

DAFTAR ISI

BAB I
BERKACA PADA SEJARAH

Buku yang ada di tangan pembaca ini, merupakan salah satu dari buku-buku sejarah yang turut menyumbangkan khasanah pemikiran Islam dan peradaban lslam. Dengan terbitnya buku ini, menjadi bukti Peradaban Islam memberikan ruang manfaat, maka sudah sewajarnya kalua kemudian kita memiliki tugas mendudukan Islam dan peradabannya pada posisi yang adil dan manusiawi serta tidak keluar dari teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Keberadaan peradaban Islam harus diakui sempat terkoyak-koyak, bangkit, dan tenggelam pada era pasca kenabian dan sahabat. Dengan berkaca pada sejarah Islam, sebuah peradaban bermartabat yang memenuhi unsur lahir dan batin, rasional dan spiritual masih bisa direkontruksi, sehingga manusia bisa berkaca tentang masa lalunya, dan sekaligus bisa menteladani untuk menjadi umat terbaik.

Kesempurnaan peradaban Islam dapat ditelusuri melalui bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, karena kedua sumber ajaran Islam ini menjadi tonggak pertama bangkitnya peradaban Islam. Dasar pijakan pemikiran perihal sempurnanya Peradaban Islam ini dapat ditelusuri dari ayat Al-Qur'an yang diterima nabi Muhammad menjelang berakhirnya masa kerasulan tepatnya saat melaksanakan haji Wada' (haji perpisahan). Ayat Al-Qur'an pamungkas itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3, "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu*" (Depag, 1971: 157).

Penelusuran peradaban Islam dapat dilakukan dengan melalui pelacakan peninggalan-peninggalan dari umat Islam dari generasi ke generasi, termasuk generasi pasca kenabian. Sungguh sangat banyak produk-produk peradaban yang lahir peda era itu. Walau pun produk peradaban itu ada yang masih kita kenali secara fisik, namun ada peradaban yang sudah ada waktu itu kini tinggal kenangan. Umat Islam tinggal membayangkan tanpa harus mengerti bukti fisiknya. Peradaban itu hilang karena disebabkan situasi alam, dan ada yang hancur karena akibat peperangan yang bertubi-tubi melanda dunia Islam. Disamping itu ada sebab lain, peradaban Islam hilang karena waktu itu kesadaran berliterasi masih rendah. Kondisi ini jelas tidak berlaku dalam konteks sekarang yang proses dokumnetasi sudah sangat bagus ditunjang dengan kesadaran berliterasi umat Islam yang sudah tinggi. Namun kepribadian dan obyektifitas penulis sejarah memiliki andil besar terhadap nasib sejarah peradaban Islam. Oleh karena itu, Dudung Abdurahman mensyaratkan adanya jalan tengah bagi penulis sejarah, senantiasa mengutamakan realitas, bersikap jujur atas kecenderungan pribadinya, dan jelas pendekatan yang dipergunakannya (Abdurahman, 2011: 9).

Penulis mengakui, sudah banyak kajian-kajian yang menyoal peradaban Islam. Akan tetapi tidak banyak tulisan sejarah peradaban Islam yang secara eksplisit membicarakan tentang hasil peradaban Islam dikaitkan dengan kondisi masyarakat tanpa menitik-beratkan persoalan peperangan dalam bingkai kekuasaan. Sementara analisis kesejarahan dengan spirit ke-Islam-annya sendiri, kurang mendapat perhatian dan luput dari kajian sejarah peradaban Islam. Selama ini kajian tentang sejarah peradaban Islam identik dengan peperangan dan kekuasaan, sehingga wajah Islam dominan dengan perang dan perebutan kekuasaan. Islam yang humanis dan bermartabat yang sering dicontoh oleh Rasulullah dan para sahabat, menjadi kurang nampak. Kesadaran inilah yang perlu ditumbuhkan di lingkungan umat muslim, agar kita lebih

menjadi orang yang menghargai dan mencintai peradaban Islam dari pada membanggakan peradaban orang lain yang belum tentu kebaikan dan kemanfaatannya.

Belum ditempatkannya peradaban Islam pada puncak kesempurnaan peradaban kemanusian, dalam pandangan sejarah tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari kapasitas intelektual, perbedaan pandangan, kesalahan interpretasi, kesalahan pengambilan data, sampai pada adanya unsur kesengajaan. Semua itu bisa menjadi penyebab, karena posisi peradaban Islam itu sangat tergantung pada latar belakang dan kepentingan dari penulisan sejarah itu sendiri. Dengan banyaknya faktor penyebab tersebut, tidak ada salahnya kalau kemudian ada upaya mengkaji ulang data-data sejarah, meski sumber yang dikajinya itu berasal dari paparan data-data sejarah yang sudah ada sebelumnya.

Berbicara tentang peradaban Islam, paling tidak ada dua hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sunnah Rasul. Tanpa pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, mustahil hasil analisis obyektif kesejarahan yang terkait dengan Peradaban Islam dapat ditegakkan. Labelisasi Islam "identik" dengan peperangan dan kekerasan dalam analisis kesejarahan umat Islam, merupakan sebuah bukti nyata diabaikannya nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam menelusuri sejarah. Kalau pengabaian terhadap dua sumber nilai Islam itu terjadi, maka dapat diprediksi kesimpulan paparan dalam buku sejarah akan berujung mendiskreditkan umat Islam.

Perang dalam sejarah peradaban umat manusia, sudah pernah terjadi jauh sebelum Islam diturunkan, baik perang dalam skala kecil maupun perang dalam skala besar. Dalam sejarah Arab atau sejarah bangsa-bangsa lain, perang bukan peristiwa aneh. Meski demikian, longgarnya tindakan kekerasan dalam dunia peperangan, Islam melalui nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, memiliki komitmen menjaga

etika dan tidak menghalalkan segala tindakan kekerasan meski dalam suasana perang. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah rasul yang bisa dieksplorasi dalam konteks peperangan ini, antara lain surat al-Baqarah 190-193 (Depag, 1971: 46-47):

> "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang memerangi kamu semuanya, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (190).
>
> "Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu dari (Mekah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan,dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir "(191).
>
> "Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (192)
>
> "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim" (193).

Selain beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang etika berperang, juga terdapat penjelasan dari Nabiyullah Muhammad bagaimana akhlak dalam peperangan harus dijaga di ditegakkan umat Islam (Az-Zabidi, 2002: 609; Al-Mundziri, 2003: 634):

> "Dari Abdullah bin Umar r.a, seorang perempuan diketemukan terbunuh pada suatu pertempuran yang diikuti Nabi SAW, kemudian beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan"

Tentu masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tata cara peperangan yang tidak mungkin dipaparkan keseluruhan dalam tulisan ini. Paparan ayat tentang peperangan ini, paling tidak untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa dalam Islam perang tidak bisa terjadi tanpa sebab dan perang tidak berarti melegalkan tindakan kekerasan apalagi dalam konteks melampiaskan hawa nafsu atau dendam, karena Islam memiliki etika dan norma dalam peperangan.

Kalau kita mau mempelajari data-data sejarah secara jujur dan arif, hampir seluruh sejarah peperangan dalam Islam, disebabkan adanya unsur aniaya, kedzaliman orang-orang kafir atas orang Islam yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus. Atas dasar sebab-sebab tersebut, Islam memerintahkan dan membolehkan dikobarkan peperangan, tetap dengan menjaga etika peperangan, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang-orang lemah dan tidak boleh melakukan perusakan terhadap lingkungan dengan cara membakar. Ini semua adalah prinsip-prinsip peradaban Islam yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam membangun sebuah peadaban yang Islami. Pembahasan dan telaah historis peradaban Islam ini, akan dikembangkan lebih jauh pada pembahasan peradaban era nabi Muhammad.

Sebelum pembahasan sejarah peradaban Islam dilanjutkan, agar tidak terjadi bias pemahaman dan interpretasi terhadap esensi peradaban Islam, maka ada baiknya dilakukan penjelasan tentang sejarah peradaban Islam. Posisioning dan penjelasan dasar ini penting dilakukan, karena penjelasan ini akan membantu kita dalam memahami dan mengeksplorasi data-data kesejarahan dalam peradaban Islam. Sudut pandang yang berbeda dalam melihat peradaban Islam, sudah dipastikan akan membawa konsekwensi lahirnya ruang yang bisa menyudutkan umat Islam, paling tidak akan melahirkan justisfikasi negative. Konstruksi ini perlu dibangun dan terus menerus dipropagandakan, agar analisis yang mendeskreditkan Islam bisa berkuang di era mendatang.

Dalam rangkaian kata sejarah peradaban Islam (meski masih debatibel), masing-masing dapat dijelaskan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna sejarah dan makna peradaban Islam. Sejarah dapat dimaknai sebagai bentuk peristiwa masa lalu yang memiliki nilai penting dalam perjalanan umat manusia. Dengan sejarah, umat manusia dapat belajar perihal kehidupan masa lalu, sehingga sejarah dapat memberi kontribusi yang berguna bagi kehidupan umat manusia ke depan. Dalam konteks ini, sejarah tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, dan tidak berlebihan kalau kemudian sejarah ditempatkan sebagai sumber inspirasi, sumber kemajuan dan sekaligus sebagai sumber pembelajaran umat manusia. Paling tidak dengan belajar pada sejarah, umat manusia dalam perjalanannya tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Diluar itu, dengan mengenal sejarahnya kita bisa menentukan arah masa depan yang lebih baik lagi (Maryam: 2009:4).

Pasang surut peradaban Islam sudah dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk bagi sejarawan muslim sendiri. Bahkan dalam menentukan substansi peradaban Islam juga masih menyisakan perdebatan, sebab orang Islam pernah belajar peradaban dengan orang barat atau sebaliknya orang barat pernah belajar peradaban kepada orang Islam. Pada masa puncak kejayaan peradaban umat Islam, orang barat belajar kepada orang Islam dan akhirnya sekarang orang Islam harus belajar kepada orang barat. Kondisi ini tidak saja murni menyangkut sebuah peradaban muslim, tapi memiliki hubungan yang timbal-balik dari berbagai aspek baik secara ideologis, sosiologis, historis maupun aspek politis. Nama Andalusia memegang posisi penting dalam konteks ini, dimana khalifah Ummayyah yang selamat dari kejaran pasukan Abbassiyah, terus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Wilayah kekuasaan Muslim Andalusia pada masa kejayaannya, menjadi jembatan kemajuan di dunia barat. Fakta ini sekaligus menegaskan ada

interaksi antara dunia Islam dan barat dalam pembangunan, sehingga hasil interkasi ini Andalusia mendapat julukan “Taman Firdaus kemakmjuran”, walapun kondisi kejayaan ini tidak bisa dipertahankan oleh generasi penerusnya, karena adanya konflik politik internal pengusa muslim (Shiddiqi, 1986: 68-69).

Bukti interaksi peradaban Islam dan barat dapat dibaca dengan kuat betapa kuatnya interaksi Islam dan barat dipaparkan Refileli dalam “Peradaban Islam Di Andalusia (Perspektif Sosial Budaya)”, bahwa perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari tujuh setengah abad. Perkembangan itu dibagi menjadi enam periode yaitu: Periode Pertama (711- 755 M), Periode Kedua (755-912 M), Periode Ketiga (912-1013 M), Periode Keempat (1013-1086 M), Periode Kelima (1086-1248 M), dan Periode Keenam (1248- 1492 M). Kemajuan peradaban itu dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, begitu juga dengan bahasa dan sastra, dan kemegahan pembangunan fisik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam, diantaranya kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasapenguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatankekuatan umat Islam, seperti Abd alRahman al-Dakhil, Abd al-Rahman alWasith dan Abd al-Rahman al-Nashir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi (Refileli, 2017: 165).

Kilas balik proses pembelajaran peradaban manusia di atas, secara historis telah banyak membawa perubahan dan kemajuan baik pada peradaban Islam maupun peradaban barat, meski pada akhirnya peradaban Islam mengalami pasang surut. Terlepas dari ukuran apakah peradaban Islam saat ini mengalami kemunduran atau kemajuan bila dikomparasikan dengan peradaban masa lalu, yang jelas nilai peradaban

Islam yang pernah dicatat oleh sejarah, tetap menjadi penting dan sudah menjadi keharusan untuk dikaji lebih lanjut, agar umat Islam tidak menjadi generasi yang kehilangan akar historis peradabannya.

Untuk memulai pembahasan tentang sejarah peradaban Islam, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa penjelasan perihal pengertian sejarah, pentingnya penulisan sejarah, kesalahan penulisan sejarah, pembahasan tentang pembatasan lahirnya peradaban Islam dan termasuk argumentasi penulis tentang sejarah dan peradaban Islam. Adapun pembahasan keseluruhannya akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Selayang Pandang Tentang Sejarah

Dalam pembahasan menyangkut soal sejarah, para sarjana muslim memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Dengan mengutip dari pendapat intelektual muslim seperti Ibnu Kholdun, Al-Maqrizi, W. Beaur, RG. Callingwood, Huizinga dan E. Bernheim, (Shiddiqie, 1983:4-5) yang memaknai sejarah sebagai berikut:

1. Ibnu Kholdun, sejarah adalah menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu.
2. Al-Maqrizi, Sejarah memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia pada masa lalu.
3. W. Beaur, sejarah merupakan satu ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan dan dengan penglihatan yang simpatik menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia dengan masyarakat.
4. RG. Callingwood, sejarah merupakan sejarah pemikiran yaitu operasi intelektual, maksudnya bahwa sejarah hanya konsern dengan operasi intelektual.
5. J. Huizinga, sejarah adalah bentuk intelektual yang didalamnya peradaban berhak berbicara untuk dirinya sendiri dan untuk masa lalunya.

6. E. Bernheim, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki dan menceritakan fakta-fakta dalam waktu temporer dan di dalam hubungan perkembangan umat manusia dalam aktivitas mereka (baik individu maupun kolektif) sebagai makhluk sosial dalam hubungan sebab akibat.

Dari keseluruhan definisi sejarah yang ditawarkan oleh ahli sejarah baik sejarawan muslim maupun non muslim tersebut, dapat ditarik satu pemahaman bahwa **sejarah** adalah peristiwa penting pada masa lalu yang bermanfaat tidak hanya sekedar memberi informasi tentang terjadinya peristiwa, akan tetapi juga memberi interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat pada hukum sebab akibat.

Sejarah tidak saja berbicara perihal kebaikan atau puncak kejayaan yang pernah dicapai manusia di masa lalu, tapi juga bicara soal kejelekan, kebobrokan dan kerakusan umat manusia yang menyebabkan terjadinya kehancuran suatu bangsa. Ketika peradaban itu dibangun, tentu saja sangat memungkinkan akan timbulnya akibat negatif, karena tidak selamanya hal-hal yang melingkupi pencapaian dari peradaban Islam yang dibangun oleh penguasa tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Dengan pemaknaan yang demikian, maka keberadaan sejarah dapat dijadikan acuan dan pelajaran berharga untuk melakukan keputusan penting di masa depan, dengan sejarah kekurangan yang ada pada masa lalu dapat diantisipasi, dan kesalahan yang pernah diperbuat umat manusia tidak akan terulang lagi di masa depan. Untuk menjadikan dan menempatkan sejarah pada posisi penting tersebut tentu diperlukan kearifan dan keberanian mau menerima kenyataan perihal kehidupan baik kejelekan maupun kebaikan dari sebuah generasi bangsa.

Dalam kehidupan manusia, sejarah tidak cukup hanya dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi (sejarah lisan) yang berpeluang besar terjadinya penyimpangan, perubahan dan bahkan bisa hilang dari masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya untuk

menjaga netralitas dan tidak terjadinya distorsi, maka sejarah harus didokumentasikan dalam bentuk teks, agar pada masa yang akan datang umat manusia dapat melihat perjalanan para pendahulunya dengan membuka lembar sejarah yang sudah terdokumentasi dengan baik. Alasan penting ini membawa konsekuensi, bahwa kehidupan manusia yang didokumentasikan akan menjadi pelajaran berharga, karena sejarah merupakan cermin masa lalu untuk pedoman pada masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan penulisan sejarah akan dapat mencapai, sudah barang tentu diperlukan beberapa prasarat yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah. Paling tidak, ada tiga syarat penulisan sejarah yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sejarah harus ditulis secara akurat dan benar.
2. Dalam menginterpretasi peristiwa sejarah harus tepat.
3. Dalam penulisan sejarah tidak mempunyai maksud dan tujuan lain, kecuali untuk mencari kebenaran semata.

Dengan ketiga prinsip penulisan sejarah ini, maka istilah memutarbalikkan sejarah dan mendistorsi sejarah diharapkan tidak akan terjadi, yang ada hanyalah sebuah sajian fakta dan kebenaran. Begitu pula sebaliknya, kalau dalam penulisan sejarah tersebut tidak mengedepankan prinsip akurasi dan kebenaran data serta interpretasi yang tepat, maka sejarah tidak ada bedanya dengan kisah rekaan yang bisa dibuat setiap saat sesuai dengan tujuan dan kepentingan penulis sejarah. Model sejarah yang demikian, tentu hanya akan menodai dan tidak menghargai martabat para pelaku sejarah, serta akan menjerumuskan para pembaca sejarah itu sendiri.

Selain alasan pokok perlunya sejarah ditulis sebagaimana dikemukakan di atas, penulisan sejarah juga memiliki nilai manfaat bagi sebuah generasi bangsa, karena dengan sejarah mereka dapat belajar tentang kehidupan umat manusia masa lalu. Adapun manfaat penulisan sejarah dapat dirumuskan sebagai berikut (Shiddiqie, 1983: 15):

1. Dengan mengetahui warisan masa lalu yang terbukti mempunyai nilai kebaikan harus dipelihara, dijaga dan diteruskan.
2. Dapat membangkitkan kesadaran sejarah dan meningkatkan eksistensi kita mengaitkan peristiwa masa lalu, peristiwa yang terjadi pada masa kini dan memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
3. Untuk menghindari terjadinya kembali pengalaman pahit yang telah terjadi pada masa lalu.
4. Menjadi terlatih dalam menganalisis peristiwa, mengaitkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, serta mampu menginterpretasikan peristiwa masa lalu.

Mengingat begitu pentingnya nilai sejarah bagi kehidupan generasi bangsa ke masa depan, maka penulisan sejarah tidak bisa dikerjakan dengan sesuka hati, tanpa argumentasi dan data yang benar. Sejarah juga tidak bisa ditulis dengan maksud dan tujuan tertentu, yang akhirnya justru mengaburkan esensi nilai sejarah.

Memang harus diakui, penulisan sejarah memiliki variasi maksud dan tujuan. Oleh karenanya, dalam penulisan sejarah bisa saja terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh penulis sejarah atau disebabkan karena faktor lain yang memaksa penulis sejarah melakukan kesalahan secara kolektif, seperti tekanan para penguasa atau mengikuti kemauan kelompok kepentingan yang andil dalam sejarah. Kesalahan penulisan sejarah (Shiddiqie, 1983: 21-23), bisa terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terlalu fanatik terhadap apa yang ditulis. Misalnya si penulis ikut terlibat membela secara gigih kebenaran golongannya sendiri tanpa melihat kesalahan yang dibuat oleh golongannya, sehingga membuat penulis sejarah tidak kritis dan tidak obyektif.
2. Terlalu percaya berlebihan terhadap sumber informasi, tanpa mempertimbangkan informasi yang datang dari sumber lain.

Golongan seperti ini biasanya hanya mempercayai informasi yang berasal dari kelompoknya, sementara akan menolak informasi yang datang dari kelompok lain karena menganggap bahwa yang datang dari kelompok lain pastilah salah tanpa menelisik terlebih dahulu tentang kebenaran informasi tersebut.

3. Keyakinan yang salah terhadap satu peristiwa yang benar, karena si penulis sudah terlanjur meyakini sesuatu yang salah sehingga boleh jadi sesuatu yang benar justru dianggapnya salah, begitu juga sebaliknya.
4. Gagal dalam memahami suatu peristiwa karena kurang tepat dalam analisisnya.
5. Tidak mampu menempatkan masalah pada proporsi yang sebenarnya.
6. Dalam menuliskan peristiwa sejarah mempunyai maksud untuk mendekatkan diri dengan penguasa.
7. Tidak menguasai hukum kemasyarakatan, sehingga tidak mampu mengamati dan menilai proses perubahan yang terjadi pada masyarakat.
8. Gandrung untuk melebih-lebihkan sesuatu, sehingga peristiwa yang kecil dilukiskan sebagai sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Maksud dan tujuan mengapa berbuat seperti itu, hanya penulis itulah yang tahu. Dengan demikian penulisan sejarah seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.
9. Adanya tekanan, ancaman atau intimidasi dari penguasa maupun dari masyarakat lingkungan hidupnya yang mengancam keselamatan hidupnya apabila menuliskan peristiwa yang sebenarnya.

Memperhatikan peluang terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penulisan sejarah, maka faktor kehati-hatian, kejujuran dan keberanian menjadi penting. Sebab sejarah bisa diperlakukan oleh siapa saja dengan segala kepentingannya, bahkan sejarah bisa diputar-balikkan guna

mencari keuntungan dan popularitas.

Dari sejumlah argumentasi yang melingkupi tentang penulisan sejarah, nilai penting yang dapat dikemukakan, adalah disamping penulisan sejarah itu penting, untuk menjaga kebenaran dan penyelewengan makna sejarah, maka kegairahan menulis sejarah harus pula diimbangi dengan kegairahan kegiatan apresiasi sejarah dan kritik sejarah, agar usaha-usaha memutar-balikkan sejarah tidak terulang lagi.

Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam penulisan sejarah (Abdurahman, 2007: 23- 30) yang terdiri dari:

1. Pendekatan Sosiologis.
   Pendekatan sosiologis ini biasa disebut sebagai sejarah social, karena pembahasan penulisan sejarah mencakup tentang golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik sosial berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peran dan status sosial masyarakat. Cakupan sejarah tersebut merupakan pokok kajian sosiologi, sehingga sangat logis penempatan sosiologi digunakan sebagai pendekatan penulisan sejarah.
2. Pendekatan Politik.
   Sejarah sangat identik dengan politik, karena banyak sejarah yang berkaitan langsung dengan kejadian politik, perang, diplomasi dan tindakan atau perilaku tokoh-tokoh politik seperti pemimpin atau khalifah dan kebijakan-kebijakan pemimpin. Apabila politik diterjemahkan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka kajian terhadap sejarah politik juga berarti mempelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem politik, pola perilaku individu dan kelompok, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi partai politik, kelompok interest, komunikasi, pendapat umum, birokrasi dan administrasi. Dengan demikian, pendekatan politik menjadi relevan digunakan sebagai pendekatan penulisan sejarah.

3. Pendekatan Filosofis.
   Pendekatan ini digunakan dalam penulisan sejarah dikarenakan dalam penulisan sejarah diperlukan penalaran untuk menganalisis peristiwa, mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain serta mampu menginterpretasikan peristiwa tersebut dengan pertimbangan kebenaran dan kepalsuan. Penalaran logis dalam sejarah menjadi penting, sehingga penulisan sejarah tidak kehilangan akar filosofis dan sejarah tetap bisa dicarikan relevansinya dengan era sekarang dan akan datang. Rekonstruksi pemikiran logis dalam sejarah seperti ini hanya bisa dilakukan dengan pendekatan filosofis.
4. Pendekatan Antropologis.
   Penggunaan pendekatan antropologis dalam penulisan sejarah dengan asumsi dasar bahwa penulisan sejarah tak lepas dari asal usul manusia, macam dan ragam kebudayaannya. Padahal asal usul manusia dengan ruang lingkup kebudayaannya menjadi kajian dari antropologis. Dengan pendekatan antropologis diharapkan penulisan sejarah tidak keluar dari konteks kemanusiaan dan kebudayaannya. Namun, pada kenyataannya, terkadang kajian antropologis sukar dibedakan dengan kajian sosiologi karena kedua kajian tersebut sama-sama membicarakan tentang masyarakat, terutama berkait dengan bentuk sosial dan strukturnya, baik yang berwujud perilaku individu maupun kelompok.

Selain penting memperhatikan penulisan sejarah dilihat dari beberapa aspek pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, penulisan sejarah juga perlu mengenal adanya beberapa tipe (Shiddiqie, 1983: 18-20). Adapun tipe penulisan sejarah yang sudah lazim dikenal antara lain:

1. Sejarah Orisinal (*Original History*)
   Tipe penulisan ini berisi tentang penggambaran (deskripsi) pada karya-karya, peristiwa-peristiwa yang penulisnya menyaksikan, mengalami

dan menghayati sendiri terhadap apa yang ditulis. Penulisan sejarah pada tipe ini memiliki orisinalitas yang cukup tinggi. Argumentasi dan interpretasi yang dibangun akan lebih rasional dan kontekstual, karena penulis sendiri yang menyaksikan, mengalami, menghayati atau penulis sendiri sekaligus sebagai pelaku sejarah.

2. Sejarah Pantulan (*Reflective History*)

   Dalam tipe sejarah pantulan, deskripsi tentang peristiwa sejarah tersebut tidak dibatasi oleh waktu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, tapi ruh atau jiwa peristiwa sejarah tersebut dipantulkan pada masa kini. Ada tiga macam tipe penulisan sejarah model pantulan ini, yaitu terdiri dari:

   a. *Universal history*, yaitu penulis bermaksud menggambarkan pandangan yang benar dari seluruh kehidupan suatu bangsa atau negara. Dalam penulisan ini informasi dan data yang banyak merupakan syarat mutlak, karena penulisan sejarah ini mendasarkan pada informasi dan data-data yang dikumpulkan oleh penulis.
   b. *Pragmatical history*, pada penulisan sejarah tipe ini untuk mendeskripsikan tentang peristiwa sejarah masa lalu yang kemudian dipantulkan pada masa kini untuk diteladani.
   c. *Critical history*, pada penulisan tipe ini tidak mementingkan peristiwa sejarah tersebut, tapi lebih mengedepankan apakah kriteria peristiwa sejarah tersebut mengandung kebenaran atau justru mengandung kepalsuan. Keutamaan dari tipe penulisan ini adalah ketajaman penulis sejarah dalam menyaring dan meneliti bukti-bukti yang ditulis dari sumber-sumber yang berhubungan dengan peristiwa sejarah.

3. Filsafat Sejarah (*Filosofical History*)

   Tipe penulisan ini berupa pengkajian dan penelaahan terhadap peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan kebenaran atau

kepalsuan peristiwa dengan mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain serta dapat menginterpretasikannya. Langkah ini penting dalam penulisan sejarah, agar nilai-nilai penting yang ditulis dalam sejarah merupakan fakta dan peristiwa yang benar adanya, bukan hasil rekayasa memutar balikkan fakta yang hanya untuk memenuhi ambisi dan kepentingan seseorang.

B. Esensi Peradaban Islam

Untuk memulai pembahasan tentang Peradaban Islam, terlebih dulu perlu dipahami secara benar pengertian dari dua istilah yang sering dipakai dalam berbagai literatur sejarah Islam, yaitu istilah peradaban dan kebudayaan. Penjelasan dua istilah tersebut penting, karena dalam penulisan sejarah baik sejarah peradaban Islam maupun sejarah kebudayaan Islam, keduanya tidak dibedakan secara tegas. Dalam usaha mendudukkan peradaban pada proporsinya, maka pada pembahasan ini akan dipaparkan sejumlah pengertian tentang peradaban dan kebudayaan dari beberapa pemikir di bawah ini:

1. Menurut AJ. Wensinck:

   Kebudayaan (Culture): akal budi menusia yang bersifat batiniyah yang merupakan perpaduan dari cipta, karsa dan rasa manusia. Sedang peradaban (Civilization): merupakan hasil pengolahan akal budi manusia dalam bentuk lahiriyah dan merupakan aktifitas lahir.

   Menurut Wensinck, walaupun antara kebudayaan dan peradaban sangat erat kaitannya, namun tetap bisa dibedakan pengertiannya, karena kemajuan dalam bidang materi tidak selamanya diikuti dengan perkembangan akal (Shiddiqie, 1983:8-9; 1986:2).

   Penjelasan ini memperkuat argumentasi adanya perbedaan antara kebudayaan dan peradaban dalam penulisan sejarah Islam.

Dengan pembedaan yang jelas antara keduanya, akan sangat menunjang terhadap kajian dan pengembangannya.

2. Menurut MS.Siddiqi:
   Kebudayaan adalah perkembangan intelektual. Adapun peradaban merupakan tingkat kemajuan dalam perkembangan sosial (Shiddiqie, 1986:2). Penjelasan kedua istilah tersebut telah menempatkan perbedaan pada masing-masing wilayah. Kebudayaan ditekankan pada aspek pemikiran dan bersifat abstrak, sedang peradaban lebih ditempatkan pada aspek sosial, empirik dan kongkrit yang bersifat kebendaan.
3. Menurut Effat Al-Sharqawi:
   Kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih menekankan pada manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan tehnologis (Yatim, 1999:1).
4. Menurut Koentjaraningrat:
   Antara kebudayaan dan peradaban hampir tidak bisa dibedakan karena keduanya hampir sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu:
   a. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai dan norma-norma peraturan dan sebagainya.
   b. Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dalam masyarakat.
   c. Wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya (Koentjaraningrat, 1985: 5).

Bila dicermati, pemaparan tentang kebudayaan yang diungkapkan oleh Koentjaraningkat, pada wujud benda itulah yang disebut sebagai peradaban. Sejalan yang disampaikan oleh Koentjaraningrat, Williams

dalam buku *Culture* seperti yang dikutip Kuntowijoyo juga tak hendak membedakan antara kebudayaan dan peradaban secara tegas, namun yang terpenting adalah batasan masalah pokok kajian terhadap gejala kebudayaan atau peradaban. Jika memakai pendekatan idealis, maka masalah pokoknya adalah pada *the informing spirit* pada kebudayaan atau peradaban. Namun, jika dengan pendekatan materialis, yang ditemukan adalah *whole social order* yang mana produk estetik dan intelektual adalah ekspresi dari kegiatan sosial. Jika memberi batasan kebudayaan dalam dimensi simbolik dan ekspresif kehidupan sosial manusia, maka tidak perlu membedakan antara kebudayaan dan peradaban (Kuntowijoyo, 1994: 113)

5. Wahbah Az-Zuhaili memberi penjelasan bahwa peradaban mempunyai dua arti:
    a. Peradaban merupakan lawan tradisional, saling menyerang dan saling sergap, dan ini merupakan tingkatan yang tertinggi dibandingkan beberapa tingkatan dalam perkembangan manusia.
    b. Peradaban merupakan paduan dari berbagai ciri khas sosial, agama, akhlak, kekuatan, keilmuan dan keragaman dalam suatu bangsa seperti peradaban bangsa India, Yunani dan Arab. Atau dengan kata lain, peradaban merupakan kumpulan keunggulan ilmu pengetahuan metafisika dan budaya yang berasal dari suatu bangsa yang berakulturasi pada bangsa lain dalam wadah yang tidak jelas, sehingga memunculkan peradaban kuno dan modern, peradaban barat dan timur. Bagi setiap peradaban muncul suatu ide, langkah-langkah yang praktis dan tujuan yang ingin dicapai (Az-Zuhaili, 1996: 20-21).

Paparan beberapa rumusan tentang kebudayaan dan peradaban di atas, tentu masih banyak rumusan sejenis yang bisa ditelaah pembaca dari para pemerhati yang tidak ditulis pada pembahasan ini. Ada pemahaman

yang bisa didapat dari lima rumusan pemerhati sejarah kebudayaan dan peradaban relevansinya dengan pemaknaan sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Namun pada kenyataannya, antara kebudayaan dan peradaban tidak dapat dipisahkan satu sama lain, meski bisa dibedakan antara keduanya. Hal tersebut ibarat dua sisi pada sekeping mata uang yang bisa dibedakan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, namun dua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan.

Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, wujud kebudayaan menyangkut materiil dan immateriil yang mengikuti perkembangan manusia, karena setiap manusia memiliki babak baru kebudayaan sendiri-sendiri baik kebudayaan yang masih kuno maupun moderen. Dengan ditempatkannya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai referensi utama dalam kebudayaan Islam, maka seluruh kemajuan sebagai hasil cipta dan karya manusia haruslah ditempatkan pada esensi nilai kemaslahatan, kebajikan, keselamatan dan kemuliaan manusia.

Sebuah peradaban yang menjangkau material dan spiritual secara seimbang atau peradaban yang ditegakkan di atas dasar aqidah yang kuat untuk membangun tata kehidupan manusia yang bermartabat dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, merupakan sendi-sendi peradaban Islam. Dengan pemaknaan yang demikian, maka bangunan peradaban Islam dapat ditelusuri lebih jauh dalam sejarah perjalanan umat Islam dari generasi ke generasi. Penelusuran data-data sejarah baik berupa peninggalan, teks maupun penuturan masyarakat menyangkut peradaban Islam, dapat diperlakukan secara bijak, karena akan memberi tahu kepada kita tentang kamajuan dan kemunduran sebuah peradaban yang pernah dicapai pada masa lalu.

C. Relasi Islam Dengan Tradisi Masyarakat

Pembahasan peradaban Islam yang sudah dipaparkan di atas, tak lepas dari keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang mengakar,

tumbuh dan kembang pada masyarakat. Penyebutan dengan istilah tradisi masyarakat (budaya lokal) dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menunjuk kepada tradisi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan tradisi ini murni merupakan kebutuhan masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Meski dalam perkembangan Islam selanjutnya, tradisi lokal ini kemudian ada yang bisa bertemu dengan Islam dan ada yang tidak bisa bertemu Islam, dan itu sama-sama berkembang di masyarakat.

Proses pemahaman ini penting, disamping berfungsi sebagai arahan untuk menunjuk kepada produk peradaban masyarakat. Konseptualisasi budaya local atau tradisi ini juga memiliki makna, bahwa setiap tradisi yang ada, tidak semua mendapat legitimasi langsung dari sumber Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad Saw. Kemudian tradisi ini menjadi bagian dari ruang lingkup peradaban Islam, tentu sudah melalui proses adap initasi, perubahan dan pembaharuan, sehingga pada era kekinian budaya lokal menjadi bagian dari kebudayaan Islam. Paparan alur logik ini debatibel sifatnya, sehingga siapapun masih bisa membangun argumentasi untuk memosisikan budaya lokal atau tradisi dalam perspektif kesejarahan Islam.

Sebagai proses dakwah dan penyebaran Islam, kita semua tahu bahwa pada awal pewahyuan Al-Qur'an kepada nabi Muhammad, masyarakat Arab sudah memiliki tradisi dan tradisi mereka dalam posisi dinamis, dengan kekuatan yang bertumpu pada semangat kesukuan. Semangat keyakinan merekan adalah pada penyembahan kepada ruh nenek moyang, benda-benda dikeramatkan, dan berhala-berhala menjadi sesembahan. Begitu kentalnya tradisi masyarakat dengan penyembahan berhala, sampai di sekitaran Ka'bah ada banyak berhala atau patung-petung yang menjadi sesembahan masyarakat. Merujuk dengan secara sempurna, telah dicontohkan oleh Nabi ketika berdialektika dengan tradisi kultural lokal Arab. Mulai dari ritus keagamaan, interaksi sosial,

hingga hukum perdatata dan pidana diarifi dengan searif mungkin. Kalau tradisi tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka Nabi akan menolaknya. Tetapi bila tidak, Nabi akan menerima dan bahkan terus mentradisikannya (Syaikhudin, 2012:, hal. 201).

Amin Abdullah mendeskripsikan kondsi tata nilai masyarakat Arab pada saat itu adalah polytheisme, nepotisme dan tribal aristocracy serta seperangkat nilai pendukung yang sudah tidak lagi cocok untuk dipertahankan. Nilai-nilai tersebut sudah terlalu kropos sehingga membawa pengaruh yang tidak sehat bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi keprihatinan Muhammad untuk melakukan perubahan nilai-nilai lama yang sudah mengalami kejenuhan. Perubahan yang terjadi ternyata memerlukan rekayasa budaya dan strategi kebudayaan yang berlandaskan konsep yang matang sesuai arus perubahan jaman (Abdullah, 2011: 219-220).

Perubahan budaya dan tradisi memang terjadi adanya. Tradisi lama ada yang masih dipertahankan, ada yang diperbaharui, dan ada yang dihilangkan sama sekali. Artinya Islam tidak lagi mengakomodir dan menerima sebagai bagian dari peradaban Islam, dan kondisi tradisi lama itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi mabuk-mabukan, judi dan melakukan penyembahan kepada berhala, benar-benar tidak mendapat tempat di dalam peradaban Islam. Tradisi "jahiliyah" ini ditinggalkan Islam karena memang sudah tidak sejalan dengan perubahan jaman dengan bimbingan Wahyu. Pada poin ini, langkah restorasi Islam terhadap tradisi jahiliyah sama sekali tidak mendapat penolakan dan penentangan dari kaum tradisionalis dan modernis. Namun tidak menutup kemungkinan aspek tradisi yang lain bisa menjadi bahan sengketa teologis diantara umat Islam.

Pengolahan tradisi masyarakat menjadi tradisi Islam, menurut Ali Sodiqin dilakukan melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi. Oleh

karena itu, setiap tradisi masyarakat harus dipandang sebagai sebuah produk yang bernilai luhur dan mengandung kearifan lokal. Tradisi yang sudah berlaku harus dievaluasi bertentangan apa tidak dengan prinsip tauhid (Sodiqin, 2009: 22).

Standar baku yang digunakan dalam melihat produk budaya atau tradisi lokal masyarakat adalah berada pada legitimasi teologis, sosiologis, dan keadilan. Kalau memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka keberadaannya akan tetap berlangsung dan tradisi yang ada akan menjadi bagian dari peradaban Islam. Sementara untuk tradisi yang tidak lagi bisa direkayasa dan tidak bisa diadaptasi dengan Islam, secara otomatis oleh Islam akan dihancurkan atau diharamkan keberadaannya.

Mendasarkan pemikiran ini, maka tidak semua budaya atau tradisi masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam datang pada masyarakat, sudah tentu ketemu dengan masyarakat yang lengkap tradisi dan keyakinannya. Interaksi Islam dengan tradisi dan keyajinan masyarakat tersebut melahirkan ttadisi baru yang menarik untuk lihat dengan penuh makna. Apalagi kalau budaya atau tradisi yang ada tersebut ditarik pada level masyarakat Jawa, maka kita akan ketemu dengan varian tradisi dan hampir semua sudah mengalami proses akulturasi. Melihat begitu kompleks luasnya cakupan kajian Islam dan budaya atau tradisi ini, maka uraian pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan pada masing-masing bab dalam buku ini. []

BAB II

REKONSTRUKSI PERADABAN ARAB PRA ISLAM

Keberhasilan dakwah Rasulullah dan sahabat telah dibuktikan dengan adanya menyebarnya umat Islam dan berkembangya peradaban Islam. Pada masa kejayaan Islam, Rasulullah dan para sahabat berjuang meletakkan sendi-sendi peradaban Islam yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Peradaban jahiliyah yang membuat manusia teralienasi dari dunianya sendiri, telah dirubah dengan bingkai peradaban manusia bermartabat sebagai tanda kebesaran Islam. Sistem kepercayaan telah ditata dengan ketauhidan yang meng-Esa-kan Allah. Sistem sosial masyarakat jahiliyah juga tidak luput dari usaha penataan peradaban Islami.

Data sejarah peletakan dasar peradaban dan perkembangan yang pernah dicapai, dalam rentang waktu tertentu sangat penting bagi umat manusia. Manusia dengan mendasarkan pada data sejarah, bisa melihat pencapaian kemajuan yang pernah dicapai, dan juga bisa mengetahui sebab kemunduran peradaban masa lalu. Dunamika peradaban ini berguna sebagai sumber pengetahuan, karena dapat digali kembali dan dikembangkan untuk membangun sebuah peradaban baru yang lebih maju. Proses dialektik ini akan menghubungkan dari generasi ke generasi, sehingga menyadari akan pentingnya proses sosial kesejarahan itu sampai pada titik tertentu manusia tidak akan mengingkari para pendahulunya dan yang paling penting mereka tidak akan mengalami putus generasi.

Untuk dapat mengetahui nilai-nilai keberhasilan pembangunan peradaban Islam baik yang dilakukan nabi Muhammad (era kenabian) maupun para sahabat dan generasi penerusnya, kata kuncinya terletak pada 'ada dan tidak adanya' perubahan pada peradaban itu sendiri. Tatanan kehidupan bermartabat atau paripurna (sebagai proses penyempurnaan peradaban) haruslah ditempatkan untuk acuan normatif bukan sesuatu yang final, sebagaimana dinyatakan pada ayat terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 3, bahwa wahyu Allah tentang kesempurnaan agama Muhammad, nikmat dan kerelaan Islam sebagai agama terakhir. Turunnya ayat Al-Quran ini menandai berakhirnya pemberian wahyu Allah kepada nabi Muhammad dan sekaligus merupakan deklarasi pembangunan peradaban Islam dengan bimbingan wahyu secara langsung dengan menggunakan mekanisme asbabul nuzul telah paripurna.

Ada dua argumentasi yang bisa dikemukakan dalam melihat keberhasilan peradaban Islam yang dibangun secara kolektif oleh nabi bersama sahabat, baik berkaitan dengan misi spiritualitas, sosial politik maupun keduniawian.

Pertama, secara normatif agama Islam merupakan agama terakhir dalam proses kenabian. Para ulama sependapat bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah kerasulan Muhammad, sehingga Islam merupakan agama paripurna. Tidak saja dari aspek sistem kepercayaan dan universalitas normatifnya, tapi juga dari aspek kejelian dan ketelitian Islam dalam menata kehidupan yang memerhatikan prinsip keseimbangan, yaitu memerhatikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ajaran Islam tentang kebaikan di dunia dan di akhirat terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 201 "*Dan diantara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka*" (Depag, 1971: 50).

Kedua, kondisi peradaban Arab sebelum Islam dari aspek teologis dan sistem sosial kemanusiaan sudah berada di titik nadir. Toleransi

sosial lembaga keluarga terhadap kehadiran anak perempuan mengalami keterpurukan bahkan sampai tingkat rela membunuhnya. Diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan benar-benar terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Kebangkitan sikap individualisme yang mengagung-agungkan materi, kehilangan sensitivitas teologis, krisis kedermawanan menjadi kenyataan masyarakat. Setting sosial masyarakat yang demikian, merupakan bukti sejarah peradaban yang otentik bahwa Islam memberi kontribusi besar dalam pembangunan peradaban manusia.

Untuk memperkuat dua argumentasi tentang keberhasilan pengembangan peradaban Islam, maka pembahasan yang mengurai spektrum sistem sosial sebelum masa kenabian menjadi penting untuk ditelaah secara arif dan dalam, sebagai acuan melihat perkembangan peradaban pada masa kenabian. Karena tanpa melihat sejarah kemanusiaan masa sebelum Islam, tidak akan mendapat gambaran obyektif ketika akan mengambil konklusi kontribusi Islam dalam membangun peradaban umat manusia.

A. Pranata Sosial Masyarakat Arab

Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, perkembangan kehidupan manusia dapat berlangsung secara berangsur-angsur (evolusioner), dimulai dari kehidupan terbelakang menuju kehidupan sederhana, dari kesederhanaan kemudian berkembang mencapai taraf kehidupan modern dan maju. Dengan pola pikir evolusioner ini, sistem sosial yang dibangun untuk mencapai kemajuan peradaban umat manusia, tentu saja capaian kemajuan peradaban hari ini merupakan hasil rangkaian panjang proses sosial yang berkorelasi dengan capaian kemajuan generasi sebelumnya.

Prinsip evolusioner ini berlaku juga dalam perkembangan peradaban Islam. Capaian perkembangan peradaban Islam dapat dilihat dari periode awal kenabian, dimana kondisi dan sistem sosial umat

Islam masih sangat sederhana dengan jumlah umat yang masih sangat sedikit. Dari sistem sosial dan peradaban yang sederhana inilah, lambat laun berkembang mencapai kemajuan terutama setelah Nabi bersama pengikutnya hijrah ke Madinah. Di negara Madinah peradaban Islam berkembang dengan pesat baik budaya yang dikembangkan oleh umat Islam sendiri maupun adanya kerja sama dengan orang-orang non muslim yang secara hukum mendapat perlindungan dari negara.

Perkembangan Islam ini bersamaan dengan digalakkannya kegiatan dakwah yang dipelopori nabi Muhammad dan para sahabat. Peningkatan jumlah umat Islam (kuantitatif-kualitatif), diikuti dengan perkembangan Islam secara geografis yang meluas ke beberapa wilayah jazirah Arab. Perkembangan umat Islam ini sangat menguntungkan bagi gerakan dakwah, karena Islam tidak hanya tersentralisir pada dua kota yaitu Makkah dan Madinah.

Berangkat dari hukum sosial ini, bisa diasumsikan bahwa peradaban manusia pada fase tertentu kondisinya dapat berkembang secara dinamis, tapi pada fase yang lain peradaban manusia bisa mengalami kemunduran atau bahkan bisa sampai pada titik kritis 'diambang' kehancuran. Pasang surut peradaban Islam pernah dialaminya, sehingga peradaban manusia ini harus dipandang secara arif sebagai sejarah yang pada saat (fase kemajuan atau kemunduran), peradaban yang ada tetap memiliki kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam ke depan.

Dalam konteks pembahasan peradaban Islam, peradaban masyarakat Arab sebelum Islam menjadi faktor penting untuk melihat peta perkembangan peradaban Islam, apakah 'peradaban Islam' itu merupakan perkembangan dari peradaban era sebelumnya atau 'peradaban Islam' itu lahir dari umat Islam sendiri dengan bimbingan wahyu yang diimplementasikan oleh Nabi dan para sahabat serta penerusnya.

Dua pandangan tentang perkembangan peradaban Islam ini, sama-sama memberi peluang wacana baru bahwa peradaban Islam itu

merupakan keterpaduan proses sosial sebagai wujud kesinambungan peradaban yang dibangun dan dikembangkan oleh umat Islam, sehingga peradaban Islam memiliki karakteristik tersendiri tanpa harus melupakan akar historisnya. Dengan pendekatan evolusioner, kisah kemajuan peradaban bangsa Arab masa 'jahiliyah' tetap memiliki kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari budaya atau tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, baik mengenai kejayaan yang ditulis dalam kisah sejarah maupun kamajuan bangsa Arab yang ada dalam dokumen Al-Qur'an sebagai proses pembelajaran.

Membahas soal masyarakat Arab sebelum Islam, ada dua era yang biasa digunakan oleh sejarawan, yaitu tatanan kehidupan umat manusia era Arab Ba'idah (yaitu era yang sangat jauh dengan masa kenabian dan ini sudah hancur) dan sudah sulit dikenali. Peradaban Arab pada era ini tinggal sejarah yang terdokumentasi dalam Al-Qur'an. Sedang pada era kedua yaitu Arab Musta'aribah (yaitu kehidupan bangsa Arab yang memiliki garis keturunan pada diri nabi Muhammad). Memang jejak kebudayaannya masih bisa dikaji dan dikenali, dan dari sisi jaraknya tidak jauh dengan era kenabian (Amanah, 1992: 11, Maryam, 2002: 20).

Ada sebuah kisah keunggulan peradaban dan kehebatan sebuah kaum yang hidup jauh sebelum kerasulan Muhammad yaitu kaum 'Ad dan Tsamud. Kemajuan peradaban kaum 'Ad dan Tsamud yang kemudian dihancurkan Tuhan, menggambarkan sebuah peradaban yang sia-sia dan tercabut dari akar teologis 'tidak mengindahkan rambu-rambu Tuhan', kemudian mereka dibinasakan bersama kejayaan peradabannya. Proses penghancuran dua kaum ('Ad dan Tsamud) tersebut, dikisahkan secara panjang lebar dalam surat Asy-Syu'ara ayat 123-159.

Dokumen ini mengisahkan peradaban manusia yang sudah mengenal cocok tanam, mereka pandai membuat benteng, seni ukir dinding dan peternakan. Dengan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa jauh sebelum kerasulan Muhammad, bangsa Arab

sudah mencapai sebuah kemajuan peradaban.

> "Kaum 'Aad telah mendustakan para Rasul (123). Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman (139).(Depag, 1971: 582-583).

Kalau kondisi sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam ditarik pada diameter pendek pada era menjelang kerasulan Muhammad, paling tidak ada dua argumentasi dalam melihat kemajuan peradaban Arab. Adalah William Montgomery Watt dan Patricia Crone sejarawan yang melihat perkembangan peradaban Islam dari sisi yang berbeda, sehingga keduanya terlibat perdebatan secara paradigmatik dan keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang dalam melihat peradaban Arab sebelum Islam. Penekanan perbedaan pandangan dua sejarawan tentang peradaban Arab sebelum Islam tersebut, terletak pada penempatan kota Makkah sebagai kota dagang internasional dan pusat keuangan. Studi komparasi dua pandangan dilakukan dengan baik oleh Faisal Ismail dalam *Perdagangan Mekkah dan Kemunculan Islam (Mendiskusikan Tesis Montgomery Watt dan Patricia Crone* (Ismail,1999: 43). Dengan mengutip pendapat Watt dalam bukunya *Muhammad at Mecca* bahwa sebelum Islam datang, Makkah merupakan kota dagang bertaraf internasional dan menjadi jalur distribusi strategis dengan kota-kota lain seperti Yaman, Syria dan dari Abysinia ke Irak. Sebagai kota pusat perdagangan, kemudian Makkah menjadi pusat keuangan.

Argumentasi lain Makkah sebagai pusat perdagangan dan keuangan menurut Watt adalah letak Makkah di tanah haram menambah prestise kota ini untuk dikunjungi banyak orang. Sedang menurut Patricia Crone, Makkah sebelum Islam bukan kota dagang bertaraf internasional. Dalam buknya *Serjeant and Meccan Trade* sebagaimana dikutip Faisal Ismail bahwa perdagangan di Makkah bersifat lokal. Kesimpulan temuan Crone salah

satunya didasarkan pada kondisi geografis Makkah yang jauh dari pantai dan letaknya di daerah pedalaman, sehingga tidak mungkin Makkah menjadi kota perdagangan internasional (Ismail, 1999).

Dengan mendasarkan temuan dua sejarawan tersebut, maka kota Makkah sebagai kota tempat kelahiran Islam, sebelumnya sudah menorehkan kemajuan peradaban. Pengembangan perdagangan dan sistem sirkulasi keuangan merupakan capaian peradaban bangsa Arab jauh sebelum Islam, seperti peradaban yang pernah dihasilkan oleh kaum 'Ad dan Tsamud.

Berlangsungnya sistem perdagangan dan menjadikan Makkah sebagai arena sirkulasi keuangan, baik menurut pendapat Watt dengan perdagangan skala internasional maupun pendapat Crone dengan perdagangan skala lokal, semuanya merupakan bukti-bukti bangkitnya peradaban Arab sebelum Islam. Argumentasi sejarah Makkah sebagai wilayah perdagangan tingkat internasional dan lokal, dan dijadikannya Makkah sebagai daerah perputaran keuangan, keduanya merupakan temuan penting untuk alat analisis terhadap perkembangan peradaban Islam.

Tanpa harus mengabaikan temuan Watt dan Crone atas kehebatan dan kemajuan bangsa Arab sebelum Islam, penelusuran teks Al-Qur'an penting dilakukan sebelum berargumentasi atas kelebihan bangsa Arab, karena memang Allah memuji mereka dan pujian-Nya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ambiya' ayat 10.

> "Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya ?" (Depag,1971: 496).

Pujian Allah atas kemuliaan orang Arab tersebut sangat sosiologis sifatnya, dan memiliki relevansi dengan potensi, kemampuan dan karakter bawaan orang-orang Arab. Secara teologis, tidak ada keunggulan dan kehebatan orang Arab atas bangsa lain. Karena mereka sama-sama

memiliki potensi teologis. Dalam konsep Islam, dihadapan Allah semua orang adalah sama. Ketaqwaan merupakan salah satu alat yang dijadikan variabel untuk membedakan kemuliaan di antara umat manusia. Dalam surat Al-Zukhruf 44 disebutkan tentang fenomena sosiologis bangsa Arab.

> "Dan sesungguhnya Al-Qu'ran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta bertanggung jawab" (Depag, 1971: 800) .

Paparan ayat ini lagi-lagi menekankan kehebatan orang Arab bukan pada persoalan teologis. Allah mengingatkan tentang kesamaan derajat manusia di sisi-Nya, yang esensinya menekankan kepada aspek ketaqwaan, seperti dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

> "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(Depag, 1971: 847).

Dengan memperhatikan kandungan beberapa ayat Al-Qur'an di atas, sekaligus bisa menjadi tolok ukur esensi dari sebuah peradaban Islam. Dua gelombang peradaban Arab sebelum Islam yang masing-masing menekankan moralitas dan rasionalitas, pada fase berikutnya justru menjadi hambatan bagi perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Moralitas dan rasionalitas tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, keduanya harus dibangun menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pada hakekatnya manusia itu terdiri dari unsur moral dan rasional, sehingga merupakan kemustahilan membangun peradaban manusia hanya dari satu sisi dengan mengabaikan sisi yang lain.

Oleh karena itulah, peradaban Islam menempatkan keduanya (moralitas dan rasionalitas, material dan immaterial) secara seimbang

dalam tata kehidupan manusia. Penempatan secara seimbang dalam peradaban Islam dengan mempertimbangkan keduanya, dimana permasalahan moral dan rasional sama-sama mempunyai kedudukan tinggi dalam peradaban. Dari keduanya peradaban Islam tumbuh dan berkembang, dan dengan mengabaikan keduanya pula peradaban Islam mengalami kehancuran. Pasang surut peradaban Islam setelah melampaui masa sahabat besar, merupakan bukti nyata dalam peradaban manusia tidak bisa hanya bertumpu pada salah satu aspek moralitas atau rasionalitas saja, terlebih lagi mengabaikan sifat dan martabat nilai kemanusiaan. Sebelum sampai pada kajian esensi perkembangan peradaban Islam, terlebih dahulu akan digambarkan tentang perilaku kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, karena paparan peradaban bangsa Arab dinilai penting untuk kajian lebih lanjut.

Hampir semua literatur sejarah yang mengkaji tentang kemunculan Islam dan kehidupan Muhammad, selalu dikaitkan dengan kajian kondisi sosiologis dan kondisi religiusitas bangsa Arab sebelum Islam, yang sering disebut dengan jaman jahiliyah. Labelisasi jahiliyah secara berkesinambungan sungguh telah menghasilkan image di masyarakat bahwa bangsa Arab sebelum Islam indentik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Mereka sudah berberadaban dan mereka sudah mencapai kemajuan. Namun kemajuannya itu hanya bisa dilihat dari sisi manusia semata, tidak dilihat dari sisi adi kodrati di luar diri manusia.

Dalam konteks peradaban Islam dengan mengacu pada nilai kesejarahan umat terdahulu, sebutan jahiliyah pada bangsa Arab sebelum Islam, bukan berarti kondisi sosial orang-orang Arab pra Islam jelek seluruhnya atau bodoh seluruhnya, karena sebenarnya masyarakat Arab sudah memiliki peradaban yang maju terbukti bahwa bangsa Arab sudah memiliki hukum adat dan tradisi yang sudah mapan. Sedikitnya ada tiga tradisi yang sudah mapan bangsa Arab sebelum Islam (Sodiqin, 2009: 4-8), yaitu:

Pertama, tradisi keagamaan yang meliputi tradisi berziarah ke Ka'bah dengan ritual memakai pakaian ihram, mengumandangkan pemujaan terhadap Latta dan Uzza, thawaf tujuh kali dengan telanjang, menyembelih hewan qurban, sa'i, wukuf dan melempar jumrah; sakralisasi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab; juga mengistimewakan hari jum'at sebagai hari pertemuan bangsa Arab.

Kedua, sistem sosial yang meliputi sistem kekerabatan berdasar pada garis keturunan ada pada pihak laki-laki (*patriarchal agnatic*); poligami dan perbudakan; pengangkatan anak atau adopsi dimana anak adopsi ini memiliki hak yang sama dengan anak kandung; dan dalam perkawinan mengenal adanya mahar yang berfungsi sebagai alat pembelian terhadap pihak perempuan dari pihak laki-laki, namun bangsa Arab tidak mengenal iddah jika perkawinan menjadi putus.

Ketiga, sistem hukum, dalam bentuk qishash dan diyat sudah lazim dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam; dalam bidang perdagangan mengenal hukum pinjaman dan bunga; dalam bidang pertanian mengenal kontrak pertanian dan hukum property; dan dalam bidang hukum keluarga mengenal hukum waris dengan sistem kekeluargaan yang berlaku yaitu laki-laki memiliki otoritas.

Dari gambaran tradisi yang sudah mapan pada mayarakat Arab tersebut, sebutan era jahiliyah merupakan sebutan kondisi sosial yang mengalami kebangkrutan spiritual bagi bangsa Arab sebelum Islam, karena orang Arab disamping memiliki label jahiliyah yang berkonotasi pada aspek kehidupan negatif, ternyata masyarakat Arab sebelum Islam masih menyisakan kehidupan positif. Dikatakan bahwa bangsa Arab pra Islam memiliki kebangkrutan dalam bidang spiritual karena mereka membuat patung yang dijadikan sebagai berhala untuk sesembahan mereka. Patung berhala ada di mana-mana, di sudut-sudut kota, di padang rumput dan di tempat sumber air terdapat berhala untuk sesembahan mereka (Suhud, 2008: 52).

Sebelum datangnya Islam, kondisi sosial masyarakat Arab memang cenderung mempunyai sifat-sifat negatif dan positif. Nourouzzaman Shiddiqie dalam *Pengantar Sejarah Muslim* mengklasifikasi sifat-sifat negatif bangsa Arab sebelum Islam sebagai berikut (Shiddiqie, 1983: 102-210):

1. Sulit bersatu, manusia membutuhkan sumber untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dengan segala keterbatasan sumber yang ada, manusia cenderung ingin menguasai dalam kelompok kecil. Dalam mengakses sumber kehidupan tersebut orang diluar keturunan dan tidak mempunyai hubungan darah diposisikan sebagai musuh. Pertalian hubungan manusia atas dasar tali hubungan darah ('ashabiyah) menyebabkan suku bangsa Arab cenderung membentuk kelompok-kelompok kecil dalam satu keturunan dan menganggap kelompok lain sebagai musuh, sehingga mereka sulit untuk bersatu.
2. Gemar berperang, perebutan pengaruh dan kekuasaan lahan untuk hidup dari waktu ke waktu memerlukan perjuangan keras, karena masing-masing anggota kelompok terus bertambah jumlahnya, akses ekonomi tentu harus diperluas dan tentu mereka membutuhkan areal yang lebih luas. Untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, mereka menempuh jalan perang. Perang dilakukan jika terpaksa demi mempertahankan hidup akibat sistem kesukuan yang dianut dan desakan kebutuhan ekonomi.
3. Kejam, disamping senang berperang, watak orang Arab juga gemar membunuh bayi perempuan dengan alasan: (a) Perempuan dan anak-anak kecil tidak bisa bergerak cepat di gurun pasir sehingga merepotkan orang tua saja. (b) Perempuan bagaimanapun butuh makan, ini mengurangi persediaan bahan makanan. (c) Dengan adanya perempuan mau tidak mau anggota kelompok akan terus

bertambah (d) Perempuan bila ditawan musuh akan menjatuhkan martabat kelompok yang bersangkutan.

4. Pembalas dendam, karena tali pengikat antar anggota adalah darah (ashabiyah), darah mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, sehingga menjadi kehormatan dan kewajiban bagi seluruh anggota untuk membalas setetes darah yang ditumpahkan oleh anggota kelompoknya. Adalah menjadi kewajiban dan kehormatan bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas atas tertumpahnya darah salah seorang saudaranya.
5. Angkuh dan sombong yang disebabkan merasa menjadi kelompok yang "paling" diantara kelompok lain, sehingga selalu menganggap remeh dan rendah kelompok lain ini kemudian menjadi penyebab permusuhan antara orang Arab Utara dan Arab Selatan. Pembalas dendam merupakan wujud keangkuhan dan kesombongan orang Arab sebelum Islam.
6. Pemabuk dan penjudi, merupakan pelampiasan kesombongan dan ingin menunjukkan bahwa kelompok itu "punya" dan juga sebagai pelarian dari persoalan hidup yang sulit. Selain itu, mabuk dan judi sekaligus untuk menunjukkan status sosial kelompok , karena minuman keras bagi orang Arab adalah barang mewah.

Kecuali situasi sosial negatif masyarakat Arab sebelum Islam sebagai representasi sebutan masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab ternyata memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut:

1. Kedermawanan, sifat kedermawanan ini sebenarnya tumbuh karena ingin dipuji, bagi mereka suka memberi orang lain mempunyai kedudukan yang tinggi di lingkungan suku Arab. Sikap kedermawanan orang Arab sebelum Islam sangat berbeda dengan sikap dermawan masa Islam yang tidak memperbolehkan sikap pamrih atas kedermawanannya.

2. Keberanian dan kepahlawanan, dua sifat masyarakat Arab ini tumbuh karena mengingat kehidupan masyarakat Arab bersuku-suku hidup di lingkungan alam keras padang pasir yang tandus. Kehidupan sulit alam padang pasir memberi kontribusi pembentukan watak keberanian, karena untuk mempertahankan kehidupan dan menjaga eksistensi kesukuan mereka, diperlukan sifat keberanian dan kepahlawanan, mengingat diantara suku-suku yang ada selalu mengembangkan pengaruhnya kepada suku yang lain. Sifat-sifat menonjolkan kesukuan seperti ini bisa dilacak sampai masa Islam baik dalam penentuan pengganti kepemimpinan pasca kenabian maupun pasca khulafaurrasidin.
3. Kesabaran, pemupukan sikap keberanian di lingkungan masyarakat Arab sebelum Islam dibarengi pula sikap sabar. Sikap sabar ini muncul ketika mereka mengalami perjuangan yang sulit untuk melangsungkan hidupnya, sehingga mau tidak mau mereka dituntut untuk bersikap gigih dan berlaku sabar.
4. Kesetiaan dan kejujuran, sikap mulia orang Arab dalam menjaga kesetiaan dan kejujuran benar-benar ditanamkan melalui sistem kesukuan, sehingga sikap mulia tersebut menjadi watak kolektif orang Arab, dan itu sangat menonjol terutama dilakukan pada kelompoknya sendiri.
5. Ketulusan dan berkata benar, adalah merupakan salah satu sifat dari orang-orang Arab Jahiliyah (Shiddiqie, 1983: 102-116).

Dengan mengetahui akar historis sosial masyarakat Arab sebelum Islam baik yang positif maupun yang negatif, maka sebutan jahiliyah tidak selamanya berkonotasi pada kebodohan, kejahatan dan keterbelakangan masyarakat. Karena di luar itu, masyarakat Arab sebelum Islam pernah mencapai kemajuan peradaban. Sanjungan Allah dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada masyarakat Arab, haruslah dimaknai sebagai karunia dan dijadikan beban moral dan tanggung jawab yang berat untuk menegakkan

sebuah peradaban Islam, sebab fakta menunjukkan Islam lahir di Arab dan Al -Qur'an sebagai kitab suci menggunakan bahasa Arab.

Untuk menjaga kesinambungan sebuah tatanan kehidupan Islam yang mengalami perkembangan pada kemajuan, ada prinsip yang harus dipegangi dalam menegakkan peradaban Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili beban dan tanggung jawab umat Islam terletak pada mewujudkan kemaslahatan umat manusia, menegakkan fitrah manusia dan memajukannya dengan menempatkan kekuasaannya dengan baik untuk dijadikan tauladan. Tanggung jawab lain adalah agar akal fikiran dan inisiatif manusia mempunyai kemerdekaan berkreasi dan menyalurkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan suatu karya cipta yang monumental dan prestisius didasari ikhlas dalam beramal, jujur dalam berkata, teguh, serius, optimis, disiplin dermawan, cinta kasih, saling tolong-menolong, karena semua sebagai fondasi bagi setiap kebudayaan (Az-Zuhaili, 1996: 140-150).

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam, pada perkembangan selanjutnya akan banyak mewarnai kehidupan masyarakat muslim. Tanpa bermaksud mengabaikan potensi umat di luar Arab (Ajam), paling tidak paparan ini bisa jadi renungan kita bersama, mengapa wilayah Arab yang dulu menjadi sentral pengembangan peradaban, sekarang justru menjadi sasaran kebiadaban dan kekejaman bangsa-bangsa lain. Perlakuan tidak adil disertai tindak kekerasan terhadap harkat kemanusiaan dari sebuah bangsa moderen terhadap wilayah Arab dapat dilihat hingga di penghujung abad 20. Apakah kondisi ini sebagai pertanda runtuhnya peradaban Islam atau mungkin kita kehilangan makna dari peradaban Islam itu sendiri.

B. Sepenggal Catatan Peradaban Bangsa Arab Pra Islam

Pada awal pembahasan buku ini, sudah disinggung bahwa peradaban Arab sebelum Islam pernah mencapai kejayaannya. Al-

Qur'an sendiri banyak berkisah tentang umat-umat sebelum Islam atau masa kerasulan Muhammad, meski kemudian kejayaan peradaban itu langsung dibantah sendiri oleh Al-Qur'an, dimana sistem kehidupan yang pernah dicapai mereka kemudian dihancurkan oleh Allah, karena mereka tidak tunduk pada syari'at-Nya.

Kehebatan dan kebesaran sejarah raja Fir'aun yang sampai mendeklarasikan diri sebagai Tuhan meski sudah dibimbing oleh Musa, karena terus melakukan perlawanan, akhirnya Fir'aun dan pengikutnya dihancurkan oleh Tuhan. Kehebatan kaum 'Ad dan Samud yang juga terdokumen dengan baik dalam Al-Qur'an menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa masyarakat Arab pernah mencapai kemajuan, hanya saja kemajuannya itu bertolak belakang dengan ajaran Tuhan sehingga dengan terpaksa oleh Tuhan mereka dihancurkan bersamaan dengan hasil kebudayaannya QS: Asy-Syu'araa' ayat 65-67:

> "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain (Fir'aun dan pengikutnya). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mu'jizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman (Depag,1971: 578).

Sebelum Islam datang dengan tampilnya Muhammad sebagai pembawa risalah, di lingkungan masyarakat Arab pernah berdiri dua kerajaan besar sebagai simbol kejayaan peradaban mereka pada waktu itu yaitu kerajaan Saba' dan Himyar (Yatim, 1997: 12). Mereka sudah mengenal bercocok tanam dan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan raksasa yaitu bendungan Ma'arib.

Pada jaman dua kerajaan besar Saba' dan Himyar ini, sempat menorehkan sebuah peradaban. Gerbang kebudayaan yang pernah dicapai seperti ditulis Nourouzzaman Shiddiqie bahwa Saba' memiliki geografis yang menguntungkan, daerahnya subur dan strategis sebagai jalur perdagangan dari India ke Eropa. Saba' dikenal dengan ratu Bilqis,

jaya 750 SM. Pemimpin negara raja pendeta yang bergelar Mukarrib. Pada masa kejayaannya 610 SM pernah memperluas daerahnya hingga di Minaiyah. Kemudian pada 610-112 SM raja-raja Saba' bergelar Malik dan tidak memiliki kewenangan pada bidang agama. Ibukota dipindah dari Sirwah ke Ma'rib. Ada bangunan yang membuat Ma'rib termasyur yaitu bendungan air Saddul Ma'rib (Shiddiqie, 1983: 124).

Ada bangunan monumental yang bisa dijadikan rujukan untuk melihat adanya peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Kalangan ahli sejarah mencatat ada bangunan bersejarah (Ka'bah) sebuah bangunan berbentuk persegi tanpa atap yang dikelilingi 360 patung berhala yang sekaligus sebagai tempat berziarah. Bangunan ini menjadi rumah suci yang hingga saat ini masih menjadi simbol keagamaan dan tempat melaksanakan ibadah. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat penghormatan untuk menjaga rumah suci tersebut. Setiap tahunnya dikunjungi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji (Hassan, 1989: 19).

Jazirah Arab dikenal dengan daerah pegunungan, gurun pasir yang tandus dan alam yang gersang. Penduduknya memiliki dua tipologi, yaitu masyarakat yang hidup di pedalaman dengan menggantungkan hidupnya dengan alam dan hidup selalu berpindah ke daerah-daerah yang subur. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup secara nomaden Tipologi masyarakat Arab kedua adalah masyarakat perkotaan yang menggantungkan hidupnya menjadi pedagang, peternak dan menggarap lahan pertanian (Maryam, 2002: 21).

Untuk mengatasi kekurangan pasokan air sebagai konsekuensi daerah gurun pasir dan pegunungan yang gersang, mereka mulai mengelola aliran air. Aliran air itu kemudian dibuatkan bendungan raksasa (bendungan Ma'rib) sebagai bangunan irigasi untuk menyimpan air dan mengairi lahan pertanian, sehingga lahan pertanian bertambah subur.

Paparan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam sudah memiliki peradaban yang maju pada jamannya dan mampu

menjawab problema kehidupan. Bahkan sampai kebutuhan ritual pun sudah mampu diwujudkan dengan bangunan Ka'bah. Sedang untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air dibangun sebuah bendungan dalam menjawab kebutuhan air dan untuk mengairi lahan agar menjadi subur. Ketika peradaban manusia sudah mencapai kemajuan, dan manusia tidak bisa menghargai sisi-sisi kemanusiaan, disitulah titik kehancuran akan mulai menampakkan di hadapan manusia yang serba kurang dan ingin menang sendiri (serakah), yang akhirnya sangat tidak menghargai kedudukan sebagai manusia.

Ada sisi lain, sebagai gambaran sebuah peradaban masa sebelum Islam, lelaki merasa lebih hebat dari pada perempuan. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal, dapat diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat dari suami. Diantara mereka ada tradisi penguburan anak perempuan hidup-hidup. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak (kebanyakan perempuan) adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga (Yahya, 2019: 47). Perlakuan masyarakat arab sebelum Islam terhadap anak perempuan ini hanya sebagai bukti sejarah, betapa rumit dan panjangnya peradaban arab yang coba ditarik dalam era kenabian, ada era terbelakang dan ada era kemajuan.

Masyarakat Arab sampai menjelang kelahiran Islam dikenal dengan perniagaannya. Bahkan Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah juga menjalankan perniagaan. Kisah sukses perniagaan Muhammad termasuk dalam menjalankan perniagaan milik Khadijah yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya menjadi istri nabi Muhammad, adalah menjadi bukti kemajuan kebudayaan di bidang perniagaan waktu itu. Muhammad tidak saja menawarkan tata nilai baru dalam berdagang, tapi sikap dan tutur katanya (etika dagang) benar-benar diterapkan. Ketika menawarkan dagangan menarik dan mampu mendatangkan minat calon pembeli, sehingga barang yang ditawarkan laku keras dan mendapat untung besar. Kehebatan Muhammad dalam

menjalankan bisnis ini terdengar Khadijah, sehingga Muhammad dipinang menjadi suaminya (Ath-Thahir, 2006:49-50).

Paparan peradaban manusia sebelum lahirnya Islam ini, memberikan informasi yang kuat bahwa peradaban manusia sudah mulai berkembang, sebelum lslam mengembangkan peradabannya. Argumentasi ini memiliki korelasi dengan tesis evolusionerisme perkembangan sosial yang secara argumentatitf dikembangkan oleh ilmuwan sosial. Dengan demikian, temuan-temuan sejarawan berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia ini, akan sangat bermanfaat untuk pembahasan peradaban Islam pada masa-masa berikutnya.[]

BAB III
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM

Sebelum membahas tentang kapan dimulainya peradaban Islam dengan melihat unit analisis sejarahnya, ada baiknya perlu dikemukakan beberapa karakteristik peradaban Islam yang sekaligus sebagai pembeda dengan peradaban di luar Islam. Pencarian karakteristik peradaban ini penting, untuk dapat menemukan kategorisasi sebuah peradaban yang pernah dicapai umat manusia baik pada masa lalu maupun yang pernah dicapai pada era kekinian. Setelah peradaban itu dapat dipetakan dengan cermat, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan kategorisasi sebuah peradaban yang masuk ke dalam peradaban Islam.

Pada pembahasan yang lalu sudah disinggung, bahwa esensi peradaban Islam adalah sebuah peradaban kemanusiaan paripurna, terpenuhinya unsur lahir dan batin, rasional dan spiritual, dunia dan akhirat dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan pembatasan peradaban yang demikian, maka semakin jelas bahwa peradaban Islam memiliki tata nilai dan kerangka konsep operasional tentang peradaban manusia. Dengan peradaban Islam, tata kehidupan ini tidak menjadikan posisi manusia terasing dalam kehidupannya, karena terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai manusia baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin.

Kebudayaan atau peradaban Islam memiliki beberapa ciri khusus sebagai pembeda antara peradaban Islam dan peradaban diluar Islam. Ciri khusus peradaban Islam ini dapat memberikan informasi yang meliputi (Shiddiqi, 1986: 4):

1. Kebudayaan atau peradaban yang dihasilkan bernafaskan tauhid. Hasil manifestasi dari akal budi manusia atau moralitas dan rasionalitas yang menjelma menjadi sebuah kenyataan tatanan sosial, baik yang materiil maupun immaterial tidak akan keluar dari nilai-nilai tauhid. Prinsip ini penting dijadikan landasan ketika mau melihat sebuah kebudayaan atau peradaban yang sudah dihasilkan umat manusia, sehingga ada ketegasan apakah hasil usaha manusia itu masuk dalam kategori peradaban Islam atau peradaban diluar Islam.
2. Hasil buah pikir dan pengolahannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (rahmatan lil 'alamin).
   Peradaban Islam tidak sejalan dengan peradaban yang berimplikasi pada sebuah kerusakan (fasad) dan segala bentuk eksploitasi alam dan manusia. Rumusan ini bisa dilacak dari pernyataan Allah yang menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang ada di bumi bukan lain karena akibat dari tangan manusia. Dengan mendasarkan hal tersebut, maka peradaban yang lahir sesudah era ke-Islam-an belum tentu itu menjadi bagian dari sebuah peradaban Islam. Karena yang menjadi ukuran adalah kontribusi atau kemanfaatan produk peradaban bagi umat manusia.
3. Kebudayaan atau peradaban Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, mulai dari proses perumusan dan pengembangan peradaban. Setiap peradaban yang lahir harus sesuai dengan ajaran keduanya, sebab dua dasar hukum dalam Islam tersebut merupakan sumber inspirasi dan rujukan bagi peradaban Islam. Ciri ini sangat penting untuk standarisasi sebuah kebudayaan, kalau ada pengembangan peradaban bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka peradaban yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai peradaban Islam, kapan-pun peradaban itu lahir, siapa-pun pencetus dan pengembangnya.

4. Kebudayaan atau peradaban Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang harus menjangkau dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Ciri ini menempatkan manusia sebagai faktor yang sangat penting dalam pengembangan peradaban Islam, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai peradaban Islam meski dikembangkan oleh orang Islam sendiri, kalau pada kenyataannya hanya menekankan satu aspek kehidupan saja, sehingga nantinya justru sangat merugikan manusia.

Setelah dipaparkan beberapa ciri peradaban Islam dengan memperhatikan aspek dan dimensinya, maka pembahasan selanjutnya adalah perlu ditegaskan kapan peradaban Islam itu dimulai. Dalam menentukan kapan lahirnya peradaban Islam, paling tidak ada dua pendapat yang bisa dipergunakan untuk melihat waktu dimulainya peradaban Islam. Adalah satu pendapat yang mendasarkan pada unit sejarah adalah masyarakat Islam. Pendapat kedua melihat unit sejarah adalah Negara (Shiddiqie, 1983:14; Shiddiqi, 1986: 113-114). Argumentasi dua pandangan dapat dilihat pada paparan sebagai berikut:

1. Golongan yang melihat bahwa unit sejarah adalah masyarakat

Pandangan pertama ini menentukan bahwa peradaban Islam dimulai atau lahir sejak Muhammad diangkat menjadi Rasul (baca; periode Makkah). Setelah Muhammad di angkat menjadi Rasul yang ditandai dengan turunnya Al-Qur'an, maka sejak itu komunitas masyarakat Muslim mulai terbentuk. Pembentukan masyarakat muslim pada periode pertama ini dimulai dari orang-orang dekat Muhammad. Berbagai aktifitas sosial juga sudah dimulai dengan mendasarkan pada norma Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, sehingga dalam perkembangannya membentuk sebuah peradaban yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Golongan yang melihat bahwa unit sejarah adalah negara.

Golongan kedua ini berpendapat keberadaan negara menjadi satu ukuran penting dalam melihat dimulainya peradaban Islam. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa peradaban Islam mulai ada (tumbuh) setelah nabi hijrah ke Madinah (Yatsrib). Setelah nabi bersama umat Islam hijrah ke Madinah, mereka memulai tata kehidupan baru, sistem sosial baru dengan membentuk negara Madinah. Peradaban manusia yang lahir pada periode Makkah oleh golongan ini belum dilihat sebagai peradaban Islam, karena sistem sosial dan politik belum ditata secara formal dengan menggunakan konstitusi negara. Pasca hijrah, negara Madinah terbentuk dan tata nilai baru sistem sosial mulai diterapkan secara tegas dan formal dengan menggunakan konstitusi Madinah (Piagam Madinah). Pada masa ini, Muhammad sebagai tokoh penggerak lahirnya peradaban Islam yang sekaligus sebagai kepala negara dan juga sebagai Rasulullah.

Sudah menjadi fakta sejarah, bahwa pada masa kenabian Muhammad dicatat terbagi menjadi dua periode yaitu pada periode Makkah selama kurun waktu 13 tahun dan periode Madinah selama kurun waktu 10 tahun. Pada masa kenabian ini oleh sejarah disebut sebagai masa keemasan bagi peradaban Islam. Sejumlah alasan bisa dikemukakan untuk melihat masa kejayaan peradaban Islam ini, tapi yang terpenting adalah pada masa ini produk peradaban kemanusiaan lahir dengan tata nilai baru. Nabi di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap, sehingga beliau berhasil menundukkan jazirah Arab ke dalam kekuasaannya (Yamin, 2017:108).

Berikut ini dipaparkan beberapa alasan untuk menunjuk pada jaman keemasan peradaban Islam pada masa kenabian:

1. Pada saat kenabian kaum muslimin benar-benar utuh, bersatu dan bekerja tanpa pamrih hanya mengharapkan ridla Allah dengan

bimbingan Rasulullah. Tata nilai baru mulai diperkenalkan oleh nabi dan para sahabat. Sikap optimistis terhadap kebudayaan baru banyak melahirkan sukarelawan untuk membantu Rasulullah, meski tidak jarang orang yang merasa terancam eksistensinya kemudian melakukan perlawanan, sehingga yang menerima kebudayaan baru dan menolaknya sama-sama kuat.

2. Apapun keputusan Nabi diterima dengan keyakinan bahwa apa yang datang dari Nabi adalah kebenaran. Karena umat Islam dan non muslim pada waktu itu memiliki pendapat yang demikian, maka produk-produk peradaban baru tidak menjadi pemicu perpecahan tapi justru menjadi pusaran bersatunya berbagai suku bangsa.
3. Kepemimpinan Nabi baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin negara berdasarkan konstitusi tertulis yaitu berupa piagam madinah. Dalam konstitusi tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara sesama kaum muslim, tapi juga mengatur hubungan antara kaum muslim dengan non muslim. Kondisi seperti ini jelas merupakan sebuah kebudayaan baru, ada sistem pemerintahan dan ada tata aturan secara tertulis.

A. Peradaban Islam Masa Nabi Muhammad SAW

Dengan mendasarkan pada uraian pada pembahasan peradaban Islam sebelumnya, maka peradaban Islam yang dicapai pada masa Nabi dapat ditemukan diberbagai dokumen sejarah. Sistem pemerintahan dan pola kemasyarakatan yang dibangun nabi bisa dianalisis dan dikomperatifkan dengan era sebelumnya, sehingga akan menambah keyakinan bahwa peradaban Islam lahir dengan misi kebaikan dan kemajuan umat manusia.

Gelombang peradaban Islam pada masa Nabi ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu peradaban Islam Makkah dan peradaban Islam

Madinah. Kategorisasi ini untuk menunjukkan bahwa dua kota penting di Arab tersebut memiliki kontribusi besar dalam penumbuhan dan pengembangan peradaban Islam. Sebelum nabi hijrah ke Madinah, Islam diletakkan sebagai kerangka ideologis, sehingga masa ini merupakan era penanaman nilai-nilai Islam pada lubuk hati manusia, mulai dari tingkat individu, keluarga dan lingkungan atau komunitas-komunitas.

Perjuangan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di Makkah dimulai dari turunnya Al-Qur'an pertama kali pada tanggal 17 Ramadlan bertepatan dengan 6 Agustus 611 M saat bertafakur di goa Hira, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Gerakan dakwah Nabi dimulai dari strategi diam-diam atau sembunyi-sembunyi (dakwah terbatas) dan pada akhirnya dilaksanakan secara terbuka. Kepungan kebencian dan permusuhan orang-orang kafir Makkah memang menjadi hambatan dan keterbatasan bagi pengembangan Islam. Madinah memberi harapan baru dengan sistem sosial masyarakat yang terbuka dengan suka cita menerima kedatangan Nabi. Kondisi masyarakat yang semula mengalami perpecahan dan permusuhan menjadi terselamatkan dan penduduk Madinah menjalani hidup dengan rukun dan bersatu padu di atas jalan kepemimpinan Islam pertama yang memiliki kekuatan karena memang dibangun di atas pondasi persaudaraan dengan keridlaan Allah dan Rasulnya (Jazuli, 2006: 249-250; Hassballa, 2007:72; Hasjmy, 1994: 282-283).

Dalam menjalankan misi kenabian ini, meski sudah ada perjanjian damai namun kenyataannya tekanan kafir Quraisy terhadap umat Islam terus menerus dilancarkan. Pertumbuhan umat Islam dari hari ke hari, tidak meredakan permusuhan bahkan cenderung terus meningkat permusuhan yang dilancarkan kafir Quraisy. Melihat situasi demikian, Rasulullah akhirnya bersama sahabat dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah yang sebelumnya sudah melakukan penjajagan terlebih dulu kepada masyarakat Madinah. Peluang penerimaan dan antusiasme masyarakat Madinah kepada Nabi dan para sahabat cukup tinggi, bahkan

ada permintaan kepada Nabi untuk menjadi hakim atas perpecahan yang terjadi di Madinah (Esposito, 2004: 15; Khathir, 2007:18).

Sebelum Nabi Muhammad meletakkan sendi-sendi peradaban Islam di Madinah, tata nilai peradaban Islam sudah dirintis dengan sekelompok orang-orang Madinah tentang pentingnya kehidupan yang membedah tata kehidupan manusia yang semula terhadang dengan sekat kesukuan menjadi ruang lebih luas sebagai negara bangsa. Sifat tolong menolong dan suka melindungi "yang itu sudah menjadi ciri masyarakat Arab" berangkat dari lingkup kecil diperluas dengan dasar nilai kemanusiaan, persamaan dan kemasyarakatan. Peradaban baru sebagai cikal bakal pembentukan negara bangsa yang dirintis Nabi dengan mengadakan hijrah ke Habasyah, perjanjian aqabah 1 dan aqabah 2. Pertemuan yang diikuti ikrar kesetiaan dan persaudaraan dengan orang-orang Madinah ini merupakan langkah positif dan strategis untuk memuluskan jalan hijrah ke Madinah, karena masyarakat Madinah dan kaum Muhajirin sudah diikat persaudaraan dengan kerangka yang lebih luas, diberi kebebasan menjalankan agamanya, saling menolong dan membantu jika ada serangan musuh, memosisikan nabi sebagai hakim jika ada perselisihan. Dan yang lebih esensial lagi adalah kedua belah pihak sepakat mengharamkan pertumpahan darah, pembunuhan dan tindak kekerasan (Amanah, 1992: 61-62; Hasjmy, 1994: 292; Al-Khatib, 1995: 21-22; Khadiq, 2001: 84).

Pada periode Madinah ini kekuatan Islam terus bertambah dan kondisi sosial politik lebih kondusif, sehingga sangat mendukung untuk pengembangan peradaban dan menjalankan tugas dakwah Rasulullah. Pengembangan dakwah Islam di Makkah mendapat tantangan keras, sehingga perkembangan Islam tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, periodesasi pengembangan Islam ini menurut pendapat A. Hasjmy dapat dikategorikan bahwa periode Makkah merupakan tahap pembinaan Kerajaan Allah dalam hati manusia, sedang periode Madinah merupakan

pembinaan Kerajaan Allah dalam masyarakat manusia (Hasjmy, 1994: 280-281). Dengan demikian, bertemunya periode Makkah dan Madinah semakin menyempurnakan gerakan dakwah Islam dan pengembangan peradaban Islam periode Madinah.

Bahkan upaya institusional untuk membentengi umat Islam dari serangan musuh-musuhnya sudah ditempuh Nabi, yaitu dengan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah yang kemudian diberi nama perjanjian Hudaibiyah. Dalam buku Qishashul Anbiya dijelaskan, bahwa perjanjian Hudaibiyah mengatur tentang genjatan senjata selama 10 tahun, tukar menukar pelarian "yang dinilai merugikan Islam", larangan mengunjungi Ka'bah selama berlakunya perjanjian, dan adanya kebebasan kepada umat manusia untuk memilih masuk Islam atau memilih masuk menjadi golongan Quraisy (Al-Ma'arif, tt: 268-269; Hassaballa, 2007: 83).

Prinsip persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya, larangan taklid pada nenek moyang, pembuatan patung yang dijadikan sesembahan benar-benar menjadi prioritas dakwah Rasulullah sebagai jalan pembuka menyelamatkan manusia dari kebatilan. Gerakan dakwah Nabi yang mengerangkai bangunan masyarakat yang tidak didasarkan pada kesukuan. Persaudaraan kaum Anshar dan Muhajirin dan jaminan keselamatan semua penduduk Madinah merupakan langkah strategis Rasulullah dalam membangun peradaban Islam.

Setelah Negara Madinah terbentuk dan tatanan sosial masyarakat berkembang dengan baik (bersatunya Muhajirin dan Anshar), maka sebagai kepala pemerintahan nabi Muhammad kemudian membangun dokumen tertulis yang menjadi sandaran hukumnya yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam yang terdiri 47 pasal (Sukardja, 1995: 45). Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis yang pertama yang disusun oleh Nabi Muhammad yang berisi tentang penjanjian antara umat Islam dengan masyarakat Madinah. Tujuan dari Piagam

Madinah ini yang paling utama adalah untuk menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama (Setiawan, 2011: 46-47). Menurut A.J. Wensinck yang dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi bahwa dalam piagam itu setidaknya memuat 7 asas (Shiddiqi, 1986: 6).

1. Asas kebebasan menjalankan perintah agama.
2. Asas persatuan dan kebersamaan.
3. Asas permusyawaratan.
4. Asas penegakan hukum.
5. Asas keadilan.
6. Asas menghormati hak orang lain.
7. Asas perdamaian yang tidak mengorbankan kebenaran dan keadilan.

Nabi Muhammad sebagai penyelenggara Negara (pelaksana Piagam Madinah) selain memimpin kesatuan masyarakat politik, juga sebagai utusan Allah. Piagam ini diperuntukkan bagi semua masyarakat yang bergabung dalam Negara Madinah. Bahkan bangsa Yahudi merupakan satu umat bersama kaum mukmin , sebagai pelaksanaan ide persatuan di antara semua orang yang mendukung kesatuan hidup bersama atas dasar ketentuan Piagam Madinah. Namun demikian, Islam memberikan perbedaan yang tegas berkait dengan teologis antara muslim dan non muslim (Sukardja, 1995: 28-29; Mujani, 2005: 56).

Kebebasan menjalankan agama pada dataran empiris ini benar-benar dijaga, dan kafir Quraisy diberi tempat untuk mendapat perlindungan dari kaum muslimin. Tatanan sosial baru tidak saja mengatur relasi antar agama, antar suku dan politik masyarakat Arab. Piagam Madinah sampai menjangkau pada ranah persatuan yang meliputi multi etnis, bahkan tidak saja untuk umat Islam tapi juga untuk orang-orang non muslim.

Pada Piagam Madinah terdapat dua prinsip pokok yaitu, *pertama,* semua pemeluk agama Islam yang berada di Madinah merupakan satu umat, meski terdapat beragam suku, bangsa dan kebudayaan. *Kedua,*

hubungan antara umat Islam dengan umat non Islam didasarkan pada prinsip-prinsip saling tolong-menolong, toleransi, bahu-membahu, membela pada masyarakat lemah, nasehat-menasehati dalam koridor kebersamaan dan menyelenggarakan kebebasan pilihan beragama, namun tetap bersatu mempertahankan dan membela Madinah jika terancam bahaya (Ghofir, 2006: 36). Nilai toleran yang dijunjung oleh Muhammad sebagai Rasulullah sekaligus sebagai kepala pemerintahan, menunjukkan bahwa Rasul menggunakan pendekatan kompromis bahkan cenderung terintegrasi dengan menekankan pesan Islam guna menciptakan tatanan masyarakat yang kuat dibawah misi kenabian (Ummatin, 2003: 42)

Dengan begitu dalam dan lengkapnya nilai-nilai Piagam Madinah sebagai konstitusi, maka tidak berlebihan kalau kebudayaan Islam kemudian banyak mengambil inspirasi dari dokumen ini. Munculnya kesadaran baru yang mengikis egoisme, fanatisme suku dan tradisi jahiliyah merupakan konsekuensi logis dari penerapan Piagam Madinah. Nabi Muhammad dengan ajaran Islam mampu melakukan perubahan besar yaitu bersatunya suku dan kabilah menjadi satu ikatan Negara Madinah yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Kebijakan politik Muhammad Saw selain yang dituangkan menjadi naskah Piagam Madinah, maka langkah untuk membangun peradaban Islam Nabi mengambil tiga langkah strategis. *Pertama*, membangun masjid (masjid Quba') sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai tempat pertemuan umat Islam. *Kedua,* mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar dan ini sudah dirintis sebelum adanya Piagam Madinah. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang mengikutsertakan penduduk Madinah yang terdiri berbagai kelompok (Sukardja, 1995: 99; Shiddiqi, 1986: 7).

Sistem pemerintahan yang didasarkan pada Piagam Madinah adalah diterapkannya pengelolaan negara secara moderen. Masyarakat dikenalkan devisi-devisi dalam pemerintahan termasuk angkatan perang,

yang menempatkan Rasulullah sebagai panglima tertinggi, sehingga orang-orang yang akan ikut perang harus seijin Nabi. Tentu saja, paparan peradaban yang sudah dihasilkan umat Islam bersama Rasulullah ini belum semua dituangkan pada tulisan ini dan masih banyak peradaban lainnya yang masih bisa digali. Kita bisa melakukan pelacakan lebih lanjut, sehingga bisa menemukan peradaban Islam yang lebih banyak lagi yang bisa dijadikan kerangka untuk mengembangkan peradaban Islam ke depan.

Peradaban Islam paling monumental dan mendapat pengakuan banyak pihak, seperti dipaparkan Suharsono bahwa dalam kehidupan sosial politik ada prestasi mengagumkan yang patut dicatat adalah bersatunya masyarakat Madinah dan Arab pada umumnya di bawah kepemimpinan Rasulullah dan dideklarasikannya negara Madinah. Kualitas perkembangan manusia diukur dengan transformasi eksistensi manusia baik secara individual maupun kolektif (Suharsono, 2004: 144).

Pranata sosial dan politik yang terjadi di kawasan Arab benar-benar memasuki era baru di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangannya telah membawa pengaruh mendalam tentang persaudaraan baik sesama muslim maupun persaudaraan dengan non muslim yang telah tinggal di Madinah sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat. Selain membangun persaudaraan yang tidak diskriminatif, kepeloporan Nabi dalam persamaan dan kesetaraan merupakan peradaban baru dalam kehidupan masyarakat Arab, sehingga semua orang Arab sejajar kedudukannya, bahkan perbedaan ras yang sering menjadi sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan dilenyapkan (Hassan, 1989: 26).

Peradaban baru dalam kehidupan masyarakat Arab yang dibangun Nabi Muhammad ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

> “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal” (Depag, 1971: 847)

Ayat ini yang kemudian menjadi akar pijakan tentang demokratisasi dalam Islam. Esensi diantara perbedaan manusia baik dalam skala kecil seperti perbedaan suku, ras maupun skala besar dalam hal berbangsa-bangsa yang menguat pernah menguat kemudian ditenggelamkan dengan prinsip kesetaraan. Golongan atau suku ditekankan Nabi bukan menjadi ukuran kehebatan seseorang, melainkan diukur dari sisi ketaqwaan seseorang. Prinsip ajaran Islam ini jelas melampaui dari sisi-sisi budaya masyarakat Arab pada waktu itu, sehingga keberadaan Islam pada masa kenabian ini telah melahirkan banyak peradaban baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

B. Bangkitnya Peradaban Khulafaur Rasyidin

Para sahabat sudah membaca tanda-tanda atau pesan akan berakhirnya masa kenabian, melalui sikap, ucapan Nabi saat khutbah pada pelaksanaan haji wada’ (haji terakhir) dan turunnya ayat Al-Qur’an. Nabi dalam khutbahnya menekankan persoalan kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan dan solidaritas. Tidak lama dari beberapa peristiwa itu, kondisi Nabi sudah mulai sering sakit dan menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti imam sholat. Kondisi sakit Nabi semakin parah, pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M Nabi wafat. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, terlebih Nabi belum pernah mempersiapkan penggantinya. Suksesi menjadi titik krusial, meski prinsip musyawarah sudah menjadi basic yang selalu ditanamkan Nabi dalam pengambilan keputusan.

Setelah diketahui Nabi wafat dan tidak meninggalkan wasiat soal pengganti beliau sebagai pemimpin politik, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Nabi dalam menjalankan dakwah dan pemerintahan. Muhmmad sebagai Rasulullah tidak bisa digantikan sepeninggalnya, namun untuk fungsi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus dilanjutkan. Pengganti pada fungsi kekhalifahan ini harus ada dan tidak boleh terhenti. Banyak sumber menyebutkan terjadi perdebatan sengit dalam menentukan siapa pengganti kedudukan Muhammad ini, karena masing-masing pihak merasa punya hak untuk melanjutkan kepala pemerintahan negara.

Kendati nabi Muhammad tidak menunjuk penggantinya sebelum wafat, dengan mempertimbangkan banyak hal, umat Islam menyadari betul bahwa posisi Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi prioritas pertimbangan sebagai pengganti Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Umat Islam juga benar-benar menyadari cara pergantian harus melalui musyawarah, agar monopoli dan perampasan kekuasaan tidak terjadi. Pemaksaan pribadi untuk mencapai kekuasaan tidak terjadi, karena semua dikembalikan kepada umat Islam. Keberhasilan menentukan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi pengganti Muhammad, sudah tentu ada proses dan gesekan kecil dalam berpendapat merupakan hal yang wajar dalam musyawarah atau cara berdemokrasi.

Sengaja dalam tulisan ini tidak dieksplorasi lebih jauh soal perdebatan sengit apalagi sampai terjadi ancaman perpecahan dalam tubuh umat Islam berkaitan dengan pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq, karena dalam masyawarah perdebatan sengit, perbedaan pendapat sudah terbiasa terjadi dan sudah banyak dikupas dalam banyak buku sejarah, sehingga penulis tidak tertarik membahasnya dan sengaja tidak dimasukkan dalam porsi pembahasan buku ini. Justru yang akan disorot adalah adanya tradisi musyawarah dan keberhasilan dalam menentukan

seorang kepala negara dan pemimpin umat Islam pasca kenabian tanpa harus ada sebuah tindakan disintegrasi Negara Madinah.

Keberhasilan memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama melalui lembaga musyawarah, merupakan tradisi baru dan merupakan pengalaman pertama bagaimana membangun peradaban dalam politik Islam. Peristiwa keberhasilan suksesi kepemimpinan ini jelas menjadi momentum terbaik untuk penentuan kepempimpinan pasca kenabian. Pemimpin umat Islam pasca kenabian ini yang sering disebut dengan khalifah rasulillah (pengganti Rasul) atau disebut dengan khalifah saja (Yatim, 1997: 35) merupakan simbol peradaban baru dan kedepannya akan menjadi rujukan umat Islam dalam melakukan suksesi kepemimpinan.

Kedudukan khalifah rasyidah dalam pemerintahan membawa dua misi utama, yaitu sebagai pemimpin politik yang harus menjaga keutuhan wilayah teritorial, menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pekerjaan yang harus dipegang khalifah adalah membawa misi dakwah untuk melanjutkan perjuangan Muhammad sebagai pemimpin agama, sehingga di tangan khalifah ada kewajiban menjalankan tatanan agama secara benar, menyeluruh dan terpadu. Semangat kepemimpinan keagamaan dan pemerintahan politik tersebut tercermin dengan jelas bagaimana masing-masing khalifah konsisten menjaganya, dengan karakterisitik masing-masing pada setiap masa kepemimpinannya. Pada bagian ini akan diuraikan pembangunan peradaban pada masing-masing khalifah, dimulai dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan terakhir Ali bin Abi Thalib.

1. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Sepeninggal Rasulullah banyak masalah yang dihadapi para sahabat, mulai dari soal pemurtadan, keberadaan nabi palsu, keengganan membayar pajak, hingga persoalan politik menyangkut suksesi kepemimpinan pasca

kenabian. Permasalahan-permasalahan tersebut segera diantisipasi dan dengan kemampuan para sahabat permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Ada pertanyaan yang sulit dijawab pada waktu itu, yaitu siapa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan. Dengan mengedepankan musyawarah, para sahabat meski bersitegang dan terjadi perdebatan di saqifah Bani Saidah, akhirnya berhasil menentukan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti kepala pemerintahan dan langsung mendapat baiat dari para sahabat, kaum anshar dan muhajirin (Murad, 2012: 109-113).

Berkaitan dengan suksesi kepala pemerintahan, munculnya permasalahan dalam proses penentuan seseorang yang akan menjalankan pemerintahan Islam ini wajar, karena memang Rasulullah tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya kelak sepeninggal dirinya. Lembaga penyangga yang akan menangani jalannya suksesi pemerintahan Islam juga belum dibentuk. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan kepala pemerintahan yang sekaligus peletak dasar Negara Madinah hanya mengenalkan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Kerangka dasar ini kemudian yang dijadikan acuan para sahabat untuk menentukan siapa pengganti kepemimpinan nabi Muhammad.

Kita semua tahu, bahwa Islam berkembang dengan cepat di Madinah karena adanya persatuan dan kerja sama antara kaum anshar dan muhajirin. Semasa Rasulullah masih hidup, ego sentris masing-masing kelompok ini tidak muncul. Namun setelah Rasul meninggal, ego sentris mereka muncul dan menganggap kelompoknya merasa yang lebih unggul dan memiliki hak untuk menggantikan kedudukan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Bahkan tokoh-tokoh dari kaum anshar sependapat hak kekhalifahan ada di tangannya, bukan di tangan kaum muhajirin (Sou'yb, 1979: 18-19).

Pertentangan soal suksesi pasca kenabian ini sempat memanas, kondisi sedikit mereda setelah semua persoalan dikembalikan pada

kerangka dasar musyawarah yang sudah dicontohkan Rasul. Kaum muslimin lalu mengadakan pertemuan di balai Sa'idah dan berhasil melakukan musyawarah memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Rasul pemerintahannya hanya dalam rentang waktu yang sangat pendek selama 2 tahun, mulai 632-634 M. Selama menjalankan pemerintahan, Abu Bakar yang mendapat gelar Ash-Shiddiq ini berhasil menorehkan tinta emas dibidang kebudayaan. Penguatan sumber ekonomi negara melalui baitul mal diperjuangkan sebagai penopang pemerintahan. (Esposito, 1990: 9-10; Sayyid, 2003: 19).

Adapun langkah politik dan pengembangan peradaban Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq meliputi:

a. Meneruskan asas Piagam Madinah dengan menjaga persatuan umat Islam dari pemberontakan kaum sparatis, kaum riddah atau kaum murtad, dari pemberontakan nabi palsu dan juga dari pembangkang membayar zakat. Semboyan yang sangat terkenal dalam upaya mempersatukan umat Islam yaitu "Tauhid, Keadilan, Persaudaraan dan Kesatuan Muslimin". Semboyan inilah yang menjadi motivasi dan penyemangat untuk tetap berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ada beberapa pertimbangan dan argumentasi mengapa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi kaum sparatis, yaitu:

   Pertama, zakat merupakan income bagi negara sehingga dikhawatirkan dengan adanya pembangkangan pembayar zakat pemasukan ekonomi bagi negara berkurang.

   Kedua, setelah meninggalnya Rasulullah secara keseluruhan sektor perekonomian tidak stabil disebabkan banyaknya golongan yang ingin melepaskan diri dari Islam, sehingga sedikit banyak sektor ekonomi tersedot untuk membiayai penumpasan terhadap mereka.

   Ketiga, dengan adanya nabi palsu dikhawatirkan masyarakat muslim yang baru saja ditinggalkan oleh Rasulullah terpengaruh

oleh propaganda mereka. Nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab, Sajjah binti Harits atau lebih kenal Sajjah Tamimiyah (seorang perempuan yang mengaku sebagai Nabi) dan Al-Aswad al-Ansiy (Suhud, 2008: 142: Hamka, 1984:124).

b. Berhasil mengumpulkan ayat Al-Qur'an dari pelepah kurma, batu tipis- batu tipis dan dari hafalan orang-orang yang hafal Al-qur'an yang dikerjakan oleh Zaid bin Tsabit.

c. Sistem pemerintahan belum memisahkan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, kesemuanya ada di tangan khalifah, karena memang kondisi sosial masyarakat pasca kenabian ini masih labil dan perlu kemampuan dan keteladanan dari sang khalifah. Konsentrasi khalifah mengarah pada usaha perlawanan dari kaum yang murtad (Shiddiqi, 1986: 7; Yatim, 1997:36-37).

d. Kebijakan lain yang diterapkan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah kebijakan politik. Dalam pidato pertamanya setelah pembai'atan, mengandung prinsip-prinsip nasionalisme partisipatif egaliter (Fu'adi, 2011: 29).

Masa yang sangat singkat dalam pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq ini ternyata banyak menghasilkan perkembangan dari sisi peradaban Islam. Dan yang terpenting dalam masa pemerintahannya adalah keberhasilan menyelamatkan umat Islam dari perpecahan sepeninggal Rasulullah. Selain itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga sudah menorehkan keberhasilannya dalam menegakkan Negara Islam secara politik, karena semua bentuk pembangkangan manusia dapat diselesaikan dan semua masyarakat kembali tunduk kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Kebijakan internal dan eksternal ditempuh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memperkuat pemerintahan Islam. Adanya penerapan sistem gaji untuk khalifah diambilkan dari Baitul Mal, musyawarah sebagai jalan pemutus perkara, pembentukan dewan syariah sebagai embrio peradilan

Islam dan penerapan struktur dalam pemerintahan dengan diangkatnya para gubernur sebagai wakil khalifah yang menjaga keamanan dan kestabilan wilayah (Murad, 2012: 144-145).

Dalam menjalankan pemerintahan, Abu Bakar Ash-Shiddiq meletakkan fungsi baitul mal benar-benar menjadi sarana untuk menyejahterakan rakyatnya. Pengelolaan baitul mal dilaksanakan secara terbuka, bahkan sampai-sampai tidak pernah dikunci dan sengaja tidak dikunci karena letak baitul mal berada di rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan setiap lembaga penyangga kesejahteraan rakyat ini mendapatkan harta, oleh khalifah langsung dibagi-bagi kepada rakyatnya yang fakir sampai habis. Pada masa pemerintahannya pula, negara mulai membeli unta, kuda, dan senjata untuk berjuang di jalan Allah (Sayyid, 2003: 18).

Masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dari awal sudah menghadapi persoalan internal dan eksternal, namun kesemuanya dapat diselesaikan dengan bijak. Persengketaan politik antara muhajirin dan anshar dapat diatasi dan diterima dengan penuh kedamaian yang diwujudkan adanya pembaitan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin umat Islam. Sementara untuk urusan menghadapi pihak eksternal baik dalam konteks riddah maupun pembangkangan terhadap kebijakan khalifah, perang menjadi solusi seperti memerangi gerakan nabi palsu dan kaum murtad, pembangkang zakat untuk mengembalikan sikap kontra politik mereka agar tetap tunduk dan patuh pada negara. Oleh karena itulah masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak melakukan peperangan sebagai wujud tanggung jawab menegakkan eksistensi negara Islam Madinah.

Sistem ketentaraan mengalami kemajuan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sistem komando atau panglima diberi otoritas dalam memimpin pasukan termasuk kebijakan yang harus diambilnya. Kebijakan ini benar-benar diwujudkan masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah. Hal itu dibuktikan, bagaimana khalifah Abu Bakar

Ash-Shiddiq mengajukan permohonan kepada panglima perang waktu itu dipimpin Usmah ibn Zaid agar sahabat Umar bin Khattab tidak ikut dalam rombongan dan tetap menemani khalifah. Langkah itu kelihatan aneh, tapi itu menunjukkan bahwa sang khalifah sangat menghargai dan menghormati sebuah kewenangan jabatan seseorang di lingkungan kekuasaannya (Sou'yb, 1979: 38).

Pada masa akhir pemerintahannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelum meninggal dunia sudah merintis jalan menuju suksesi kepemimpinan. Sejumlah sahabat dan tokoh masyarakat diundang untuk bermusyawarah dengan maksud mempersiapkan penggantinya dan Umar bin Khattab dipilih sebagai penggantinya. Langkahnya ini diambil untuk mencegah terjadinya perselisihan atau perpecahan di kalangan umat Islam dalam menentukan pemimpin, dan musyawarah umat Islam ini berhasil mencapai kesepakatan soal pengganti khalifah yaitu sahabat Umar bin Khattab.

Proses musyawarah ditempuh khalifah bersama para sahabat-sahabat yang lain, bahkan sejarah mencatat khalifah dalam memimpin musyawarah untuk menentukan penggantinya itu dalam keadaan sakit. Namun ketulusan dan keputusannya yang rasional dan mudah dipahami oleh sahabat yang lain, akhirnya semua menerima keputusan atas penentuan pengganti khalifah adalah Umar bin Khattab.

2. Masa Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ia menjadi penentang dakwah Rasul yang hebat. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi pendamping dan pembela setia nabi Muhammad. Keberadaan Umar bin Khattab ini memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Islam, karena memang dia tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Arab dan tidak ada suku Quraisy yang berani menentangnya (Hassan, 1989: 37, Asyur, 2002: 7-8).

Bagi kafir Quraisy, keberadaan Umar bin Khattab merupakan tokoh yang disegani, pemberani dan menduduki posisi penting sebagai tim delegasi di kaumnya. Oleh karena itu, masuk Islamnya Umar bin Khattab merupakan pukulan berat bagi kafir Quraisy. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang ikut hijrah nabi, ia memiliki jiwa pemberani. Dengan melihat karakter Umar bin Khattab yang demikian, cukup logis kalau Abu Bakar Ash-Shiddiq mempersiapkan sebagai penggantinya untuk menduduki jabatan khalifah ke dua.

Setelah khalifah dijabat oleh Umar bin Khattab kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syiria, Persia dan mesir. Mengingat begitu luasnya kekuasaan Islam, maka Umar bin Khattab sebagai pemimpin melakukan penataan pemerintahan dengan mengatur sistem administrasi negara menjadi beberapa wilayah atau propinsi. Setelah propinsi terbentuk (Makkah, Madinah, Syiria, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir) Umar bin Khattab segera membentuk departemen-departemen dalam pemerintahan. Masa pemerintahannya juga sudah mengenalkan sistem gaji dan pajak tanah (Maryam, 2002: 56-57; Yatim, 1997:37).

Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun dari 13-23 H/ 634-644 M. Dalam kurun waktu itu, banyak terobosan yang dilakukan sehingga pada masa pemerintahannya banyak menghasilkan peradaban baru. Perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab antara lain:

a. Mulai ditetapkannya tahun hijriyah.
b. Umat Islam mulai membentuk mata uang sendiri.
c. Menata pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen (diwan/ administrasi).
d. Memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif.
e. Membagi wilayah kekuasan Islam ke dalam propinsi yang berotonomi penuh dengan kepala pemerintahan di wilayah

propinsi disebut Amir.

f. Menetapkan wilayah jazirah Arab hanya boleh didiami oleh kaum Muslim saja, sedangkan untuk non muslim diperbolehkan memilih wilayah Bizantium dan Persia.

g. Dalam bidang hukum didirikan pengadilan dan menetapkan: pertama, tidak melakukan hukum potong bagi pencuri yang mencuri karena alasan kelaparan. Kedua, menghapus bagian zakat bagi para Mu'allaf. Ketiga, menghapus hukum kawin mut'ah (kawin kontrak).

h. Mendirikan baitul maal untuk mengorganisasikan perpajakan.

i. Dilaksanakannya sholat taraweh pada bulan Ramadlan (Yatim, 1997: 37; Syalabi, 1987: 263; Shiddiqi, 1986: 122-123).

Langkah antisipatif Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam mempersiapkan penggantinya untuk menjalankan roda pemerintahan diikuti oleh Umar bin Khattab pada akhir masa pemerintahannya. Hanya saja, Umar bin Khattab tidak menunjuk langsung siapa orang yang bakal menggantikannya. Untuk melanjutkan pemerintahannya khalifah Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah menentukan siapa yang akan menjadi khalifah (Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf). Setelah Umar bin Khattab meninggal ditikam seorang budak Abu Lu'lu'ah, enam sahabat tersebut kemudian bermusyawarah menentukan pengganti Umar bin Khattab dan disepakati Usman bin Affan sebagai khalifah.

3. Masa Usman bin Affan

Pemerintahan Usman bin Affan berlangsung selama 12 tahun 23–35 H/ 644-655 M. Usman bin Affan merupakan sahabat nabi yang gigih berjuang dengan jiwa, raga dan hartanya. Dia menggunakan sebagian besar hartanya untuk kepentingan Islam dan membekali umat Islam. Pada masa pemeriantahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin

Khattab, Usman bin Affan menduduki posisi penting, dan pada akhir kekhalifahan Umar bin Khattab dipilihnya menjadi anggota tim enam yang bertugas memilih calon khalifah.

Khalifah Usman bin Affan dikenal memiliki tabiat yang lemah lembut, budi pekerti yang baik dan pada paruh pertama masa pemerintahannya permasalahan sosial politik masih stabil. Dalam menjalankan tugas kekhalifahan, Usman bin Affan menunjuk kerabat dekatnya sebagai pembantu-pembantunya, bahkan pada akhir masa jabatannya roda pemerintahan banyak dikendalikan oleh kerabat dekatnya. Langkah ini dinilai oleh para penulis sejarah Islam, Usman bin Affan pada posisi yang lemah dan banyak mengundang kekecewaan masyarakat dengan kebijakan nepotisme.

Ada beberapa argumentasi kebijakan Usman bin Affan mengangkat kerabat dekatnya itu, secara umum kondisi negara yang kurang stabil sebagai konsekuensi pemerintahan transisi, sehingga memerlukan soliditas dan kepatuhan pejabat pemerintahan di semua tingkatan. Ia mengambil kebijakan mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan dengan mengangkat orang-orang muda dan mengistirahatkan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Wibawa pemerintah pusat sangat rapuh terutama pada masa enam tahun kedua. Untuk mengembalikan wibawa pemerintahan itu, harapan khalifah Usman bin Affan hanya mengangkat kepada orang-orang yang menghormati dan loyal kepadanya. Hal ini didasarkan pada watak orang Arab yang hanya mengakui dan menghormati kepala sukunya saja, tindakan khalifah Usman bin Affan tersebut dituduh menghina sahabat (Shiddiqie, 1986: 124-125).

Kepemimpinan Usman bin Affan memiliki garis kebijakan yang berbeda dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahannya adalah banyak sahabat dekat

mulai meninggalkan Usman bin Affan, banyak penentangan terhadap pejabat khalifah (amir) yang akhirnya sampai terjadinya pemberontakan dan Usman bin Affan dibunuh (Maryam, 2003: 65-66, Yatim, 1997: 38).

Sejarah perjalanan kepemimpinan Usman bin Affan meski disorot sebagai bentuk kekuasaan nepotisme karena menempatkan kerabat-kerabatnya menduduki posisi penting dalam pemerintahan, tapi harus pula dicatat bahwa pada masa pemerintahannya banyak jasa dan peradaban yang dihasilkannya. Dibawah ini merupakan fakta sejarah peradaban yang dihasilkan pada masa pemerintahan Usman yang meliputi:

a. Mengizinkan dibangunnya angkatan laut.
b. Membangun rumah penjara terpisah dari masjid.
c. Memproklamasikan mushaf resmi yang ditulis oleh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam.
d. Memperindah masjid Nabi di Madinah dengan bahan batu pualam.
e. Membangun bendungan untuk menjaga arus banjir besar dan mengatur distribusi air ke kota-kota Madinah.
f. Membangun sarana dan prasarana umat, jembatan-jembatan, jalan-jalan, masjid (Shiddiqi, 1986: 125, Yatim, 1997: 39).

Selain peradaban Islam yang sudah disebutkan di atas sebagai hasil masa pemerintahannya, khalifah Usman bin Affan juga telah berhasil menorehkan peradaban baru seperti, penetapan pendapatan bulanan bagi para Muadzin, membentuk jawatan kepolisian untuk pengamanan kota (Sou'yb, 1979: 459). Dengan memperhatikan banyaknya peradaban Islam lahir pada masa pemerintahannya tersebut, maka kebijakan khalifah Usman bin Affan dalam menjalankan pemerintahan dapat dijadikan teladan, artinya kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada situasi sosial politik dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, meski pada era pemerintahannya kondisi negara kurang stabil, tetapi khalifah

Usman bin Affan mampu menghasilkan kebijakan yang membawa pada kemajuan peradaban Islam.

Setelah khalifah Usman bin Affan wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali untuk menduduki jabatan khalifah menggantikan Usman bin Affan. Para pemuka umat Islam ini membaiat Ali ada yang murni membaiat secara langsung, ada yang membaiat dengan persyaratan penegakan hukum dan mengadili pembunuh Usman bin Affan dan terakhir adalah dengan terpaksa melakukan pembaiatan. Dengan demikian, naiknya sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak mulus seperti tiga sahabat sebelumnya. Latar belakang naiknya Ali menduduki khalifah tersebut ternyata berbuntut dan berpengaruh pada masa pemerintahannya.

Situasi sosial politik pasca pembunuhan Usman bin Affan menjadi kurang kondusif. Berbagai pergolakan sering terjadi dan masyarakat mengajukan tuntutan kuat, agar Ali bin Abi Thalib menuntaskan kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan. Kasus ini berkepanjangan karena tuntutan masyarakat tidak segera diselesaikan. Khalifah Ali lebih berkonsentrasi mengatasi pada sumber permasalahan instabilitas sosial politik dalam pemerintahannya.

4. Masa Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu seorang sahabat dan sekaligus sebagai menantu Rasulullah. Dalam sejarah Islam Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah ke empat atau khalifah terakhir era pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, sejarah mencatat kondisi sosial politik negara berada pada posisi yang paling sulit, ketidak puasan masyarakat dan perpecahan sahabat terjadi, bahkan konflik politik yang ada sampai berujung pada peperangan.

Kejadian ini tidak saja menyulitkan posisi khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menentukan arah dan kebijakan khalifah selaku pemegang

kekuasaan, persoalan konflik internal dan eksternal tersebut juga berdampak pada terhambatnya perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahannya, karena konsentrasi pemerintahannya tersedot menangani persoalan konflik politik dan peperangan.

Kebijakan dengan melakukan pergantian pejabat tinggi dan mutasi pejabat yang diangkat khalifah Usman bin Affan, ternyata justru menimbulkan masalah baru dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih lagi diikuti adanya benih-benih perpecahan di kalangan sahabat sendiri baik yang disebabkan oleh faktor kepentingan politik maupun tuntutan balas atas kematian khalifah Usman bin Affan (Hassan, 1989: 62).

Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib, selalu timbul pemberontakan yang terus menerus, tidak ada masa sedikitpun dapat dikatakan stabil. Konflik sosial politik pada masa ini terjadi lebih disebabkan oleh:

a. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat tidak dibaiat secara bulat oleh kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh muslim yang pada masa hidupnya dikenal sangat dekat dengan Nabi sampai beberapa waktu lamanya tidak segera membaiat Ali, misalnya, Zubair, Tolhah bahkan Aisyah sendiri tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib.
b. Persoalan kaum muslimin yang mengancam disintegrasi bangsa pada saat itu juga dipicu oleh kebijakan khalifah sebelumnya yaitu pada masa Usman bin Affan yang memunculkan kekecewaan sebagian besar kaum Muslimin.

Untuk mengatasi kondisi perpolitikan dalam negeri yang tidak stabil tersebut, Ali bin Abi Thalib melakukan tindakan antara lain: mengganti gubernur yang diangkat oleh khalifah Usman bin Affan; menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Usman bin Affan kepada penduduk dan menyerahkan hasilnya kepada negara memakai kembali sistim distribusi pajak yang pernah diberlakukan pada masa Umar

bin Khattab, dan dihapus pada masa khalifah Usman bin Affan; dan memindah pusat pemerintahan dari Madinah ke Kuffah (Yatim, 1997: 39, Shiddiqi, 1986: 8-9).

Kebijakan khalifah ini diambil mempunyai maksud baik, karena menurutnya instabilitas dalam negeri yang muncul itu disebabkan karena kebijakan Usman bin Affan, sehingga untuk mengembalikan stabilitas politik dalam negeri maka menurutnya penyebabnya harus dihapuskan dengan mengganti para pejabat tinggi yang diangkat oleh sahabat Usman bin Affan. Namun justru dengan melakukan tindakan tersebut malah menjadi bumerang bagi kelangsungan pemerintahannya.

Ketidak puasan di lingkungan sahabat atas kebijakan Ali bin Abi Thalib dengan menunda-nunda penuntasan dan menghukum pembunuh Usman bin Affan, menjadi pemicu pecahnya perang antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan yang dimotori oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair yang kemudian dikenal dengan perang Jamal (perang onta), karena waktu peperangan pecah Aisyah di medan perang menaiki onta. Peristiwa peperangan ini bisa diselesaikan dan kemenangan berada pada pihak khalifah Ali bin Abi Thalib .

Setelah perang Jamal diselesaikan, khalifah Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan pihak oposisi yang terdiri dari golongan orang-orang yang kehilangan jabatan penting akibat kebijakannya. Barisan orang-orang kecewa ini bergabung dengan kekuatan gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sofyan untuk melakukan penentangan terhadap Khalifah. Peperangan pun juga tidak bisa dihindarkan, dua pasukan bertemu di sebuah tempat yang sekaligus menjadi nama perang itu sendiri yaitu Siffin, sehingga peperangannya pun dikenal dengan nama perang Siffin. Peperangan Siffin diakhiri dengan perundingan atau tahkim (arbitrase) antara khalifah Ali bin Abu Thalib dengan ‘ bin Abi Sofyan. Menurut catatan sejarah hasil perundingan ini merugikan khalifah Ali dan menguntungkan Mu’awiyah.

Tahkim Siffin tidak saja merugikan khalifah Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan Mu'awiyah dari sisi politik, dari sisi sosiologis pun sahabat Ali bin Abi Thalib juga rugi, karena dengan peristiwa tahkim, kekuatan pendukung khalifah menjadi berkurang. Pada periode akhir masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, kekuatan politik umat Islam terbelah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pendukung khalifah Ali bin Abi Thalib (Syiah), kelompok Khawarij yaitu orang-orang yang tadinya ikut khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, kelompok umat Islam yang tidak berada pada kubu khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, dan kelompok terakhir adalah pengikut Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Kondisi ini hanya menjadikan semakin lemah posisi khalifah dalam menghadapi benih-benih perpecahan dalam tubuh umat Islam (Hasan, 1989: 62-63).

Berawal dari persoalan politik internal umat Islam yang tidak terselesaikan dengan baik oleh khalifah Ali bin Abi Thalib inilah kemudian persoalan politik umat Islam bergeser dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan yang absolute berada dalam kekuasaan Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Dengan berakhirnya kekuasaan Khulafaurrasyidin dan berdirinya kekuasaan Umayyah, maka era ini merupakan episode baru dalam sejarah peradaban Islam.

Adalah soal pergantian kepemimpinan (khalifah) terjadi perubahan mendasar, dari sistem musyawarah yang menempatkan kedaulatan umat Islam menjadi faktor penting bergeser ke sistem kerajaan yang penentuan suksesi kepemimpinannya berlangsung secara turun-temurun. Penyimpangan kaidah pergantian kepemimpinan inilah yang oleh Abul A'la Al-Maududi dikatakan sebagai penerapan sistem kerajaan dalam pemerintahan Islam (Al-Maududi, 1998:201-202). Karena memang pada kenyataannya pasca pemerintahan Khulafaurrasyidin yang digantikan Mu'awiyah prinsip musyawarah ini sengaja ditinggalkan dan

digantikannya dengan sistem penunjukan langsung oleh khalifah.

Pengokohan sistem kerajaan ini terlihat dengan jelas bagaimana Mu'awiyah menunjuk putra mahkotanya untuk menggantikan kedudukannya. Untuk melihat bagaimana system baru ini dioperasional dalam pemerintahan, secara lengkap akan diuraikan pada pembahasan perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. []

BAB IV
PERADABAN ISLAM ERA BANI UMAYYAH

Pembahasan pada bab ini akan menguraikan aspek hadirnya peradaban baru pada era pemerintahan bani Umayyah, kalau pun ada sedikit pembahasan soal peralihan kekuasaan dan konflik di lingkungan istana, semata-mata itu sifatnya sebagai tambahan untuk memperkuat argumentasi ketika penulis ingin mempertemukan analisis bahwa kekuasaan pemerintahan Islam dan peradaban yang dihasilkan memiliki korelasi signifikan baik dalam konteks kemajuan maupun kemunduran bagi peradaban Islam.

Kekuasaan Mu'awiyah bin Abi Sofyan sebagai cikal bakal berdirinya bani Umayyah berlangsung lebih kurang 90 tahun. Dalam perspektif politik, kekuasaannya merupakan era perubahan dalam pemerintahan Islam yaitu dari sistem yang menekankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan (demokratis) terutama untuk pergantian kepemimpinan ke sistem monarchi (kerajaan) yang pergantian penguasa dilakukan secara turun temurun. Meski sistem suksesi kepemimpinan dan kekuasaan sudah berubah, pada masa ini istilah khalifah masih dipakai dalam pemerintahan oleh Mu'awiyah dan penerusnya.

Perpindahan dari demokratis ke monarchi pada masa bani Umayyah ini ditandai ketika Mu'awiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia pada anaknya Yazid untuk menduduki posisi putra mahkota yang dipersiapkan menduduki jabatan khalifah. Kebijakannya perihal pergantian khalifah secara turun temurun nampak pertimbangan politik lebih dominan dari kepentingan keagamaan. Langkah ini merupakan pengingkaran

pertama yang dilakukan Mu'awiyah terhadap "khalifah pendahulunya", dan merupakan pelanggaran kedua atas perjanjian yang dibuat Mu'awiyah dengan Hasan bin Ali bahwa masalah pergantian pemimpin diserahkan kepada umat Islam (Hassan, 1989: 66-67).

Diakui atau tidak, bahwa persoalan suksesi kepemimpinan pasca kenabian masih menyisakan problem dan akhirnya melahirkan oposisi dalam setiap suksesi. Sampai pada hadirnya Mu'awiyah yang mengorganisir kelompoknya secara rapi dan memiliki tujuan dalam menegakkan kekuasaannya, keberadaannya tidak dipersoalkan meski pun tidak dilegimitasi sebagai orang yang suci pada masa itu. Sementara di pihak lain Ali bin Abi Thalib merupakan figur yang sangat dekat dengan Islam karena selalu terlibat dalam pengembangan Islam masuk dalam bagian sahabat dan keluarga, namun keberadaannya menghadapi tantangan berat dari umat Islam sendiri (Al-Affendi, 1994: 28).

Pada awal masa pemerintahan bani Umayyah, langkah strategis yang dilakukan Mu'awiyah adalah dengan memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Perluasan wilayah Islam kembali dilanjutkan, hingga sampai benua Afrika, Asia tengah dan benua Eropa. Dalam proses sejarah Islam bahwa Bani Umayyah inilah yang dikatakan sebagai kerajaan Islam pertama yang melakukan perluasan wilayah paling luas jangkauan wilayahnya. Peta perluasan wilayah umat Islam ini dirancang oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan sebagai pendiri Bani Umayyah yang merupakan sebagai langkah keberhasilan Bani Umayyah untuk merubah peta sosial politik umat Islam (Hak, 2012:117-118). Kekuasaan bani Umayyah yang hampir satu abad ini terbagi menjadi 14 kali pergantian kekuasaan dengan 2 kategori, yaitu kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Andalusia. Ada pula yang mengategorikan masa pemerintahan Bani Umayyah ini menjadi 3 bagian, yaitu masa permulaan berdirinya dinasti bani Umayyah, masa perkembangan atau kejayaan dan terakhir masa keruntuhannya (Maryam,

2002: 81).

Pada masa awal pemerintahannya, Mu'awiyah berusaha kuat meletakkan dasar pemerintahan dan membangun peradaban Islam. Kemajuan peradaban dan ekonomi pernah mencapai jaman keemasan, kemewahan melimpah di lingkungan istana. Tapi dibalik puncak keemasannya tersebut, membikin lengah penguasa bani Umayyah, sehingga lambat laun mengalami kehancuran (Ummatin, 2012: 208). Kemajuan dan kehancuran peradaban Islam yang pernah terjadi setelah kekuasaan ada di tangan penguasa bani Umayyah ini, dapat dicermati pada estafeta pergantian kekuasaan keturunan Mu'awiyah sebagai penerus dan sekaligus pemegang tahta kerajaan.

A. Bani Umayyah di Damaskus

Pendiri pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan yang dikenal seorang administrator ulung. Pada masa khalifah Usman bin Affan dia ditunjuk menjadi seorang gubernur di Damaskus (Syiria). Setelah khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, kekuasaan Mu'awiyah semakin kuat, bahkan setelah dibaiat menjadi khalifah, ibukota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Pemindahan ibu kota negara ini memiliki implikasi politis dan merupakan fenomena baru yang disuguhkan Mu'awiyah kepada masyarakat dan rival politiknya. Damaskus bagi Mu'awiyah merupakan basis kekuasaan dan kekuatan. Pemindahan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, dapat dikatakan sangat logis karena posisi itu semakin memperkuat kekuasaan politik dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan hingga ke berbagai wilayah, sehingga wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Pembangunan peradaban Islam juga mendapat prioritas. Banyak karya nyata dihasilkannya pada masa pemerintahan bani Umayyah, mulai dari yang sifatnya bidang keilmuan, pemerintahan

hingga ke pembangunan fisik. Perkembangan pembangunan ini makin menunjukkan kepada dunia, bahwa eksistensi Islam tidak mengalami perubahan di tangan kekuasaannya, bahkan memiliki kecenderungan makin kuat. Kekuatan pemerintahan Islam ini menjadikan politik umat Islam disegani dan diperhitungkan oleh negara-negara barat.

Sebelum menguraikan hasil peradaban Islam yang dicapai oleh penguasa Islam pasca Khulafaurrasyidin, penting kiranya melihat perubahan fundamental yang terjadi pada masa pemerintahan bani Umayyah. Dapat dilihat banyak pengembangan dan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan dilakukan oleh khalifah. Intelektual muslim melihat ada beberapa aspek penting dalam pemerintahan bani Umayyah ini, yaitu sistem pemerintahan, ikatan persatuan penduduk, kekuasaan eksekutif dan klasifikasi masyarakat (Al-Maududi, 1998: 205, Shiddiqi, 1986: 9, Yatim, 1997: 42).

Perubahan pemerintahan terjadi tidak saja dalam persoalan suksesi kepemimpinan, namun tradisi pembaitan terhadap khalifah baru tetap dilakukan. Langkah politik ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada khalifah baru. Di luar itu, sekaligus untuk menjajagi legitimisi dan kesetiaan umat Islam dan para elit kepada khalifah, sehingga perubahan benar-benar dirasakan setelah kekuasaan pemerintahan Islam jatuh ke tangan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Umayyah, juga berbeda dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Adapun beberapa karakteristik yang bisa dilihat pada masa pemerintahan Umayyah antara lain:

1. Pola pemerintahan berubah dengan mencontoh raja-raja Romawi dan persia, dimana yang pada masa khulafaurrasyidin bersifat demokratis berubah menjadi monarchi (sistem kerajaan). Pola pemerintahan kerajaan ini terus berlanjut sepeninggal Mu'awiyah.
2. Tali ikatan persatuan bagi masyarakat adalah politik dan ekonomi.
3. Khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutif (kepala

pemerintahan).

4. Sistem pemerintahan menggunakan asas sentralisasi.
5. Dalam bidang sosial kemasyarakatan warga negara dibagi menjadi dua golongan yaitu bangsa Arab sebagai tulang punggung (Arabicentris) dan bangsa Mawali yaitu bangsa non Arab keturunan dari Persia, Armenia dan lain-lain (Shiddiqi, 1986: 9).

Usaha bani Umayyah dalam membangun peradaban Islam dapat dilihat dari usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapainya. Untuk memudahkan pembahasan, berikut ini akan dipaparkan kebangkitan peradaban Islam era bani Umayyah mulai dari penguasa pertama hingga penguasa terakhirnya.

1. Mu'awiyah Sang Mercusuar Damaskus

Mu'awiyah bin Abi Sofyan sebagai pendiri bani Umayyah benar-benar menjadi momentum perubahan dan sekaligus menjadi inspirator perkembangan peradaban Islam, sehingga banyak peradaban Islam yang dihasilkannya. Terlepas dari soal kritikan tajam berkaitan dengan kebijakannya, terutama yang bertolak belakang dengan kebijakan Khulafaurrasyidin dalam soal kepemimpinan dan peralihan kekuasaan, yang jelas kehadiran Mu'awiyah dalam dunia Islam benar-benar mampu menawarkan alternatif baru pada aspek politik dan peradaban Islam.

Kepeduliaan istana pada peradaban Islam sangat nampak yang diwujudkan dengan adanya kesinambungan kepedulian diantara khalifah terhadap peradaban Islam. Kemajuan peradaban pada pemerintahan dinasti ini, seperti paparan sebagai berikut (Shiddiqi,1986: 9-10, 133-134):

a. Membangun masjid yang megah dan monumental seperti masjid kubah karang dan memperkenalkan kubahnya berbentuk setengah lingkaran yang didalamnya ada mimbar yang tinggi untuk khatib berkhutbah agar khatib bisa terhindar dari pembunuhan, karena

pada waktu itu yang berkhutbah adalah khalifah yang berkuasa.

b. Mencatat dan membukukan vonis-vonis hakim. Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan vonis pada terdakwa.

c. Membangun istana yang megah dan mewah dengan lapangan dan taman-taman yang luas dan indah.

d. Membukukan al-Hadits yang dilakukan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atas permintaan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 718 M.

e. Ditetapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara pada masa Abdul Malik Bin Marwan (685 M - 705 M).

f. Membuat mata uang sendiri sebagai alat pertukaran, meski nama-namanya masih mengikuti masa Bizantium (uang perak) atau dinar uang emas masa Persia.

g. Berkembangnya berbagai aliran yang membahas tentang ketuhanan (teologi islam) misalnya: Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah dll. Aliran-aliran ini muncul tak lepas dari gejolak politik dan sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari luar Islam.

h. Berdirinya pembangunan panti untuk orang cacat.

i. Penertiban angkatan perang.

j. Dalam bidang pemerintahan juga mengalami kemajuan, dimana pemerintahan dibagi menjadi:

   1). Katib Al-Rasail (sekretaris surat menyurat).
   2). Katib al-kharaj (sekretaris yang menangani pengeluaran dan pemasukan pajak negara).
   3). Katib Al-Jundi (sekretaris yang berhubungan dengan tentara).
   4). Katib As-Surthah (sekretaris urusan pemerintahan penyelenggaraan keamanan umum).
   5). Katib Al-Qadha (sekretaris yang menertibkan dalam bidang

hukum.

k. Ditetapkannya lambang bani Umayyah dengan simbol bendera merah.

l. Ditemukannya kertas dan kompas.

Masa pemerintahan bani Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun, sudah barang tentu perkembangan peradaban Islam banyak dinamika, ada yang sangat menonjol dan ada pula yang mengalami kemunduran. Para penulis sejarah mencatat setidaknya ada lima khalifah besar yang sangat memperhatikan perkembangan peradaban pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, yaitu Mu'awiyah ibn Abi Sofyan (661-680 M) yang sekaligus sebagai pendiri dinasti bani Umayyah, Abd al-Malik ibn Marwan (685-705 M), al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M), masa pemerintahan Umar ibn Abd al-Aziz (717-720 M), dan masa khalifah Hasyim ibn Abd al-Malik (724-743 M) kondisi negara maju, rakyat sejahtera, dan pembangunan berlangsung dengan cepat (Yatim, 1997: 42-43).

Dari lima khalifah besar bani Umayyah, masa pemerintahan Umar ibn Abd al-Aziz terbilang sangat pendek. Meski masa pemerintahannya terbilang pendek, tapi banyak perubahan dan peradaban Islam dihasilkannya. Ketegangan politik mereda, kesetaraan antara muslim Arab dan Mawali diwujudkan, pajak yang sangat memberatkan rakyat diperingan. Konsentrasi pemerintahannya lebih mementingkan ilmu pengetahuan dan internal pemerintahan dari pada harus terus memperluas wilayah kekuasaan. Pada masa ini, pemerintah benar-benar menonjolkan prinsip kebebasan, mulai dari kebebasan berpikir, kebebasan aqidah, kebebasan politik, kebebasan pribadi dan kebebasan ekonomi. Tatanan kehidupan umat Islam dikembalikan kepada bingkai syariat Islam (Ash-Shallabi, 2012: 107).

2. Titik Balik Peradaban Bani Umayyah Damaskus

Pada masa pemerintahan bani Umayyah diakui peradaban Islam banyak lahir dan berkembang, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan hingga perkembangan peradaban yang bersifat fisik. Pembangunan ekonomi dan peradaban dijalankan secara terpadu, sehingga kemegahan dan kesejahteraan bisa terwujud. Namun kondisi tersebut tidak bisa dipertahankan oleh penguasa Umayyah di Damaskus. Reputasi karir politik dan legitimasi rakyat terus memudar, sehingga menempatkan posisi kerajaan pada kondisi yang kian memprihatinkan.

Kemajuan ekonomi yang melimpah di lingkungan istana dan pembangunan fisik yang megah ternyata membuat sedikit terlena bagi pemegang kekuasaan. Akibatnya cukup fatal, sendi-sendi peradaban yang sudah ditancapkan oleh penguasa sebelumnya harus mengalami titik balik. Bukan kemajuan peradaban yang ditonjolkan, melainkan perilaku penguasa yang tidak mencerminkan sebagai penjaga dan pendorong kemajuan peradaban Islam, akibatnya peradaban Islam mengalami kemunduran.

Membahas soal kemunduran kekuasaan bani Umayyah, ada beberapa analisis yang bisa dijadikan untuk melihat penyebab kemunduran bani Umayyah (Yatim, 1997: 48-49) yang antara lain sebagai berikut:

Pertama, sistem kerajaan atau monarki merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih mengutamakan senioritas. Perubahan sistem pemerintahan dari demokratis pada masa khalifah Rasyidah ke sistem kerajaan pada masa Bani Umayyah, tidak saja berdampak pada perilaku para penerus dinasti Umayyah memiliki sifat sewenang-wenang, tapi juga sistem kerajaan ini mendapat reaksi politik cukup keras dan menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Situasi sosial politik yang melingkupi kekuasaan bani Umayyah ini, memiliki kontribusi bagi penurunan perkembanganperadaban Islam.

Kedua, diskriminasi antara Arab Islam dan Mawali dinilai turut juga menyumbangkan terjadinya konflik kepentingan di lingkungan kerajaan.

Bahkan ketidak-puasan masyarakat atas pemberlakuan diskriminasi sosial tersebut dari waktu ke waktu terus meluas, setelah mendapat sokongan dari golongan Syiah yang keberadaannya memang tidak bisa menerima dengan sikap politik bani Umayyah. Diskriminasi ini terjadi berkait al-kharraj dalam menggarap tanah yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, antara masyarakat keturunan Arab dengan keturunan non-Arab (mawali). Bagi Orang Arab Islam, kharraj yang harus dikeluarkan adalah 10% dari penghasilan di luar kewajiban zakat, namun bagi mawali di Khurasan, kharraj yang diambil oleh pemerintah mencapai 20%. Ketimpangan perlakuan pemerintah Bani Umayyah juga berkait dengan mawali Iran yang bergabung menjadi tentara, tidak mendapatkan pensiun seperti yang diterima oleh tentara Arab (Mudzhar, 1998: 98-99).

Ketiga, persoalan lain sebagai pemicu konflik adalah adanya perubahan pengelolaan aset negara berupa baitul mal. Lembaga penyangga kesejahteraan rakyat ini kemudian dialih-fungsikan masuk menjadi kas negara, yang kewenangannya mutlak di tangan penguasa pemerintahan dan keluarganya. Akibat perubahan kebijakan pengelolaan baitul mal, kekayaan melimpah di lingkungan istana dan masyarakat yang biasa mendapat subsidi dari baitul mal menjadi semakin menderita. Kondisi ini juga ikut andil menjadi pemicu munculnya konflik di lingkungan bani Umayyah, yang akhirnya bisa memperlemah kekuasaan dan mengakibatkan kemunduran.

Keempat, latar belakang terbentuknya bani Umayyah di Damaskus tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali bin Abi Thalib, sehingga sisa-sisa golongan syiah dan khawarij terus menerus menjadi pihak yang beroposisi bagi pemerintahan. Kondisi sosial politik yang demikian, dalam perjalanan waktu ternyata mengganggu stabilitas negara.

Kelima, pelanggaran janji yang dilakukan oleh pihak Umayyah terhadap Hasan bin Ali dimana peralihan kekuasaan dikembalikan kepada umat Islam setelah masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sofyan

berakhir, bukan turun temurun seperti kerajaan. Namun yang dilakukan Mu'awiyah adalah sebaliknya dengan menunjuk putra mahkota Yazid untuk meneruskan estafet kepemimpinan Bani Umayyah.

Keenam, munculnya kembali ta'assub jahiliyah atau fanatisme kesukuan yang pada masa Khalifah Rasidah berhasil ditekan.

Ketujuh, pada sistem monarki kebanyakan tidak jelas aturannya (kaitannya dengan pengganti), sehingga terjadinya persaingan antar keluarga istana.

Kedelapan, setelah masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz secara keseluruhan pemimpin pemerintahan terbiasa dalam hidup mewah dan foya-foya.

*Kesembilan, k*ekecewaan pada golongan agama, karena bidang agama kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Kesepuluh, penyebab langsung dari keruntuhan bani Umayyah di Damaskus karena adanya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan bani Hasyim yang mendapat dukungan dari golongan syiah dan kaum mawali yang merasa didiskriminasikan oleh pemerintahan Umayyah.

Sebagaimana sudah dipaparkan di atas, salah satu penyebab kemunduran Bani Umayyah adalah perubahan dari sistem Khalifah Rasyidah yang demokratis kepada sistem kerajaan turun menurun. Al-Maududi mencatat, sedikitnya ada enam perbedaan antara sistem kekhalifahan dengan sistem kerajaan (al-Maududi, 1998: 200-221):

a. Aturan Pengangkatan Khalifah.

   Pada sistem *khalifah rasyidah*, jabatan khalifah atau pemimpin diangkat & dibaiat oleh rakyat tanpa paksaan, rakyat yang memegang kendali pemerintahan setelah melalui permusyawarahan dengan menunjuk orang yang paling tepat menerima kendali kekuasaan, sehingga baiat bukan karena adanya kekuasaan tapi baiat justru memberi kekuasaan. Sedangkan pada sistem *kerajaan*, khalifah diangkat bukan berdasarkan kehendak rakyat tapi turun-temurun

dan baiat dilakukan dengan cara paksa & kekuatan.

b. Dalam sosial kemasyarakatan.

Pada sistem *khalifah rasyidah* menghendaki pemimpin hidup ditengah-tengah rakyat dan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad saw, sehingga mudah bagi masyarakat untuk bertemu dengan pemimpinnya, baik di jalan, di pasar maupun di kediaman. Pemimpin menerima keluhan, kritikan dan masukan dari masyarakat secara terbuka. Sistem seperti ini tidak ditemukan pada sistem *kerajaan*, di mana seorang pemimpin memilih cara hidupnya seperti raja-raja Romawi (kaisar) hidup di lingkungan istana yang dikelilingi oleh pengawal, antara rakyat dan raja tidak bisa bertemu secara langsung.

c. Pengelolaan Baitul Mal.

Baitul mal pada masa *khalifah rasyidah* dikelola untuk kemakmuran rakyat, karena dalam konsep Islam, baitul adalah merupakan amanat dari makhluk dan amanah dari Sang Khalik yang diamanahkan kepada seorang pemimpin. Khalifah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kas baitul mal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan masa *kerajaan*, baitul mal menjadi kas negara dikuasai oleh raja dan keluarganya.

d. Kebebasan berpendapat.

Masa *khalifah rasyidah* memberlakukan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar menjadi bagian tak terpisahkan dari sendi kehidupan sehari-hari. Masyarakat bebas melakukan masukan dan kritikan kepada pemimpin agar sesuai dengan tuntunan syari'ah tanpa ragu dan takut dihukum, begitu juga dengan sang pemimpin menerima kritik secara terbuka, sehingga tercipta kebebasan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Sementara dengan sistem *kerajaan,* pemimpin tidak mau menerima kritikan dari rakyat, bahkan pemimpin mengebiri kebebasan berpendapat, sehingga rakyat

diliputi katakutan untuk menyuarakan kebenaran.

e. Kebebasan Peradilan (hukum).

Pada masa *khalifah rasyidah,* peradilan dilaksanakan secara independen, seorang hakim tidak tunduk pada kepentingan individu maupun kelompok, sehingga hakim memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan dari manapun kecuali ketakwaan kepada Allah. Hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena hanya tunduk pada syari'at Allah dan hukum berlaku untuk semua tanpa kecuali. Pengangkatan hakim tidak didasarkan pada kedekatan dengan keluarga pemimpin, melainkan didasarkan pada derajat ketakwaan kepada Allah Swt. Sedangkan pada masa *kerajaan,* mahkamah tidak lagi independen, tapi lebih memihak kepada kepentingan penguasa, sehingga hakim dalam kedudukannya di mahkamah mulai tidak dipercaya oleh rakyat.

f. Persamaan hak.

Pada masa *khalifah rasyidah,* pemerintah tidak membedakan rakyat dari ras, suku dan bangsa, yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hal ini sejalan dengan QS al-Hujurat 13 "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*".(Depag, 1971: 847). Sedangkan pada masa *kerajaan*, mulai muncul fanatisme kesukuan yang didasarkan pada nasabiyah, sehingga suku yang berkuasa mendapat perlakuan istimewa dan terjadi diskriminasi diantara suku-suku yang ada.

Pada kondisi sosial politik dan kekuasaan yang makin tidak stabil, memberi peluang munculnya perlawanan dari pihak internal dan

eksternal pemerintahan. Setelah Umar ibn Abd al-Aziz meninggal dunia, kondisi negara mengalami berubahan. Khalifah Yazid Abd al-Malik menyukai kemewahan dan kurang memperhatikan rakyatnya. Akibatnya banyak rakyat kecewa dan membangun kekuatan baru dengan pihak oposisi. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok rakyat yang kecewa bersatu dengan golongan Mawali dan didukung oleh bani Abbasiyah makin memperkuat pihak oposisi, apalagi penguasa bani Umayyah semakin lemah, dan berhasil digulingkan dan berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus.

Dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad oleh pihak oposisi, maka berakhir pula kekuasaan bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaan pemerintahan kemudian beralih dari khalifah bani Umayyah ke bani Abbas. Meski kekuasaan sudah beralih ke dinasti Abassiyah, karena ada salah satu keturunan Umayyah yang berhasil lolos ke Andalusia dan berhasil mengembangkan pengaruhnya, maka pembahasan ini dilanjutkan pada perkembangan kebudayaan Islam pada masa kekuasaan bani Umayyah di Andalusia (Spanyol).

B. Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol)

Sewaktu daulah Umayyah di Damaskus tumbang pada tahun 750 M yang digantikan oleh daulah Abassiyah di Bagdad, maka wilayah Andalusia (Spanyol) menyatakan tunduk pada pemerintah Abassiyah di Bagdad. Pada waktu pembunuhan massal yang dilakukan oleh bani Hasyim terhadap keluarga bani Umayyah, ada salah satu pangeran dari Umayyah di Damaskus yang bernama Abdurrahman bin Muawiyyah bin Hisyam (22 th) ditemani oleh ajudannya bernama Baddar berhasil melarikan diri dari pembantaian bani Hasyim hingga ke Andalusia. Pada waktu Abdurrahman masuk ke Andalusia, wilayah ini dikuasai oleh Yusuf bin Abdirrahman dari Abassiyah yang berpusat di Toledo. Dengan masuknya Abdurrahman ke Andalusia, kedua tokoh dari dinasti

yang berbeda tersebut akhirnya terjadi persaingan politik dan perebutan pengaruh di Andalusia (Shiddiqi, 1986: 68-69; Watt, 1997: 3-4)).

Dalam persaingan antara keturunan Mu'awiyah dan penguasa Abassiyah, kemenangan ada di pihak Abddurahman, sehingga Abdurrahman (dijuluki addakhil) kemudian Andalusia menjadi wilayah kekuasaan bani Umayyah II. Setelah dikuasai Abdurrahman pusat kekuasaan dipindahkan dari Toledo ke Kordova. Meski wilayah Spanyol sudah berada dibawah kekuasaan Abdurrahman ad-Dakhil, namun gelar yang digunakan adalah Amir bukan amirul mu'minin atau khalifah. Islam Andalusia baru jelas berdiri sebagai kerajaan yang setara dengan Dinasti Abbasiyah di Bagdad, ketika pemerintahan dibawah kepemimpinan Abdur Rahman III (912-961 M) dengan memproklamirkan sebagai khalifah dengan gelar an-Nashir li Dinillah (Shiddiqi, 1986: 69). Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa masa khalifah Addur Rahman III inilah yang dianggap sebagai puncak kekuasaan dan kemakmuran Islam Andalusia (Watt, 1997: 4).

Setelah wilayah ini kembali dikuasai dinasti Umayyah, umat Islam di Spanyol mulai mengalami kemajuan dalam bidang kebudayaan. Pengembangan dan pembangunan kebudayaan mendapat perhatian dari khalifah. Selama masa pemerintahan dinasti Umayyah ini, gangguan politik masih kerap terjadi baik dari gerakan Kristen fanatik mapun gerakan politik umat Islam sendiri yang berbasis di Toledo pada tahun 852 M yang membentuk Negara kota (Yatim, 1997: 95).

Perhatian istana dalam perkembangan peradaban Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan dan pertumbuhan peradaban. Andalusia merupakan salah satu bukti, bahwa ada kontribusi besar dari negara dalam pengembangan peradaban.

1. Faktor Penyebab Andalusia Jatuh Ke Tangan Umat Islam

Faktor eksternal yang dimaksud adalah keadaan yang terdapat di negeri Spanyol yang menyebabkan masyarakat dengan segera dapat

menerima Islam dan wilayah Spanyol jatuh ke tangan umat Islam. Dalam proses penaklukan Spanyol menjadi wilayah umat Islam, sedikitnya ada tiga nama besar yang memiliki jasa atas penaklukan Spanyol, yaitu Tharif bin Malik, Thariq Ibn Ziyad dan Musa bin Nushair. Tharif ditengarai sebagai perintis dan penyelidik umat Islam masuk wilayah Andalusia, yang kemudian diteruskan oleh Thariq ibn Ziyad yang dikenal sebagai penakluk Spanyol pada tahun 711 M yang dikirim oleh Khalifah al-Walid (Shiddiqi, 1986: 68-69; Maryam, 2003: 96; Yatim, 1997: 88). Pada waktu itu masyarakat Spanyol sangat memprihatinkan, sehingga menjadikan rakyat Spanyol merindukan penolong. Thomas W. Arnold dalam buku Sejarah Da'wah Islam sebagaimana dikutip oleh Badri Yatim, ada beberapa hal sebagai *faktor eksternal* yang menyebabkan wilayah Andalusia segera bisa menjadi milik umat Islam (Yatim, 1997: 88-92), antara lain:

a. Secara keseluruhan bidang ekonomi, sosial maupun politik dalam negeri mengalami kemerosotan dan sangat memprihatinkan. Secara politik, wilayah Spanyol Kristen terpecah mengalami disintegrasi bangsa menjadi beberapa kerajaan kecil, dan dilihat dari sisi sosial, masyarakat terbagi menjadi beberapa kelas yang mengakibatkan penindasan dan diskriminasi.
b. Pemaksaan agama Kristen terhadap penduduk. Penguasa kerajaan Gothic yaitu Raja Roderick yang menguasai wilayah Spanyol bersikap tidak toleran terhadap agama dan kepercayaan masyarakat setempat yang kebanyakan beragama Yahudi. Mereka dipaksa untuk memeluk agama Kristen dan bagi yang tidak mengikuti kehendak penguasa, mereka disiksa dan dibunuh.
c. Raja Roderick sebagai kepala pemerintahan spanyol sangat kejam terhadap penduduk yang tidak sependapat dengan pemerintahannya.

Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yaitu kondisi yang terdapat pada, tokoh pejuang dan prajurit Islam yang terlibat dalam

penaklukan wilayah Spanyol. Adapun *faktor internal* penyebab wilayah Andalusia segera jatuh ke tangan umat Islam (Yatim, 1997: 93) adalah:

a. Pemimpin dan prajurit Islam yang berjuang kompak dan solid untuk menentang kaum Kristen. Mereka memiliki jiwa yang tangguh, berani dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan.
b. Ajaran Islam yang dibawa oleh kaum muslimin bersifat toleran, mengutamakan persaudaraan dan tolong-menolong antar sesama, sehingga umat Islam mudah diterima oleh penduduk.

Setelah keberadaan kaum muslimin diterima di Andalusia, maka interaksi peradaban tidak bisa dihindarkan. Kontribusi Islam pun akhirnya bisa dirasakan oleh bangsa barat melalui pintu peradaban Andalusia. Pengaruh perkembangan peradaban Islam di Andalusia dimulai dengan adanya pengakuan atas keunggulan kaum muslimin. Pencampuran antara bangsa arab Andalusia dan umat Kristen Andalusia akhirnya menghubungkan dua peradaban. Jasa Umat Islam terhadap Dunia barat dalam pengembangan peradaban dapat dilihat dari kontribusi umat Islam telah menyelamatkan peradaban klasik Yunani dari ancaman kehilangan dan kemusnahannya (munculnya tradisi penerjemahan) dan penyelidikan ilmu pengetahuan terus berlanjut.

Jasa umat Islam tersebut menjadi dasar bagi munculnya masa renaissance di Eropa pada abad 16. Peradaban Islam tersebut ditransmissikan ke benua Eropa melalui Andalusia atau Spanyol dengan dua cara, yaitu: *pertama*, orang-orang eropa datang ke Andalusia untuk mengambil dan membawa pulang ke daerahnya. *Kedua*, kaum muslimin yang mengekspor ke eropa melalui diskusi pengelanaan, kontak perdagangan dan penerjemahan buku-buku yang ditulis oleh kaum mulsimin sendiri (Shiddiqi, 1986: 95).

Pemerintahan dinasti Umayyah yang menghadapi konflik internal dan eksternal tersebut ternyata tetap konsisten mengembangkan peradaban Islam. Oleh karena itu, pada periode ini kebudayaan Islam

dapat dicatat mengalami kemajuan. Untuk melihat keberhasilan dinasti Umayyah di Andalusia dalam bidang peradaban Islam, maka paparan berikut akan menjadi fakta sejarah kepedulian dan kesungguhannya dalam mengembangkan peradaban Islam.

2. Peradaban Islam Bani Umayyah di Andalusia

Sebelum membahas peradaban Islam yang berhasil dibangun bani Umayyah di Andalusia, ada hal penting yang perlu paparkan dalam menyoal perkembangan peradaban Islam. *Pertama*, upaya penyelamatan Abdurrahman dari pembunuhan Abassiyah, tidak dilandasi oleh motif politik dan balas dendam atas pembantaian keluarganya dan penghancuran dinasti Umayyah oleh dinasti Abassiyah, karena dalam pelariannya tidak dibekali oleh pasukan dan persenjataan. *Kedua*, membangun kembali peradaban Islam nampak menjadi spirit langkah politiknya membangun kembali dinasti Umayyah, setelah berhasil memainkan peran politik dan kekuasaan di Andalusia.

Abdurrahman yang dijuluki addakhil setelah berhasil menyelamatkan diri ke Andalusia, misi utamanya mampu melampaui kepentingan pribadinya. Kalau tujuannya penyelamatan diri, tentunya setelah lolos dari kepungan dinasti Abassiyah dia akan sembunyi dan tidak akan masuk ke ranah kekuasaan. Usahanya untuk mempertahankan kekuasaan bani Umayyah, juga tidak semata-mata dalam konteks balas dendam dan mengikuti ambisi pribadi. Karena terbukti setelah Abdurrahman berhasil menegakkan kekuasaannya, dia tidak melakukan tindakan anarkis dan melakukan pembantaian terhadap para penguasa dan keturunan Abassiyah. Argumentasi lainnya adalah bahwa peralihan kekuasaan dari Abassiyah ke dinasti Umayyah tidak secara kekerasan atau perang terbuka yang banyak menimbulkan korban jiwa.

Atas fakta-fakta sejarah yang demikian, maka motif membangun kebudayaan Islam jauh lebih kuat dibanding dengan motif politik, balas

dendam dan kepentingan kekuasaan semata. Peralihan kekuasaan dari Abbasiyah ke bani Umayyah di Andalusia ini dikarenakan para penguasa Abbasiyah lebih gandrung kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dibandingkan dengan bidang kekuasaan dan politik, sehingga ketika salah satu wilayah kekuasaannya diambil alih tidak dilawan dengan kekuatan politik kekuasaan. Oleh karena itu, peralihan kekuasaan ini berlangsung secara damai tanpa ada pertumpahan darah dari kedua belah pihak.

Dengan kondisi sosial politik yang mulai stabil di Andalusia di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, maka pengusa pemerintahan mulai mengembangkan peradaban Islam. Dalam kurun waktu 7 abad lebih kekuasaan Islam, banyak prestasi sudah dihasilkannya baik yang bersifat material maupun immaterial. Kemajuan yang sifatnya material dapat dilihat pada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah pada bidang (Watt, 1997: 47-59; Shddiqi, 1986: 86-95; Maryam, 2003: 109-110; Yatim, 1997: 95, 101-103):

a. Membangun istana dan masjid yang megah di Kordova dengan nama masjid Al-Hamra.
b. Mendirikan sekolah-sekolah di kota Spanyol.
c. Pada masa pemerintahan Abdurrahman al-Nashir mendirikan perguruan tinggi yaitu universitas Cordova.
d. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi enam wilayah adminstratif dengan masing-masing penguasa bergelar Al-Amir (gubernur).
e. Dalam bidang kemiliteran dibentuk tentara bayaran yang profesional.
f. Berhasil mendirikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan.
g. Dalam bidang hukum mulai dikenal adanya madzhad Maliki yang dijadikan sebagai madzhab resmi negara yaitu pada masa pemerintahan Hisyam sebagai pengganti Abdurrahman I.
h. Mendirikan pabrik kertas yang pertama di seluruh Eropa pada tahun1150 M.

i. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi matematika, astronomi, kedokteran, logika, metafisika, historiografi, ilmu bumi, botani, musik, bahasa dan sastra, ilmu qira'at, hadis, tafsir dan lain-lain.

Selain pembangunan yang sifatnya material (terlihat dan terbaca) dinasti Umayyah juga mengembangkan masyarakat terdidik (intelektual), dibidang ilmu pengetahuan, filsafat, hukum Islam, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kebijakan kerajaan ini benar-benar dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan, baik petinggi kerajaan maupun masyarakat luas. Pembukaan akses pada perkembangan ilmu pengetahuan, seperti dibukanya perpustakaan dan lembaga pendidikan, menjadikan kebudayaan Islam berkembang dengan cepat.

3. Kemunduran Bani Umayyah di Andalusia

Pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat menonjol di lingkungan istana dan mengabaikan aspek ekonomi dan politik, ternyata menjadi masalah bagi kerajaan. Otonomi yang diberikan, banyak disalahgunakan untuk membangun otoritas tersendiri bagi kerajaan-kerajaan kecil, bahkan konflik di internal kerajaan turut serta menjadi andil kehancuran Bani Umayyah. Dengan berbagai persolan yang melingkupi kerajaan tersebut, ternyata berdampak pula bagi pengembangan peradaban Islam.

Dalam realitas sosial dan politik, kekuasaan dinasti Umayyah mampu bertahan dan berhasil membangun peradaban Islam, karena para penguasanya telah berupaya membangun sendi-sendi administratif dan kekuatan militer. Kebijakan pemerintahannya yang melakukan terobosan dengan arabisasi mata uang dan bahasa negara. Penataaan departemen-departemen (diwan) benar-benar memajukan pemerintahan dinasti Umayyah. Namun realitas kekuatan ekonomi, politik dan peradaban tersebut tidak bisa bertahan, yang akhirnya menghantarkan

dinasti Umayyah mengalami kehancuran.

Banyak faktor yang menjadi penyebab kehancuran kerajaan Umayyah ini, baik yang sifatnya internal maupun eksternal kerajaan. Berikut ini dipaparkan sebab-sebab kehancuran bani Umayyah di Andalusia (Himayah, 2004: 59-60; Yatim, 1997: 107-108):

a. Konflik antara Islam dan Kristen yang terus-menerus
b. Tidak adanya ideologi pemersatu bagi kaum muslimin.
c. Kesulitan ekonomi, yang diakibatkan karena penguasa sangat serius dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dalam kota.
d. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan sehingga terjadi persaingan antar keturunan keluarga istana.
e. Keterpencilan wilayah Islam di Spanyol, sehingga tidak pernah mendapatkan bantuan dari wilayah lain ketika umat Kristen menyerbu umat Islam di Andalusia. Satu-satunya yang pernah membantu Islam Spanyol adalah Afrika Utara.
f. Fanatisme golongan yang menjangkiti kaum Muslim, sehingga antara kelompok yang satu dengan kelompok saling bermusuhan.
g. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol Islam yang jumlahnya mencapai 23 kerajaan.

Pembahasan yang mendeskripsikan kehancuran kerajaan Islam di atas, tentu akan menjadi pelajaran dan informasi yang sangat penting untuk pembahasan setiap perkembangan peradaban. Sebuah fakta, bahwa kemajuan yang terjadi dalam pembangunan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh komitmen dan keseriusan para penguasanya dalam memperhatikan dan kemauan untuk mengembangkan peradaban Islam. Fakta yang lain adalah komitmen dan keseriusan penguasa harus ditopang oleh kekuatan sebuah pemerintahan, sehingga negara pun menjadi kuat. Dengan posisi pemerintahan dan negara kuat, menjadikan pembangunan dan pengembangan peradaban Islam menjadi stabil.

Begitu juga sebaliknya, peradaban Islam yang pernah mencapai puncak kejayaan, tidak bisa bertahan dan kemudian mengalami kehancuran, karena adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai yang pernah dirintis oleh generasi sebelumnya. []

BAB V

PERADABAN ISLAM MASA BANI ABBASIYAH

Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa lepas dari ketegangan politik pada masa pemerintahan bani Umayyah. Perilaku politik dinasti Umayyah yang dinilai telah bergeser jauh dengan era kenabian dan khalifah, menjadi salah satu faktor pendorong munculnya revolusi sosial yang dipelopori bani Abbas dengan tokoh sentralnya Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas (Yatim, 1997: 49; Fu'adi, 2011: 111). Dengan segala kekuatannya dibantu oleh kelompok-kelompok penentang Mu'awiyah, gerakan yang dipimpin bani Abass ini dalam perjalanannya mampu menghancurkan dinasti Umayyah. Keberhasilan penggulingan penguasa dan kemudian mendirikan negara tersendiri, menjadi momentum awal penegakan kekuasaan khalifah Abbasiyah.

Kondisi negara Islam masa pemerintahan Abbasiyah ini tergolong maju, ketegangan politik dapat diredakan. Konsentrasi pemerintahan berada pada aspek keilmuan, dan kurang memperhatikan pada aspek politik. Kebijakan politik Abbasiyah yang demikian longgar dari aspek politik itu, sampai-sampai dinasti Umayyah yang secara politik merupakan musuh utamanya, masih memiliki ruang dan berhasil mendirikan negara di Andalusia (mendirikan negara dalam negara) yang merupakan wilayah kekuasaan Abbasiyah.

Dalam perspektif apapun menjadi hal yang ganjil, ketika sebuah gerakan politik kekuasaan coba dibangun dan berhasil, tapi kemudian

membiarkan lawan politiknya mendirikan negara tersendiri dalam wilayah kekuasaannya. Itulah kondisi yang ditunjukkan oleh penguasa Abbasiyah. Kondisi ini sekali lagi semakin meneguhkan sikap politik Abbasiyah, yang tidak mengedepankan politik dan perluasan kekuasaan. Kebijakannya justru mengedepankan persoalan hubungan keagamaan dan peradaban. Menjadi logis kalau pada masa ini peradaban Islam berkembang dengan cepat, sehingga Islam menunjukkan kemajuan yang luar biasa tertama dalam ilmu pengetahuan.

Kebijakan politik yang dilakukan setelah Umayyah terguling adalah memindahkan pusat pemerintahan ibu kota negara ke Bagdad. Sementara dalam menjalankan pemerintahannya, mengembalikan tali ikatan masyarakat pada agama. Abbasiyah meneguhkan kembali kekhalifahan berada pada wilayah yang sakral. Kemudian pada masa kekuasaannya juga dilangsungkan kodifikasi syariat Islam. Dilihat kurun waktu memerintah, maka pemerintahan Abbasiyah ini berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 750-1258 H (Yatim, 1997: 49-50; Nashr, 2003: 139-140; Siddiqi, 1986: 12).

A Hasjmy memberikan ilustrasi keberadaan Abbasiyah sebagaimana mengutip pakar sejarah al-Fakhri bahwa Abbasiyah adalah daulah yang agung yang memerintah dunia dengan politik yang berlandaskan agama dan kekuasaan. Daulah ini memiliki kebaikan dan keutamaan yang banyak, di dalamnya berdiri pekan-pekan ilmu pengetahuan, membesarkan syiar agama, meranum adab dan budi, mengembangkan kebaikan, memperkokoh benteng-benteng terpeliharanya kehormatan (Hasjmy, 1994: 329).

Sebagai penguasa baru, sudah tentu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penguasa yang sebelumnya. Dalam menjalankan pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki ciri-ciri berikut ini, yang sekaligus akan menjadi karakteristik Bani Abbasiyah. Adapun karakteristik dinasti Abbasiyah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tali ikatan persatuan adalah agama, khalifah adalah pelindung agama karena khalifah merupakan bayang-bayang Tuhan di muka bumi dengan deklarasinya menggunakan kata-kata khalifah, "Innama ana Sulthan Allah fi ardhihi" sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi-Nya. Jabatan khalifah bukanlah jabatan sekuler sehingga gelar khalifah yang disematkan adalah al-Manshur, al- Mahdi, al-Hadi, al-Makmun, ar-Rasyid dan lain seterusnya.
2. Pola pemerintahan mengikuti pemerintahan Persia Lama yaitu pemerintahan salah satunya dengan memakai kekuasan Wazir sebagai pemimpin dalam bidang eksekutif pemerintahan, yang pada masa Bani Umayyah tidak ada, dan wazir pertama yang diangkat pada masa Abbasiyah adalah Khalid bin Barmak.
3. Tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan mawali sebagai sesama muslim dan sebagai warga negara. Penghargaan negara terhadap rakyat bangsanya tidak diskriminatif, bahkan orang-orang mawali memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat berketurunan Arab. Khalifah menyadari betul, bahwa salah satu keberhasilan menumbangkan Bani Umayyah karena disokong oleh adanya sentimen kesukuan yang diberlakukan secara tidak adil oleh penguasa. Dengan berdasar pada pengalaman sejarah kewarganegaraan tersebut, maka antara Arab dan non Arab tidak dijadikan alasan membuat sebuah kesenjangan dan diskriminasi kebijakan.
4. Sistem pemerintahan adalah desentralisasi, dengan membagi wilayah kekuasaan kepada propinsi-propinsi yang dipimpin oleh gubernur atau sulthan dan penguasanya dilantik oleh khalifah. Langkah ini adalah untuk memudahkan roda pemerintahan, sehingga ada 12 pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan. Desentralisasi pemerintahan Abbasiyah dengan memberi kelonggaran kepada pemerintah daerah, ternyata

dimaknai secara politik oleh pejabat daerah yang beragam, sehingga ada daerah-daerah yang diberi kekuasaan untuk mengembangkan daerahnya, justru dalam perkembangannya daerah-daerah tersebut berusaha memisahkan diri dari pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi daerah merdeka, menjadi daerah otonom dan ada yang masih memiliki hubungan keagamaan. Disamping menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dinasti Abbasiyah juga menghentikan gerakan perluasan wilayah, bahkan otonomi daerah semakin diperluas, sehingga mulailah dikenal dengan gelar Malik dan Sultan sebagai penguasa di daerah yang dilantik oleh khalifah Abbasiyah (Fu'adi, 2011: 128-129; Shiddiqi,1986: 135).

5. Madzhab yang didukung oleh negara sejak awal berdirinya tahun 750 M sampai masa pemerintahan al-Mutawakil paruh waktu pemerintahannya (847-681) adalah Mu'tazilah, namun pada paruh terakhir pemerintahan al-Mutawakil mendukung sunni sehingga mu'tazilah menjadi surut (Shiddiqi, 1986: 12-13, 135).
6. Sistem ketentaraan dibenahi secara profesional, sehingga pada masa Abbasiyah ini ada sistem ketentaraan profesional yang berhasil dibentuk.
7. Pada aspek perkembangan hukum Islam, Abbasiyah berusaha membangun dan memberikan bantuan untuk penguatan sistem hukum Islam "kodifikasi" yang melibatkan para ulama (Esposito, 1990: 24; Yatim, 1997: 50-54).

Realita sejarah yang sangat panjang kekuasaan Dinasti Abbasiyah dalam perjalanan politik Islam, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan Bani Abbasiyah. Para sejarawan mencatat tradisi Abbasiyah mengembangkan pola hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bisa ditaklukkan di bawah kekuasaan, dijadikan mitra untuk mengembangkan kebudayaan Islam dengan sama-sama menguntungkan. Dalam hal ini dibuktikan dengan sikap khalifah mau melakukan asimilasi

antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, dengan bangsa Persia misalnya dalam bidang pemerintahan dan sastra. Dengan pengaruh kuat Persia, menjadikan bidang pemerintahan mengikuti pola Persia.

Asimilasi dengan bangsa India keterkaitan dengan pengembangan ilmu kedokteran, matematika dan astronomi. Kemudian ketika membangun hubungan dengan bangsa Yunani, mengembangkan filsafat. Dengan dibukanya pengembangan keilmuan dan peradaban Islam, menjadikan kota Bagdad sebagai ibukota negara dikenal dengan pusat kegiatan peradaban Islam yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh besar seperti sang pujangga Humairy dan Abu Nawas, ulama fiqh seperti Imam madzhab yang pemikirannya masih eksis hingga dewasa ini (Hasjmy, 1994: 331-332, Yatim, 1997: 55-56).

Keberadaan khalifah yang baik dan berkomitmen mencintai peradaban Islam serta menumbuh-suburkan keilmuan mendorong kemajuan Abbasiyah ke puncak kejayaannya. Kegairahan para kaum terpelajar berlomba-lomba melakukan penelitian dan penerjemahan dari berbagai sumber ilmu pengetahuan, bahkan tidak segan-segan istana dijadikan sebagai tempat kegiatan ilmu dan peradaban Islam. Oleh karena itu, pada masa kejayaan ini berkembang berbagai ilmu dan tokoh-tokoh yang memiliki andil memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Gerakan penerjemahan besar-besaran yang terjadi pada masa khalifah Al-Mansur sampai dengan khalifah Harun Al-Rasyid yang memfokuskan terjemahan dalam bidang astronomi dan ilmu mantiq. Kemudian pada masa khalifah Al-Makmun, terutama digalakkan terjemahan dalam bidang filsafat dan kedokteran, bahkan pada masa ini boleh dibilang masa kemajuan keilmuan yang ditandai berkembangnya segala macam ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu yang lainnya (Hasjmy, 1994: 341-342, Yatim, 1997: 55-56).

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan ini

tidak diimbangi dengan kemajuan dan kekuatan dibidang politik pemerintahan. Realitasnya dari sisi politik pada fase ini cenderung dikesampingkan, bahkan kebijakan desentralisasi semakin diprioritaskan dan kewenangan daerah-daerah diberi hak otonomi. Kondisi ini satu sisi membawa dampak kemajuan luar biasa, tapi ketika kebijakan khalifah ini dimaknai sebuah kesempatan untuk memerdekakan diri bagi daerah-daerah otonom tentu memiliki dampak negatif.

A. Desentralisasi Bani Abbasiyah: Kejayaan VS Kehancuran

Pusat kekuasaan pemerintahan Islam pasca pemerintahan Nabi Muhammad dan Sahabat (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) yang semula dijalankan secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah, roda pemerintahannya mengalami perubahan dengan dua sistem pemerintah yang saling bertolak belakang secara bergantian. Peletakan sendi-sendi pemerintahan Islam yang sudah dirintis Nabi dan dilanjutkan Sahabat, terutama sekali dalam hal pergantian kepemimpinan (suksesi) menjadi diabaikan.

Para pemegang dinasti kekuasaan cenderung mementingkan untuk melanggengkan kekuasaan ada pada dirinya dan anak keturunannya. Oleh karena itu, mereka lebih memilih sistem kerajaan ketimbang mengedepankan musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahan, meski istilah khalifah masih digunakan oleh para pemegang dinasti-dinasti kekuasaan Islam. Dalam hal ini merujuk pada dua dinasti besar sebagai pencetus perubahan, yaitu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang masing-masing memiliki argumentasi sebagai berikut:

Pertama, setelah khalifah Ali bin Abi Thalib jatuh karena adanya sengketa politik yang berkepanjangan dan diakhiri dengan kemenangan Mu'awiyah, maka pemerintahan Islam dilanjutkan oleh pihak Mu'awiyah dan kroninya. Kekuasaan dinasti Umayyah ini menjalankan sistem pemerintahan dengan sentralistik dan memilih model kerajaan, dimana

pengganti pemerintahan ditunjuk oleh khalifah dengan pengangkatan putra mahkota. Penggantian sistem pemerintahan ini jelas bertolak belakang dengan para pendahulunya, karena Rasul dan Sahabat tidak mengajarkan pergantian kekuasaan dengan didasarkan pada keturunan.

Kedua, pemerintahan sentralistik yang dijalankan dinasti Umayyah ini akhirnya tumbang setelah berjalan dalam kuran waktu 661-750 M. Sentralisasi kekuasaan mendapat tantangan banyak daerah yang akhirnya dinasti ini berhasil ditumbangkan oleh bani Abbas. Dengan tumbangnya dinasti Umayyah, maka kekuasaan pemerintahan Islam digantikan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebagai pengganti pemerintahan sebelumnya, melakukan perombakan pemerintahan dari sentralisasi ke sistem desentralisasi. Hanya saja berkaitan dengan penggantian kepemimpinan, Abbasiyah masih menggunakan cara dengan model mengangkatan putra mahkota, sehingga model musyawarah yang dipraktikkan Nabi dan Sahabat menjadi terabaikan.

Sistem pemerintahan yang digunakan dalam pemerintahan Islam pasca kenabian dan sahabat ini dalam pandangan ilmuwan muslim Abul A'la Al-Maududi bertolak belakang dengan prinsip kekhalifahan Islam. Menurut pandangannya, kekhalifahan yang benar tidak didasarkan pada perorangan, keluarga atau kelas tertentu, melainkan berada di tangan orang-orang yang beriman dan bersedia menegakkan kekuasaan berdasarkan al-Qur'an dan apa yang sudah dicontohkan Nabi dan para Sahabat. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa kekuasaan Allah hanya dikhususkan kepada dirinya dan bukan kaum mukmin lainnya (al-Maududi, 1998: 67). Bahkan sistem pemerintahan Islam yang mengedepankan musyawarah (demokrasi) tidak semata-mata diserahkan kepada manusia secara keseluruhan kekuasaan itu, akan tetapi masih ada penguasa tertinggi yaitu Allah dan masih ada namanya wahyu sebagai pembimbing sejati dan rujukan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan 'theo-demokrasi'.

Adalah sebuah pilihan untuk menerapkan sistem desentralisasi oleh Abbasiyah dalam menjalankan pemerintahan. Ada sejumlah argumentasi yang bisa diajukan untuk menganalisis pemerintahannya ini. *Pertama,* penerapan desentralisasi dikarenakan kekuasaan Abbasiyah tidak sekuat dinasti Umayyah. *Kedua,* para khalifah dinasti Abbasiyah lebih cenderung mementingkan persoalan agama, ditandai dengan khalifah memikul gelar imam, sehingga persoalan politik dan pemerintahan tidak begitu diutamakan. *Ketiga*, kondisi politik di sejumlah daerah yang menjadi wilayah kekuasaan banyak yang ingin merdeka dan memisahkan diri dengan pemerintahan pusat atau menjadi daerah otonom, meski secara kultural dan keagamaan masih memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Abbasiyah. *Keempat*, kekuasaan Abbasiyah yang luas dan terpencar menjadikan kekuasaannya melemah dan para penguasanya lebih mementingkan pembangunan kebudayaan dan peradaban dari pada mementingkan persoalan politik (Malik Sy, 2005: 147; Yatim, 1997: 63).

Pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, minimal ditandai dengan adanya prosesi pergantian jabatan khalifah dengan pola pembaiatan yang tetap dilakukan pemerintah pusat. Dua hal lain adalah gelar khalifah yang digunakan tidak menyimpang dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah masih mau menyetor upeti kepada pemerintah pusat Abbasiyah. Sistem pemerintahan yang dijalankan demikian longgar, akibatnya memang ada daerah yang akhirnya benar-benar memisahkan diri menjadi daerah merdeka yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan Abbasiyah, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi politik, seperti dinasti Umayyah di Andalusia, Dinasti Tuluniyah di Mesir, dinasti Ikhsidiyah di Mesir dan dinasti Fatimiyah di Mesir (Hassan, 1989: 208-226).

Tata kelola pemerintahan Abbasiyah ini memang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena disamping kebijakannya dapat mendorong perkembangan peradaban Islam dengan cepat, ternyata kebijakan

desentralisasi juga menyisakan sejumlah permasalahan tersendiri terutama dalam kaitan relasi antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembahasan relasi kekuasaan ini akan dideskripsikan pada sejumlah daerah yang makin menguat posisinya yang pada akhirnya mengancam kerapuhan dinasti Abbasiyah.

Untuk memudahkan pembahasan, maka secara garis besar kekuasaan Abbasiyah yang telah melahirkan daerah otonom, dan daerah yang secara politik terpisah dengan pusat pemerintahan Abbasiyah, memang mengharuskan adanya multi perspektif, dalam melihat kasus pemerintahan Islam yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, paparan daerah-daerah yang secara politik dan keagamaan membangun relasi dengan Abbasiyah menjadi penting, yang sekaligus sebagai argumentasi dari keunggulan dan kelemahan kebijakan politik pemerintahan Abbasiyah.

Pada periode awal pemerintahannya, hampir semua sejarawan mencatat dinamika Abbasiyah mengalami kemajuan yang luar biasa, baik dalam hal pemerintahan, bidang peradaban, maupun kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Ada sejumlah nama besar khalifah yang memerintah pada periode ini, yaitu Abu al-Abas (750-754 M) yang sekaligus sebagai pendiri Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M) dengan gebrakan politik pemerintahannya memindahkan ibu kota pemerintahan ke Bagdad. Istilah wazir selaku koordinator departemen ditumbuhkannya, protokoler kenegaraan, sekretaris negara, kepolisian, membenahi angkatan bersenjata, dan fungsionalisasi jawatan pos sebagai agen informasi dihasilkan pada masanya (Yatim, 1997: 50-51).

Semangat perjuangan dan upaya membangun kemajuan peradaban Islam kemudian dilanjutkan oleh tujuh khalifah sesudahnya, sehingga dinasti ini berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tujuh khalifah yang dimaksud adalah al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (785-786 M), Harun al-Rasyid (786-809 M), al-Amin (809-813 M), al-Mak'mun (813-833 M),

al-Mu'tasim (833-842 M), al-Wathiq (842-847 M) dan al-Mutawakkil (847-861 M). Pada masa pemerintahan dua khalifah terakhir (al-Wathiq dan Mutawakkil) kondisi negara sudah mulai menurun prestasinya, karena banyaknya problem internal dan hidup mewah di lingkungan istana (Maryam, 2003: 117; Yatim, 1997: 52-53).

Pada masa pemerintahan al-Mahdi reformasi pemerintahan dilakukan dan banyak kemajuan bisa dihasilkan, diantaranya adalah pembaharuan pajak tanah, memajukan perdagangan dan menjadikan Bagdad sebagai kota dagang internasional. Dalam bidang musik, syair, filsafat dan sastra berkembang pesat. Penggantinya al-Hadi tidak banyak kemajuan dan peradaban yang dihasilkan, karena pendeknya masa pemerintahannya. Jabatan khalifah kemudian dipegang oleh Harun al-Rasyid, dan pada masa pemerintahannya dinasti Abbasiyah mencapai kemajuannya, kesejahteraan meningkat, istana-istana besar dibangun, ilmu pengetahuan mencapai kemajuan dengan gerakan penerjemahan (Hassan, 1989: 115; Maryam, 2003: 122-123).

Setelah meninggalnya khalifah Harun al-Rasyid dan digantikan oleh al-Amin kondisi dinasti Abbasiyah berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kondisi negara yang sudah mulai melemah, pergantian khalifah pun ternyata tidak bisa memulihkan situasi sosial politik, memajukan kebudayaan dan akhirnya daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah semakin meningkatkan otoritasnya, bahkan ada yang berani menyatakan diri sebagai daerah yang merdeka berpisah dengan Abbasiyah.

Kebijakan politik Abbasiyah yang memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah atau dengan bahasa lain pemerintah pusat memberikan keleluasaan kewenangan kepada daerah, secara politik telah melahirkan sejumlah daerah otonom yang dapat berkembang dengan cepat. Peradaban Islam pada jaman ini juga mengalami perkembangan signifikan, sehingga banyak lahir ilmuwan muslim pada era pemerintahan ini.

Dampak dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan Abbasiyah menjadikan peradaban Islam berkembang. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, menurut sejarawan muslim Ahmad Amin karena dinasti Abbasiyah dengan para khalifahnya terutama masa Al-Mansur, Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun mencintai ilmu, sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Pada masa pemerintahan tersebut dikembangkan ilmu kedokteran, mantiq dan ilmu-ilmu lainnya (Amin, t.t: 14; Yatim, 1997: 52).

Kecenderungan mementingkan peradaban dan ilmu pengetahuan dibanding dengan perluasan wilayah kekuasaan politik, menjadi ciri yang membedakan dengan era sebelumnya. Dukungan istana terhadap kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan, bukan saja dalam bentuk berbagai fasilitas untuk pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, namun penghargaan khalifah kepada para ulama dan ilmuwan juga sangat tinggi. Oleh karenanya, menjadi wajar kalau kemudian banyak lahir ilmuwan muslim yang benar-benar berkonsentrasi mengembangkan disiplin ilmunya baik dalam bidang sastra, perbintangan maupun kedokteran.

Pengembangan bidang ilmu kedokteran dan obat yang disusul pendirian rumah sakit dengan tokohnya 'Ali ibn Sahl Rabban at-Thabari, ar-Razi, 'Ali ibn Abbas al-Majusi, dan nama Ibn Sina. Dari tokoh-tokoh inilah kemudian ilmu kedokteran berkembang, bahkan ilmu farmasi berkembang seiring dengan keberadaan para dokter. Ada nama Jabir ibn Haiyan yang mempelopori bidang farmasi (Shiddiqi, 1986: 24-25). Kemajuan-kemajuan dibidang ilmu pengetahuan masih banyak dan perlu dilacak dan dikaji secara cermat, dan masing-masing kemajuan bisa dipaparkan, karena diluar bidang kedokteran dan farmasi, ada pengembangan di bidang filsafat, kesusasteraan, arsitektur dan pengetahuan lainnya.

Mengingat begitu panjang masa kekuasaan Abbasiyah, dan kebijakannya telah melahirkan sejumlah negara-negara kecil yang menyatakan diri menjadi wilayah merdeka atau menjadi daerah otonom

yang masih menjadi bagian dari kekuasaan khalifah Abbasiyah, terutama saat kekuatan pemerintahan mengalami kemunduran. Diantara negara-negara yang merdeka dan masih tunduk itu diantaranya adalah Azerbaijan, Aljazirah, Damaskus. Sedang negara-negara atau daerah yang menyatakan diri merdeka dan terpisah dengan dinasti Abbasiyah antara lain yaitu Daulah Aglabiyah, Umayyah di Andalusia, Daulah Fatimiyah Mesir, Ghaznawiyah (Maryam, 2002: 142-143) dan tentu masih banyak lagi yang tidak disebut dalam kajian ini satu persatu.

Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, pada kenyataannya dalam perkembangan dinasti Abbasiyah tidak diikuti dengan kemajuan dan kekuatan dalam bidang politik dan pemerintahan. Akibatnya, perjalanan pemerintahan dinasti Abbasiyah bukan semakin kuat, melainkan semakin lemah bersamaan dengan pergantian khalifah yang diikuti dengan sejumlah persoalan di tingkat internal pemerintahan.

Kebijakan otonomi pemerintahan yang pelaksanaannya memberi kelonggaran atau bahkan toleransi penggunaan kewenangan kepada pejabat lokal, justru menjadikan posisi pusat pemerintahan menjadi kehilangan powernya. Luasnya cakupan wilayah kekuasaan disebut-sebut memiliki andil lemahnya kekuasaan pemerintahan. Faktor lain adalah tampilnya khalifah yang kurang cakap dan berwibawa menjadikan bertambah lemahnya kekuasaan Abbasiyah yang disusul dengan konflik internal sebagai akibat suksesi kepemimpinan.

B. Kemunduran Bani Abbasiyah

Kemajuan di berbagai bidang yang telah dicapai oleh dinasti bani Abbas, ternyata tidak mampu dipertahankan. Bahkan kemrosotan wibawa, kemajuan bidang peradaban, dan luas kekuasaannya mengalami kemunduran yang akhirnya harus menemui puncak kehancurannya. Penyebab kemunduran Bani Abbasiyah (Yatim, 1997: 80-85; Fu'adi, 2011: 142-148):

1. Lebih menekankan bidang pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada persoalan politik, sehingga kebijakan ini mempunyai implikasi:
   a. Seorang pemimpin lokal menggalang kekuatan dan melakukan pemberontakan sampai mendapatkan kemerdekaan penuh, (Bani Umayyah di Spanyol dan daulah Idrisiyah di Maroko).
   b. Gubernur yang ditunjuk oleh khalifah Abbasiyah kedudukannya semakin kuat dan kokoh, sehingga pada akhirnya berusaha meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari kekuasaan bani Abbas.
2. Bani Abbasiyah melebihkan bangsa asing terutama bangsa Persia daripada bangsa Arab dalam pemerintahannya.
3. Timbulnya persaingan syu'ubiyah antara bangsa Arab, Persia dan Turki dalam tampuk pemerintahan. Bani Abbasiyah sendiri didirikan atas sekutu bani Abbas dengan bangsa Persia, dan sampai pemerintahan berdiri kokoh, persekutuan itu tetap dipertahankan. Sedikitnya ada dua alasan mengapa bani Abbas lebih memilih bangsa Persia ketimbang bangsa Arab, pertama, bangsa Arab yang merupakan tulang punggung bagi pemerintahan Umayyah dan menjadi masyarakat kelas satu tidak mudah melupakan bani Umayyah. Kedua, Bangsa Arab sendiri terpecah berdasar ashabiyah kesukuan, sehingga bisa dikatakan bahwa Abbasiyah tidak dibangun atas dasar ashabiyah tradisional.
4. Luasnya wilayah kekuasaan bani Abbasiyah sementara komunikasi antara pusat dan daerah sulit dilaksanakan sehingga tingkat kepercayaan antar elit pemerintah sangat rendah.
5. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah terhadap angkatan bersenjata sangat tinggi.
6. Terjadinya konflik pemikiran terutama dalam bidang teologi sehingga terjadi perpecahan dalam umat Islam sendiri.

7. Timbulnya kerajaan-kerajaan kecil yang mandiri walaupun tetap mengakui khalifah bani Abbasiyah karena jabatan khalifah dipandang sebagai jabatan yang sakral dalam bidang agama dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh semakin sempitnya wilayah kekuasaan karena dinasti kecil melepaskan diri dan tidak lagi membayar upeti, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, juga dikarenakan kecenderungan para khalifah hidup berfoya-foya sehingga rakyat jatuh miskin.
9. Konflik keagamaan antara sunni dengan syi'ah, juga khalifah Abbasiyah berhadapan dengan kaum zindiq, dimana khalifah al-Mahdi sampai merasa perlu untuk mendirikan jawatan untuk menangani persoalan itu bahkan dengan melakukan mihnah.
10. Perang salib antara umat Islam melawan umat Kristen dalam memperebutkan wilayah Baitul Maqdis.
11. Penyebab langsung adalah serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.

C. Dinasti-dinasti Masa Bani Abbasiyah

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pada pemerintahan Abbasiyah yang demikian luas, berimplikasi pada keinginan daerah untuk memisahkan diri dari Abbasiyah. Ada dua macam pemerintahan akibat dari kebijakan desentralisasi Abbasiyah ini, yaitu, *Pertama*, daerah otonom yang akhirnya benar-benar memisahkan diri menjadi daerah merdeka yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan Abbasiyah, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi politik. Dinasti ini tidak tunduk pada pemerintahan Abbasiyah, misalnya dinasti Umayyah di Andalusia (756-1031 M), Idrisiyah di Maroko (789-985 M), Tuluniyah di Mesir (868-905 M), Ikhsidiyah di Mesir (935-969 M), Fatimiyah di Mesir (909–1171 M), Ghaznawiyah di Afganistan (926-

1152 M), Muwahhidun (1147-1269 M) (Maryam, 2002: 142-143; Hassan, 1989: 208-226). Gelar penguasa dinasti independen ini sama seperti gelar-gelar khalifah Abbasiyah di Bagdad.

Kedua, daerah otonom yang memisahkan diri secara politik, namun dari sisi keagamaan masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah, penguasa daerah otonom ini bergelar Malik atau Sultan, dan mereka masih mengirimkan upeti sebagai bentuk keloyalan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat Abbasiyah. Dinasti yang tetap mengakui dan tunduk pada kekhalifahan Abbasiyah ini misalnya dinasti Buwaihi di Syiraz Persia (945 – 1055 M), Saljuk di Bagdad (1055 – 1199 M) dan Ayyubiyah di Mesir (1171-1250 M).

1. Dinasti yang Tidak Tunduk pada Pemerintahan Bani Abbasiyah

Salah satu dinasti yang melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah adalah dinasti Fatimiyah di Mesir (909–1171). Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu negara kecil yang memerdekakan diri dari wilayah Bagdad dan membentuk kekhalifahan tersendiri dengan menganut madzhab Syi'ah Ismailiyah di Afrika Utara. Pendiri dinasti ini adalah Ubaydillah al-Mahdi, merupakan penerus perjuangan Husain putra Ali. Kelompok yang bermadzhab syi'ah ini tidak mendapatkan tempat pada pemerintahan Abbasiyah, sehingga mereka mencari tempat yang aman dan jauh dari pusat kekuasaan Abbasiyah yaitu di Afrika Utara (Hassan: 1989: 226-231). Dalam rentang waktu pemerintahan Fatimiyah, secara bergantian dipimpin oleh Ubaydillah al- Mahdi, Qa'im (934 M), Mansur (945 M), Mu'izz (952 M), Aziz (975 M), Hakim (996 M), Zahir (1020 M), Mustansir (1035 M), Musta'li (1035 M), Amir (1101 M), Hafidz (1130 M), Zahir (1149 M), Fa'iz (1154 M) dan 'Adid (1160-1171). Bani Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa al Mu'izz Lidinillah (952-975) dengan membangun kota Kairo pada tahun 969 M oleh panglima perang bani Fatimiyah, Jawhar al-Siqili (Yatim, 1997:281-282).

Dibawah pemerintahan al-Muizz Lidinillah dan dilanjutkan putranya al-Aziz, pemerintahan Fatimiyah mengalami kemajuan yang pesat yaitu pembaharuan administrasi, pembangunan ekonomi, toleransi beragama dan kemajuan dalam bidang seni dan ilmu pengetahun. Kemajuan yang dicapai bani Fatimiyah ini menyamai kemajuan kemajuan pemerintahan Abbasiyah masa khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Hasil kebudayaan yang dicapai pada masa bani Fatimiyah (Yatim, 1997: 282-284) antara lain:

a. Mendirikan masjid Jami' Al-Azhar yang kemudian juga berfungsi sebagai universitas di Kairo.
b. Mengganti mata uang dari nama-nama khalifah Abbasiyah Bagdad menjadi nama-nama khalifah Fatimiyah.
c. Pada masa khalifah Aziz membuat beberapa istana yaitu istana emas (al-qoshr Adz-Dzahab), istana Heliopolis (al-qoshr 'Ain Syam) dan istana sungai (al-Qoshr Al-Nahr).
d. Mendirikan Akademi dengan nama Baitul Hikmah yang terinspirasi oleh lembaga yang sama di Bagdad yang didirikan oleh khalifah al-Ma'mun Abbasiyah.
e. Mendirikan perpustakaan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan nama Darul Ulum.
f. Mendirikan teropong bintang di bukit Muqottam dengan nama Ar-Rashadul Hakimy.
g. Dalam bidang hukum agama diadakan empat peradilan tinggi yaitu dua peradilan untuk madzhab Syi'ah dan dua peradilan untuk madzhab Sunni.

Bila ditelusuri lebih jauh, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu kemunduran bani Fatimiyah, yaitu:

a. Banyaknya orang-orang Kristen yang terdapat dalam pemerintahannya. Sebagai catatan bahwa istri khalifah Aziz sendiri adalah orang Kristen.

b. Datangnya orang-orang Turki yang merampas dan menghancurkan perpustakaan.
c. Pecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan yaitu golongan Musta'liyah, golongan Nazariyah dan golongan Tayyibiyah.
d. Khalifah bani Fatimiyah secara umum lemah, karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap para mentri.
e. Terjadinya perang melawan Bani Saljuk yang dibantu oleh tentara salib.

2. Dinasti yang Tunduk pada Bani Abbasiyah

a. Dinasti Buwaihi (945 – 1055 M)

Krisis politik dan kekuasaan bukan saja menimbulkan kian melemahnya dukungan pemerintah daerah kepada pusat kekuasaan, melainkan ada daerah justru menjadikan momentum untuk mengembangkan otoritasnya. Dalam kajian sejarah Islam, dikenal ada dinasti Buwaihi yang dirintis oleh anak Abu Syuja' Buwaih yaitu Ali, Hassan dan Ahmad melalui jalur kemiliteran, karena karir kemiliterannya menonjol sehingga Ali diberi kepercayaan oleh bani Abbasiyah menjadi gubernur al-Karaj dengan gelar *imad al-daula*h yang berpusat di Syiraz, Ahmad ibn Buwaih diangkat menjadi *amirul umara* yaitu pemimpin tertinggi dalam bidang politik dan bergelar *mu'izz al-daulah* karena telah membantu menumpas kekisruhan politik di Bagdad dan Hasan yang memerintah di bagian utara di Persia mendapat gelar *rukn al-daulah***.** Pada awal berdirinya, bani Buwaihi menempatkan pusat pemerintahan di Syiraz Persia, namun kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Bagdad setelah Bagdad ditaklukkan, meski kendali pemerintahan tetap berada di Syiraz tempat Ali bin Buwaih bertahta (Yatim, 1997: 69-70; Fu'adi, 2011: 185-188)).

Pada masa pemerintahan bani Buwaih ini, praktis urusan pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh Ahmad bin Buwaih dan amir-amir dari bani Buwaihi, sedangkan khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja. Namun perlu dicatat, bahwa pada masa pemerintahan bani Buwaihi di Bagdad ini, telah mencapai keberhasilan (Yatim, 1997: 71) antara lain:

a). Pindahnya pusat pemerintahan dari Syiraz Persia ke Bagdad dengan bangunan tersendiri yang disebut Darul Mamlakah, walaupun pada akhirnya kendali kekuasaan tetap di Syiraz.
b). Bani Buwaihi berhasil menyatukan dinasti-dinasti kecil yang sebelumnya memerdekakan diri dari kekuasaan Bagdad.
c). Berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga melahirkan ilmuwan, contoh: Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih, Al-Farabi dan Ibnu Haitam.
d). Kemajuan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan industri terutama industri permadani.
e). Dibangunnya pusat pelayanan masyarakat misalnya rumah sakit, jembatan, masjid dan lain-lain.

Masa Buwaihi mengalami kemajuan hanya ketika pemerintahan dikendalikan oleh tiga bersaudara tersebut, setelah itu pemerintahan mengalami kemunduran dan tidak bisa bertahan lama, karena kekuasaan menjadi ajang perebutan diantara anak-anak mereka. Faktor Penyebab Kemunduran (Yatim, 1997: 71-72):

1). Faktor Internal:
   a). Terjadinya perebutan kekeuasaan dikalangan keturunan Bani Buwaihi, masing-masing keturunan dari tiga bersaudara itu merasa paling berhak memimpin pemerintahan pusat di Bagdad.
   b). Pertentangan yang terjadi di tubuh militer antara keturunan dari Dailam Persia dengan keturunan Turki.
   c). Sering terjadi pertentangan antara faham Syi'ah yang dianut

oleh keturunan Bani Buwaihi dengan faham Sunni yang dianut oleh keturunan Bani Abbasiyah (sebagai catatan bahwa khalifahnya bermadzhab sunni dan amir al-umara'nya atau pemimpin tertinggi dalam bidang politik bermadzhab syi'ah).

d). Dinasti-dinasti kecil melepaskan diri dari kekuasaan Bagdad (Ikhsidiyah dan Ghasnawiyah).

2). Faktor Eksternal:

a). Adanya serangan dari Bizantium ke negara-negara Islam termasuk ke Bagdad.

b). Serangan dari Dinasti Saljuk yang berasal dari keturunan Turki Sunni yang berhasil merebut kekuasaan Bagdad dari Bani Buwaih.

b. Dinasti Saljuk (1055 – 1199 M)

Dinasti Saljuk berasal dari kabilah kecil yaitu dari rumpun suku Ghuz di Turkistan. Kabilah-kabilah tersebut dipersatukan oleh Saljuk bin Tuqoq. Dinasti saljuk menggantikan dinasti Buwaihi di Bagdad dibawah pimpinan Thugrul Bek dan mendapat pengakuan dari khalifah Abbasiyah. Dinasti Saljuk diproklamirkan pada tahun 1040 M. Faham yang dianut oleh Dinasti Saljuk adalah Sunni. Meski Abbasiyah Bagdad sudah dikuasai oleh bani Saljuk, namun pusat pemerintahannya di Naisabur yang kemudian pindah ke Ray (Yatim, 1997: 73-75; Fu'adi, 2011:199-200).

Mencapai kejayaan pada masa Sultan Maliksyah yang bergelar *The Just King* yang didampingi oleh perdana menteri yang cerdik pandai bernama Nizham Al-Mulk. Masa pemerintahan bani Saljuk sepeninggal Maliksyah secara bergantian dipimpin oleh Alp Arselan (1063-1070 M), Maliksyah (1072-1092M), Mahmud (1092-1094M), Barkiyaruq (1094-1103M), Maliksyah II (1103M), Abu Syuja' Muhammad (1103-1117M), dan Abu Haris Sanjar (1117-1128M) (Yatim, 1997: 74; Hassan, 1989: 246-247).

Hasil peradaban yang dicapai (Yatim, 1997: 74-80; Fu'adi, 2011: 202-203):

1). Dinasti-dinasti kecil yang pada masa kekuasaan bani Buwaihi melepaskan diri dari Bagdad, mereka kembali mengakui kedudukan Bagdad dan menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah.
2). Pada masa Alp Arselan, terjadi peristiwa penting yang disebut dengan *Manzikart* yaitu tentara Saljuk mengalahkan tentara romawi Bizantium pada tahun 1071M. Terlebih lagi ketika bani Saljuk berhasil menguasai Baitul Maqdis dari Bani Fatimiyah pada tahun 1077M dan membuat peraturan yang menyulitkan bagi umat Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Peristiwa ini yang menimbulkan benih kebencian orang Kristen kepada umat Islam yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perang salib yang terjadi dalam tiga periode.
3). Berhasil membuat Undang-undang untuk mengatur kemakmuran rakyat.
4). Berhasil mendirikan universitas Nizamiyah oleh perdana menteri Nizam al-Mulk pada masa khalifah Maliksyah dan sekolah Hanafiyah di Bagdad. Universitas Nizamiyah inilah yang dikemudian hari menjadi model bagi perguruan tinggi yang lain.
5). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendirikan observatorium, sehingga muncul cendekiawan Zamakhsari dan Al-Qusyairy dalam bidang tafsir, Al-Ghazali dalam bidang Tasawuf dan Umar Kayam dalam bidang Sastra.

    Membagi wilayah kekuasaan menjadi 5 wilayah propinsi dengan pimpinan bergelar Malik atau Syah. Wilayah propinsi tersebut adalah Saljuk Agung atau Saljuk Besar, Saljuk Kirman, Saljuk Irak dan Kurdistan, Saljuk Syiria dan Saljuk Rum.
6). Menerapkan kembali jabatan perdana menteri yang membawahi departemen-departemen yang pernah dihapus pada masa Bani

Buwaihi.
7). Membangun sarana dan prasarana kota yaitu masjid, jembatan, irigasi, jalan raya dan membuat benteng kota.

Faktor Penyebab Kemunduran (Yatim, 1997: 76; Hassan, 1989: 256-257; Fu'adi, 2011: 207-208):
1). Hilangnya persatuan umat Islam.
2). Terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga terutama setelah wafatnya Maliksyah dan perdana mentri Nizam al-Mulk.
3). Negara terpecah belah dan dinasti-dinasti kecil memerdekakan diri sehingga muncul *Atabecs States*.
4). Akibat dari peristiwa *manzikart*, Paus Urbanus II menyeru kepada umat Kristen untuk merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Bani Saljuk Islam, sehingga timbul perang salib yang berkepanjangan antara umat Islam melawan umat Kristen.
5). Terjadinya pemberontakan budak belian mamluk yang sudah menjadi *attabecs* atau penjaga putra sultan dan mengatas namakan putra sultan.
6). Serangan dari bangsa Mongol.

c. Dinasti Ayyubiyah (1171–1248M)

Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Shalahudin Al-Ayyubi, seorang panglima perang melawan umat Kristen pada perang salib. Shalahuddin al-Ayyubi mempunyai budi pekerti yang tinggi, terkenal dengan keberaniannya, hidupnya sangat sederhana (Yatim, 1997: 283-284; Hassan, 1989: 287-288). Pada pemerintahan Ayyubiyah ini memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan dinasti-dinasti yang lain yaitu selama kurun waktu pemerintahan Ayyubiyah dalam pemerintahannya digunakan untuk berjuang melawan orang salib dan bertujuan untuk mengusir orang-orang salib dari wilayah Syria dan Palestina. Sultan

Shalahuddin mendapat pengakuan dari khalifah Abbasiyah pada tahun 1175 M. Pada masa Ayyubiyah Baitul Maqdis dapat direbut oleh kaum Muslimin. Pemimpin bani Ayyubiyah secara berturut-turut adalah Shalahuddin al-Ayyubi (1171M), Adil saudara Shalahuddin al-Ayyubi (1199 M), Kamil (210-1328 M), Adil II (1238 M) dan Salih Ayyub (1240 -1249 M)(Hassan, 1989: 288-293)

Hasil peradaban masa Ayyubiyah (Yatim, 1997: 283; Hassan, 1989:285-287):

1). Mendirikan benteng Kairo dibukit Muqattam yang paling barat sebagai pusat pemerintah dan sebagai pertahanan militer dari serangan musuh.
2). Mendirikan tembok besar sebagai benteng pertahanan negeri.
3). Mendirikan lembaga pendidikan dan sekolahan.
4). Menggantikan Madzhab Syi'ah yang dipakai pada masa Fatimiyah menjadi madzhab Sunni.
5). Berkembangnya sistem irigasi dan tanggul-tanggul pertanian.
6). Membentuk persatuan kaum muslimin se Asia Barat untuk mengusir orang-orang Salib.
7). Munculnya jurnalis dan sastrawan yang masyhur, termasuk Syi'ir shalawat Badr.
8). Membuat perjanjian perdamaian dan berhenti perang (Verdrag) antara kaum muslimin dengan kaum salib pada tahun 1192 yang berisi bahwa Yerussalem tetap berada di tangan umat Islam dan umat Kristen diperbolehkan berziarah; Orang salib mempertahankan Syria; Umat Islam mengembalikan relics umat Kristen.

Dinasti ini tidak mampu menjaga wibawa kekuasaannya, sehingga otoritas kekuasaannya mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor penyebab keruntuhan dinasti Ayyubiyah:

1). Setelah wafatnya Shalahudin Al-Ayyubi, timbul perang saudara dalam keluarga istana sendiri.

2). Terjadinya perang salib yang terus-menerus tiada henti.
3). Serangan dari Bani Mamluk yang bekerjasama dengan tentara Salib. []

BAB VI

POTRET PERADABAN ISLAM MASA PERTENGAHAN

Pada pembahasan yang lalu, sudah disinggung tentang masa-masa sulit bagi kekuasaan Abbassiyah, akibat dari itu muncul dinasti-dinasti kecil untuk memperkokoh otoritasnya, dengan menyatakan diri menjadi daerah merdeka terpisah dengan Bagdad, atau menjadi daerah otonom tapi secara keagamaan para pemimpinnya masih mengakui keberadaan khalifah. Pola hubungan keagamaan ini ditandai dengan gelar pemimpinnya dan masih ada pembaiatan dari khalifah untuk para pemimpin yang akan memangku jabatan baru.

Mengingat jumlah daerah-daerah yang masih setia dengan Bagdad dan sudah memerdekaan diri, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan tanpa mengabaikan dinasti-dinasti lain yang sudah menyumbangkan terhadap perkembangan peradaban Islam, maka pembahasan pusat kekuasaan Islam ini pembahasan difokuskan pada tiga pusat kekuasaan Islam yaitu Dinasti Turki Usmani, dinasti Safawiyah Persia dan Mughal di India. Dinasti yang memberikan sumbangan terhadap kemajuan peradaban Islam, sudah tentu masing-masing akan dilihat kontribusinya dalam pengembangan peradaban Islam dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Dinasti Turki Usmani

Lemahnya dinasti Abbasiyah sebagai kekuatan sosial politik umat Islam berdampak pula dalam pengembangan peradaban Islam.

Keruntuhan pemerintahan Islam yang kekuasaannya berlangsung ratusan tahun ini, berkontribusi pada terpecah belahnya umat Islam. Meski riil politik dinasti Abbasiyah telah hancur sebagai simbol sebuah kekuasaan pemerintahan, pada kenyataannya kekuatan-kekuatan umat Islam tetap berupaya mempertahankan eksistensi politik Islam sebagai simbol peradaban. Kekuatan umat Islam dalam membangun peradaban Islam dibuktikan salah satunya oleh dinasti Usmaniyah, dari pusat kekuasaan Islam ini telah menghasilkan berbagai kemajuan.

Pusat kekuasaan Islam ini bermula dari gerakan kecil dari suku Oghuz yang selalu berpindah-pindah setelah dikejar-kejar dinasti Mughal. Setelah mereka menunjukkan kesetiaannya dan memberi jasa kepada dinasti Saljuk, maka kelompok ini mendapat perlindungan dari dinasti Saljuk dan mendapatkan daerah yang menjadi cikal bakal kekuasaannya yang dalam perkembangannya menjadi dinasti Usmaniyah yang diambil dari nama pemimpin yang kedua mereka. Usman merupakan pemimpin kedua menggantikan ayahnya yang bernama Ertrogrol bin sulaiman sejak masa pemerintahan Sultan Alaudin.

Hubungan baik Ertrogrol yang dilanjutkn oleh Usman dengan dinasti Saljuk, maka atas jasanya itu mereka mendapat hadiah sebuah wilayah untuk ditempati sebagai daerah kekuasaannya. Sepeninggal Sultan Alaudin dinasti Saljuk menjadi terpecah-pecah dan banyak yang memerdekakan diri. diantaranya adalah daerah kekuasaan Usman. Dengan adanya momentum itu menjadikan daulah Usmaniyah eksis sebagai negara dengan raja pertamanya Usman bin Erthogrol yang kemudian dikenal dengan nama Usman I (Yatim, 1997: 130).

Dinasti Usmaniyah masa pemerintahannya berlangsung cukup panjang yaitu berkuasa selama 642 tahun (1282-1924 M) yang ditandai dengan berdirinya negara Republik Turki (Yatim, 1997: 166). Selama berkuasa, dinasti ini mengalami dinamika kemajuan dan kemunduran baik yang disebabkan oleh faktor intern dinasti maupun faktor

ekstern. Dari sisi internal tradisi dinasti sedikit mengabaikan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas para penerusnya, maka menjadi wajar kalau kemudian dinasti ini satu waktu mengalami kemajuan tapi pada kurun waktu tertentu mengalami kemunduran.

Tinta emas peradaban Islam telah digoreskan oleh para pemimpin-pemimpin yang dikenal kuat dan bijaksana setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad II yang kemudian menjadi pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi pusat pengembangan peradaban Islam. Dibangun berbagai sarana umat Islam, seperti sekolahan, rumah sakit, masjid dan bangunan megah lainnya. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama diajarkan di sekolah-sekolah tanpa dikotomis antara keduanya. Sekolah-sekolah mengajarkan tata bahasa Arab, teologi, geometri, retorika dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga ilmu agama mengalami kemajuan yang ditandai banyaknya gerakan-gerakan keagamaan. Bahkan dinasti ini telah mengklaim sebagai khalifah yang telah mewarisi kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, meski praktiknya penguasa ini hanya sebagai sultan (Maryam, 2009: 135, Nashr, 2003: 150-151).

Dinasti Usmani sebagai penguasa Islam yang berdirinya didahului oleh dinasti-dinasti Islam sebelumnya, tentu keberadaannya dipengaruhi penguasa-penguasa sebelumnya. Pada kenyataannya dinasti ini tidak hanya didominasi pengaruh peradaban tertentu, melainkan banyak perpaduan dari peradaban lain. Dalam tata pemerintahan dan kemiliteran pengaruh Bizantium sangat menyolok. Pada aspek peradaban dan tata karma Usmaniyah condong ke budaya Persia, sedang untuk pengembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosial kemasyarakatan budaya Arab pengaruhnya menjadi sangat kuat. Kondisi perkembangan sosial politik, peradaban, keagamaan seperti ini memiliki relevansi dengan pengakuan para sultan yang menyatakan sebagai pewaris dari Umayyah dan Abbasiyah.

Usmaniyah dalam sejarah kekuasaan dinasti Islam tergolong besar dan memiliki waktu yang cukup panjang. Tentu saja banyak hasil

yang dicapai dalam bidang peradaban Islam. Meski harus diakui juga, dalam kurun waktu yang cukup panjang dengan keragaman jumlah penguasanya dari waktu ke waktu, tidak semua mereka menghasilkan peradaban Islam, karena mereka menduduki tahta tidak didasarkan pada kemampuan dan kualitas melainkan secara keturunan penguasa sebelumnya. Oleh karena itu, capaian kemajuan peradabannya-pun pada masa pemerintahan Usmani kondisinya juga beragam, kesemuanya berada di tangan para sultan Usmani itu sendiri.

Harus diakui kehebatan dinasti Usmaniah, bahwa dinasti ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kekuasaannya dibangun dari sebuah suku yang nomaden. Mengingat memiliki mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain, dari tekanan ke tekanan, maka peradaban nya dipengaruhi dari berbagai peradaban sebagai sebuah hasil asimilasi dan interaksi dari sebuah bangsa Persia, Bizantium dan Arab. Perpaduan peradaban tersebut merupakan konsekuensi logis dari cepat dan luasnya kekuasaan dinasti Usmani.

Pada bidang kemiliteran dan pemerintahan, dinasti ini dikenal kuat dan tangguh sehingga memiliki daya ekspansinya, kekuasaan sangat luas dan panjang. Sikap keberanian dan kesigapan angkatan perang yang diorganisasi secara teratur dengan memakai sistem rekruetmen dan pelatihan kemiliteran. Usmaniah memiliki angkatan laut yang kuat dan memudahkan jalan untuk ekspansi ke berbagai negara. Dengan kekuatan angkatan perang yang dimiliki Usmaniah tersebut, maka roda pemerintahan berjalan stabil. Dalam urusan pemerintahan negara, sultan sebagai penguasa tertinggi selalu bertindak tegas yang dibantu oleh para perdana menteri (shadr al-a'zham) yang membawahi gubernur. Kekuatan Turki Usmani mencapai puncak pada periode kedua yang berlangsung satu setengah abad dengan enam sultan dengan peristiwa monumental jatuhnya Konstantinopel diubah menjadi Istambul.

Dinasti Turki Usmani menempatkan bidang keagamaan pada posisi strategis. Para penguasannya memiliki keterikatan dengan agama, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ulama menempati posisi penting dan memiliki peran besar dalam dinasti. Bukan itu saja, kehidupan keagamaan juga berkembang termasuk tumbuhnya tarekat yang banyak diikuti kalangan pejabat pemerintah. Bahkan seringkali fatwa ulama menjadi rujukan dalam menjawab problematika masyarakat (Yatim, 1997: 134-137, Malik Sy , 2005: 152-155).

Dalam lingkungan dinasti Usmani, seni berkembang terutama untuk jenis seni syair-syair istana tentang pujian dan cinta sebagai paduan dari peradaban Arab dan Persia. Bentuk kesenian yang berkembang di lingkungan istana adalah qasidah, ghazal, maznawi, sehingga pada masa ini dikenal ada pujangga bernama Baki (1526-1600), masih ada nama lainnya seperti Nefi, Satire dan Yahya Effendi. Dimana Effendi sudah mengembangkan model syair yang didasarkan pada subyek matter (tema) yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap kehidupan alam dan mengekspresikan perasaan (emosi) seseorang. Penulisan sejarah tentang asal-usul dinasti Usmani dalam meraih kekuasaan.

Buku sejarah karya Mustofa Ali (1541-1599) berjudul Kunh al-Akhbar memuat sejarah yang juga menonjol kebangkitan kekuatan Usmani. Pengembangan keilmuan dirintis dengan pendirian sekolah Madrasah Usmani dengan cara mendatangkan para ulama Iran dan Mesir untuk mengajarkan ilmu, tradisi system promosi ulama sudah dimulai. Dikenal juga sistem penjenjangan dalam sekolahan dengan sistem dirangking, misalnya madrasah paling rendah mengejarkan Nahwu dan sharaf, teologi, geometrid dan retorika (Maryam, 2009: 135-137).

Pada akhir kekuasaan dinasti Usmani, kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi tidak stabil, dan justru semakin melemah yang akhirnya mengalami kehancuran pada tahun 1924 M. Ada beberapa catatan sejarah penyebab kemunduran kekuasaan dinasti ini antara lain:

Pertama, wilayah kekuasaannya yang sangat luas, sehingga administrasi pemerintahan menjadi sangat rumit dan komplek. Sementara administrasi pemerintahan tidak beres dan adanya ambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terlibat perang yang berkepanjangan.

Kedua, heteroginitas penduduk dengan jumlahnya yang besar sebagai konsekuensi kekuasaan yang amat luas. Pengelolaan pendudukan yang heterogen baik secara agama, kultur maupun etnis, diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Dengan kondisi pemerintahan yang ada, ternyata heterogenitas hanya menjadi beban dan tidak jarang justru menimbulkan pemberontakan dan peperangan.

Ketiga, kelemahan para penguasa karena memang sepeninggal Sulaiman al-Qanuni faktanya Turki Usmani diperintah oleh sultan yang lemah akibatnya pemerintahan menjadi kacau dan tidak pernah dapat diatasi oleh penguasa yang lemah.

Keempat, budaya pungli terjadi dimana-mana bahkan membayar untuk menduduki jabatan pmerintahan bisa terjadi kepada pejabat yang berwenang. Dampaknya adalah lahirnya dekadensi moral di lingkungan istana dan masyarakat.

Kelima, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara, padahal tentara ini yang terlibat juga dalam perluasan wilayah. Kondisi ini turut serta melemahkan kekuasaan sultan.

Keenam, merosotnya ekonomi yang diakibatkan perang yang terus menerus. Padahal pendapatan semakin berkurang dan kebutuhan belanja termasuk belanja untuk perang kian meningkat, akibatnya kondisi ekonomi negara menjadi lemah.

Ketujuh, pengambilan skala prioritas negara yang nampak stagnan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara lebih mengedepankan pengembangan kemiliteran yang tidak diimbangi dengan teknologinya, sehingga persenjataannya kalah dengan teknologi

yang dikembangkan negara-negara eropa. Dengan kondisi yang demikian lemah, maka penjajahan terjadi di wialayah kekuasaan Usmani (Yatim, 1997: 163-168).

Dengan beberapa titik kelemahan yang dimiliki Turki Usmani tersebut, sudah tentu mengakibatkan sulitnya dinasti ini bangkit dari keterpurukannya. Namun demikian, sejumlah peradaban Islam banyak lahir pada masa ini, misalnya tentang arsitektur berkembang, istana-istana megah dibangun, rumah sakit, panti asuhan dan pusat-pusat terekat. Sekolah-sekolah "madrasah" didirikan pada masa Usmani ulama-ulama didatangkan untuk mengajar agama. Berbagai ilmu "nahwu, mantiq, teologi, astronomi, geometri dan retorika" diajarkan di sekolah Usmani (Yatim, 1997: 131-138).

Tinta emas kejayaan peradaban Islam terjadi seiring dengan naiknya para sultan yang berkualitas dan peduli terhadap kemajuan peradaban. Kondisi majunya peradaban Islam tidak bisa bertahan sejalan dengan pasang surut kemauan penguasanya. Selain itu, karena terlalu lama pemerintahan dinasti Usmani dilanda berbagai persoalan internal (pemberontakan) yang tidak bisa segera diatasi karena faktor luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya penguasa Usmani. Kemudian adanya faktor eksternal yaitu munculnya kekuataan perlawanan dalam bentuk penjajahan yang mengakibatkan semakin lemah dan akhirnya mengalami kehancuran.

B. Dinasti Safawiyah di Persia

Dinasti Safawiyah pada awalnya bukan gerakan politik, melainkan sebuah gerakan keagamaan yaitu gerakan tarekat atau sufi yang dipimpin oleh Syekh Ishak Safiuddin. Awal mula gerakan ini adalah dirintis untuk memerangi kaum bid'ah, kemudian bertambah banyak anggotanya dan menyebar ke sejumlah daerah, seperti Persia, Antolia dan Syiria. Berkaitan dengan keanggotaan yang semakin banyak dan menyebar di

sejumlah daerah, maka pemimpin gerakan ini dalam usaha mengontrol kondisi anggotanya dengan mengangkat wakil di daerah dengan gelar khalifah.

Pada waktu dinasti Turki Usmani sudah mencapai puncak kejayaan, sementara dinasti Safawi di Persia masih baru berdiri. Namun pada kenyataannya, dinasti ini dapat berkembang dengan cepat. Nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Safawiyah menjadi gerakan politik dan menjadi sebuah dinasti yang disebut dinasti Safawi. Dalam perkembangannya, dinasti Safawi sering berselisih dengan dinasti Turki Usmani. Perspektif politis barangkali terjadinya konflik antar simbol kekuasaan sudah menjadi kewajaran. Terlebih lagi dua dinasti ini sama-sama lahir dari sebuah kebijakan politik otonomi Abbasiyah.

Dalam memasuki masa transisi dari gerakan keagamaan ke politik memang perkembangannya sangat nampak, setelah ada pergantian kepemimpinan dari Safiuddin kepada putranya Junaid. Kepeduliaan gerakan sosial keagamaan ini kemudian tertarik ke bidang politik, sehingga mendapat tanggapan pro dan kontra. Akibatnya Junaid harus mendapat perlawanan politik kekuasaan dan dia harus hidup di pengasingan. Ketika hidup di pengasingan inilah Junaid leluasa mengajarkan tarekat dan memperkuat gerakan politiknya. Gerakannya terus mendapat perlawanan dan akhirnya Junaid terbunuh. Kedudukan Junaid kemudian digantikan putranya Haidar (Yatim, 1997: 139-140).

Ketika gerakan sosial keagamaan bergeser ke politik ini menjadi kuat berada di tangan Haidar, dan kemudian sepak terjang dinasti Safawiyah terus berkembang, terutama setelah Haidar berhasil mengalahkan AK Koyunlu. Setelah berhasil mengalahkan Koyunlu tersebut nama Haidar semakin berkibar dalam gerakan tarekat dan politik. Perseteruan politik antara Safawiyah dan Kayunlu tidak terhenti pada fakta kekalahannya dengan Haidar. Dendam Kayunlu untuk membalas kekalahannya diwujudkan kembali setelah ada permusuhan antara Sirwan dengan

gerakan Safawiyah. Ketika terjadi peperangan antara Sirwan dan gerakan Safawiyah AK Kayunlu ikut mengambil bagian dengan membantu Sirwan, sehingga gerakan Safawiyah dapat dikalahkan dan Haidar-pun terbunuh. Haidar sebelum meninggal dalam peperangan sudah dikaruniai tiga anak yaitu Ali, Ismail dan Ibrahim yang kemudian meneruskan gerakan Safawiyah (Yatim, 1997:140).

Kecenderungan politik Safawiyah tidak terhenti meski pemimpinnya Haidar sudah terbunuh. Kepemimpinan Safawiyah dilanjutkan putra pertamanya yaitu Ali. Kepemimpinan Ali tidak berlangsung lama, kemudian digantikan adiknya Ismail. Di tangan Ismail inilah gerakan Safawiyah kembali eksis, dengan segala kekuatan dan keberhasilannya dalam membangun gerakan Safawiyah, maka keberadaan Ismail dicatat sebagai pendiri gerakan Safawiyah dengan kebijakan politiknya menjadikan Syiah sebagai Madzhab resmi Safawiyah dan mendeklarasikan negara Safawiyah sebagai bentuk negara teokrasi. Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun antara 1501-1524 M. Di tangannya kekuasaan Safawiyah berkembang dan semakin luas wilayahnya (Yatim, 1997: 141).

Dalam perjalanan pemerintahan Ismail I, Sawafiyah meneguhkan faham Syi'ah sebagai paham resmi Safawiyah sehingga sering mendapat pertentangan dari ulama Sunni dan penegakan faham Syi'ah ini tidak segan-segan dengan cara kekerasan untuk menghadapi bagi yang tidak sepaham. Kekuasaan politiknya amat luas, sehingga harus bergesekan dengan kekuasaan Turki Usmani dalam menjalankan pemerintahannya yang akhirnya Ismail I mengalami kekalahan.

Kekalahan akibat perang dengan Turki Usmani ini membuat Isma'il I frustasi. Ia lebih senang menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura dan suka berburu. Keadaan itu berdampak negatif bagi dinasti Safawi dan pada akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pengaruh untuk dapat memimpin dinasti Safawi antara suku-suku Turki, pejabat keturunan Persia dan Qizibash. Sepeninggal Ismail I, Sawafiyah dipimpin

oleh penguasa yag lemah pada masa pemerintahan Tahmasp I (1524-1576 M), Ismail II (1576-1577 M) dan Muhammad Khudabanda (1577-1567M). Pada masa tiga raja tersebut dinasti Safawi mengalami kelemahan (Yatim, 1997:142).

Kepemimpinan Safawiyah dilanjutkan anak keturunan secara bergantian. Penguasa Safawiyah yang tecatat maju adalah pada masa kepemimpinan Abbas I ((Yatim, 1997: 142), karena hampir semua konflik internal dan konflik eksternal dengan raja-raja di luar Safawiyah dapat diselesaikan. Disamping Abbas I (1588-1828) berhasil membuat stabilitas negara Safawiyah, kondisi politik yang diciptakan menjadi kondusif untuk pengembangan perekonomian dan keilmuan.

Pengembangan di bidang perekonomian, masa pemerintahan Abas I dapat terlihat mengalami kemajuan. di bidang industri permadani dan sutra berkembang pesat. Kemudian bidang pertanian juga mengalami kemajuan terutama di kawasan Bulan Sabit Subur, sehingga negara Safawiyah mengalami kemajuan dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Dengan melihat kondisi obyektif kemajuan yang terjadi, maka masa kepemimpinan Abbas I ini dikategorikan sebagai masa kejayaan dan kemajuan (Yatim, 1997: 143-145).

Kondisi sosial politik yang kondusif ditopang dengan kemajuan dibidang perekonomian membuat kekuasaan Abbas I menjadi semakin mantap untuk pengembangan dibidang peradaban Islam. Pada masa Abbas I berkembang berbagai ilmu mulai dari filsafat, sejarah hingga ilmu teologi dan kesenian. Ada nama Bahauddin al-Syaerozi tokoh filsafat, Sadarudin al-Syaerozi bidang sejarah, dan dibidang teologi ada nama Muhammad al-Baqir Ibnu Muhammad Damad. Sedang dalam bidang kesenian kemajuan Abbas I dapat dilacak dari arsitektur pembangunan masjid, sekolahan, rumah sakit dan istana dinasti yang terkenal Chibil Sutun.

Kemajuan negara Safawiyah sepeninggal Abbas I tidak bisa bertahan apalagi mengembangkan peradaban Islam, bahkan cenderung

mengalami kemunduruan dari penguasa satu ke penguasa lainnya. Menurut catatan sejarah menurunnya kemajuan Safawiyah ini dikarenakan para pemimpinnya tidak memiliki kecakapan, sangat lemah dibidang keimanan dan lemah dibidang keilmuan. Dengan kelemahan para pemimpin Safawiyah tersebut mengakibatkan munculnya gerakan sparatis dan pemberontakan, sehingga menjadikan Safawiyah menjadi semakin terpuruk dan akhirnya sampai kejatuhannya.

Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi (Yatim, 1997: 158) adalah:

1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan dinasti Usmani. Setidaknya ada dua argumentasi mengapa Safawiyah bermusuhan dengan Turki Usmani:

   Pertama, berdirinya dinasti Safawi yang bermadzhab Syi'ah merupakan ancaman bagi dinasti Usmani yang bermadzhab sunni asy'ariyah.

   Kedua, perebutan wilayah kekuasan antara Turki Usmani dengan dinasti Safawi.
2. Terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin dinasti Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran dinasti ini.
3. Pasukan Ghulam (budak-budak) yang dibentuk Abbas l ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi.
4. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan dikalangan keluarga istana.

Selain hal tersebut munculnya beberapa kalangan Ulama Syiah tidak lagi mau mengakui bahwa Safawiyah telah mewakili pemerintahan sang imam, menjadikan dinasti ini menurun kekuatannya. Dengan tampilnya ulama yang mulai meragukan otoritas sah yang berlangsung secara turun temurun. Kondisi itu diperparah dengan keyakinan bahwa semenjak masa keghaiban besar, maka mujtahid menduduki otoritas

keagamaan yang tertinggi.

Kehancuran rezim ini juga di sebabkan sejumlah perubahan yang luar biasa dalam hal hubungan negara dan agama. Safawiyah semula merupakan sebuah gerakan, tetapi setelah berkuasa rezim ini cenderung jauh dari akar perjuangan awal. Demikianlah, rezim safawiyah telah meninggalkan warisan kepada Iran modern berupa tradisi Persia perihal sistem dinasti yang agung, yakni sebuah rezim yang dibangun berdasarkan kekuatan unsur-unsur kesukuan yang utama, dan mewariskan sebuah kewenangan keagamaan syiah yang kohesif, monolitik dan mandiri.

Kejayaan Safawiyah terus merosot kekuatannya terlebih setelah pucuk pimpinannya dipegang oleh penguasa yang lemah secara keilmuan dan keimanan. Dari kelemahan ini kemudian berimbas pada menurunnya otoritas secara politis, maka tidak heran kemudian mendorong lahirnya pemberontakan-pemberontakan yang kemudian menempatkan Safawiyah berada pada posisi sulit dan akhirnya harus berakhir kekuasaannya.

C. Dinasti Mughal di India

Dinasti Mughal memiliki latar belakang unik, karena bangsa Mughal dikenal sebagai bangsa yang nomaden dari daerah satu ke daerah lain. Disamping itu, bangsa Mughal dikenal sangat memusuhi dan merusak peradaban Islam. Namun demikian, sejak India ditaklukkan dinasti Umayyah (1020 M) penduduknya yang muslim mulai mendirikan dinasti-dinasti kecil yang dalam perkembangannya menjadi cikal bakal dinasti Mughal.

Pemerintahan dinasti ini dipusatkan di kota Delhi dengan tokoh utamanya Zhahirudin Babur dari keturunan Timurlenk. Dalam sejarah Mughal, Babur memiliki ambisi menguasai kota Samarkhand, namun usahanya tersebut gagal hingga dia harus melakukan penaklukkan yang kedua kalinya dengan bantuan dari negara Safawiyah pada masa raja

Ismail I. Penguasa Delhi waktu itu adalah Ibrahim Lodi, maka dengan kemenangan Zhahirudin Babur inilah dinasti Islam Mughal resmi berdiri dengan raja pertamanya Zhahirudin barbur pada 1482-1530 (Malik Sy, 2005: 164-165).

Setelah Zhahirudin Babur meninggal dunia, maka kekuasaan dilanjutkan oleh putra mahkota Humayun. Pada awal pemerintahannya, Humayun harus menghadapi persoalan gerakan sparatis yang mengancam eksistensi dinasti Islam Mughal yang dilakukan oleh Bahadur Syah penguasa Gujarat yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Delhi. Kemudian Humayun juga harus menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Sher Khan yang menyebabkan Humayun harus melarikan diri ke Persia.

Humayun dalam pengasingan masih tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya, sehingga dia tetap berusaha merebut kembali kekuasaannya. Pada tahun 1555 Humayun mampu merebut kembali kekuasaan Mughal di Delhi dan berhasil mengalahkan Khan Syah. Masa kekuasaan dinasti Mughal berlangsung selama 332 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, sejumlah tinta emas dalam bidang peradaban Islam berhasil ditorehkan oleh tangan para raja Mughal.

Sepeninggal Humayun dinasti Mughal dilanjutkan oleh putranya bernama Akbar yang pada saat itu baru berusia 14 tahun, meski baru berusia sangat muda namun Akbar dikenal memiliki kemampuan dalam pemerintahan. Akbar membuktikan itu dengan kebijakan toleransi (salakhul) dimana Akbar menempatkan seluruh warga negara memiliki posisi yang sama. Disamping itu, kemampuan Akbar sangat menonjol dalam bidang kemiliteran, dia menerapkan jenjang kepangkatan dalam pemerintahan.

Kemajuan peradaban Islam pada masa Akbar dan sultan penggantinya yang menonjol adalah bidang seni dan arsitektur dalam

desain masjid, perpustakaan dan sekolahan. Monumental peradaban Islam dinasti Mughal adalah ditandai dengan keberhasilannya membangun Tajmahal sebagai simbol kejayaan Mughal. Keberhasilan lain dinasti Islam Mughal dalam bidang peradaban Islam adalah dalam bentuk pembangunan masjid Badahsahi di Lahore. Hasil pembangunan peradaban Islam tersebut, hingga kini bisa dinikmati dan disaksikan oleh dunia (Maryam, 2003: 215-217).

Kemajuan ekonomi dan stabilitas politik mendorong pula kemajuan dibidang seni dan budaya, dimana munculnya karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Ada nama penyair terkenal yaitu Malik Muhammad Jayazi seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar Padmavat. Pada masa pemerintahan Aurangzep muncul sejarawan bernama Abu fadl yang berhasil menulis sejarah dinasti Mughal berdasarkan figur pemimpinnya.

Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syi'ah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Jullandur tahun 1561 M. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik (Yatim, 1997: 149).

Kepemimpinan Akbar dilanjutkan oleh Jihangir (1605-1627) yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jihangir berhasil menundukkan Bengala (1612 M), Mewar (1614 M) Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan

mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar.

Dinasti Mughal dengan kemampuan pemimpinnya yang beragama, membawa pada kondisinya menjadi tidak stabil dan harus mengalami kemajuan dan kemunduran dalam pengembangan peradaban Islam. Uraian yang sudah menggambarkan tingkat kemajuan dinasti Mughal tersebut, pada perkembangannya ternyata tidak bisa dipertahankan oleh penguasa-penguasa baru. oleh karena itu, dinasti ini kemudian mengalami kemunduran.

Kemunduran dinasti Mughal dimulai dari adanya perebutan kekuasaan akibat tidak tuntasnya sistem suksesi antara keturunan Bahadur Syah dengan Muhammad Fahrukhsiyar yang berakibat terjadinya perang saudara. Konflik yang berkepanjangan ini berdampak pada lemahnya pemerintahan, sehingga disusul kemudian banyaknya tuntutan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Kekuatan eksternal yang ikut melemahkan dinasti adalah permusuhan dengan Inggris 1885 M disaat Mughal sudah tidak memiliki kekuatan, bahkan raja terakhir Mughal Bahadur Syah diusir dari istana. Peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Mughal (Malik Sy, 2005: 169-170).

Rentetan peristiwa panjang yang menunjukkan naik dan turunnya kemajuan peradaban Islam dalam lingkungan kekuasaan dinasti Islam, tentunya menjadi proses pembelajaran yang sangat berarti. *Pertama,* sistem penggantian kepemimpinan secara turun temurun yang didasarkan atas pengangkatan putra mahkota di internal dinasti, tidak menjamin bagi kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Dalam catatan sejarah yang sudah dipaparkan, ketika kebaikan dan kualitas serta kemampuan ada pada putra mahkota, maka kontribusi negara kepada kemajuan peradaban Islam menjadi sangat tinggi. Namun tidak sedikit pula, karena tidak adanya kebaikan, kualitas iman dan keilmuan serta kemampuan menjerumuskan dinasti itu sendiri dalam lubang kehancurannya. *Kedua*, aliansi srategis sebagai sebuah negara menjadi

sebuah keharusan, dan menghindari adanya subordinasi kekuatan dari luar dinasti yang berdampak buruk, sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh penguasa. Karena apapun argumentasinya, campur tangan asing dalam sebuah dinasti hanya akan menambah persoalan baru, yang akan sulit diurai, terlebih lagi kalau sebuah ketergantungan sudah diciptakan pemerintah asing dalam kekuasaan dinasti atau kekuasaan Islam. Disini mengisyaratkan betapa pentingnya analisis kesejarahan, yang hasilnya dijadikan sebagai kerangka membangun kesadaran baru dalam menegakkan dan memajukan peradaban Islam.

Sebagai akhir pembahasan ini, paparan kesejarahan ini alur penyajian menyangkut para penguasa tidak dikaji satu persatu secara berurutan, maka untuk melengkapi pembahasan, maka pada bagian ini dipaparkan Raja-raja dinasti Mughal yang memerintah dari pertama hingga penguasa terakhir. Adalah Zahiruddin Babur (1526-1530), Humayun (1530-1556), Akbar (1556-1605), Jihangir (1605-1627), Shah Jihan (1627-1658), Aurangzeb (1658-1707), Bahadur Syah (1707-1712), Jehandar (1712-1713), Fahrukhsiyar (1713-1719), Muhammad Syah (1719-1748), Ahmad Syah (1748-1754), Alamghir II (1754-1760), Syah Alam (1760¬-1806), Akbar II (1806-1837 M), dan Bahadur Syah (1837-1858). []

BAB VII
RELASI AGAMA DAN BUDAYA

Agama dalam bentuknya yang sangat sederhana di masyarakat, sudah mengandaikan adanya dzat yang agung, dzat yang memiliki kekuatan, dan bisa memberi pertolongan kepada manusia disaat manusia berada dalam kesulitan. Pemikiran sederhana tentang kekuatan di luar diri manusia ini, kemudian disistematisasikan dalam kepercayaan kepada benda-benda keramat, azimat, rah nenek moyang, para dewa, dan terus mengalami penyempurnaan akhirnya kepada Tuhan. Perkembangan keyakinan masyarakat dari yang sederhana sampai ke titik sempurna, penguatan kepercayaan atau keyakinan secara evolusioner inilah yang menghantarkan manusia berhasil melewati dari "polytheistik" dalam kepercayaan, menjadi "monotheistik" mempercayai atau mengimani kepada Allah. Setelah manusia bertauhid, maka kepercayaan manusia dituntun dengan benar, dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Penolong dan Maha Pengasih kepada semua makhluk-Nya.

Mengkaji tauhid pada dataran substansi, langkah, dan teknisnya sampai pada pengendapan informasi menjadi sebuah kepercayaan hakiki kepada keagungan Ilahi, memang tidak bisa dilepaskan dari multi efek dari ayat-ayat Allah yang mengajarkan tentang tauhid. Proses pentauhidan ini, mengharuskan kita untuk melakukan penggambaran sampai seseorang bisa menemukan hakikat tauhid dalam ranah kehidupan substantif, dari yang serba materiil ke wilayah yang sifatnya immateriil. Pokok persoalan iman inilah yang diburu banyak orang, melakukan pembongkaran wacana keilmuan hingga mensistematisirnya

menjadi ilmu kalam, tasawuf, dan kebudayaan.

Perjalanan spiritual nabi Ibrahim, merupakan keniscayaan bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, tatkala manusia itu menempatkan kesungguhan dalam melakukan pencarian kebenaran. Mendobrak tradisi kejumudan dan kejahiliyaan sebagai lambang "hidup serba musyrik" dialihkan ke tatanan kehidupan "tauhid", tentu bukan perkara mudah dan ringan bagi para pendakwah. Perjuangan nabi Ibrahim dalam mencari kebenaran atas ajaran Tuhan, harus melewati masa sulitnya samapi bisa menemukan jati dirinya, sehingga berhasil menemukan tauhid sejati. Ibrahim mampu menyingkirkan dari yang serba materialistik ke hal-hal yang spiritual, sebagaimana tergambar dalam perjalanannya pada surat Al-An'am ayat 74-79 sebagai berikut:

> "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata" (74). Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin (75). Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku," maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam (76)." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, "Sungguh jika Tuhaku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat (77)." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata "Inilah Tuhanku, dia lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, berkata "Wahai kaumku! Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Aku hadapakan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku adalah bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."

Kebenaran pokok aqidah dalam dramatisasi perjalanan nabi Ibrahim ini, menjadi pelajaran penting betapa orang-orang yang beriman itu harus benar-benar memegangi ketauhidannya dan meninggalkan kemusyrikan dengan selalu berpedoman pada ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an (qauliyah) dan ayat-ayat Allah berupa jagad raya sebagai ciptaannya (kauniyah). Manusia dengan melalui dua ayat Allah (qauliyah dan kauniyah) tersebut, cukup untuk memperkuat tauhid dan imannya atas kebesaran Allah. Proses dialogis ayat-ayat Allah inilah membat manusia menjadi kreatif dan dinamis, sekaligus mampu melahirkan sebuah kebudayaan yang tidak tercabut dari akar tauhidnya.

Sosok nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam Al-Quran, kemudian disampaikan kembali oleh nabi Muhammad untuk umatnya dengan maksud supaya umatnya tidak terjebak pada tindakan-tindakan kemusyrikan di kemudian hari, adalah langkah strategis dakwah nabi Muhammad mengajak semua umat manusia beragama secara benar, bertauhid yang bersih dari kemusyrikan dan unsur-unsurnya. Setelah manusia memiliki perspektif serba tauhid, maka praktik-praktik kemusyrikan, mulai dari cara berpikir musrik, berkeyakinan musyrik, sampai dengan praktik penyembahan musyrik, sudah pasti harus ditolak. Semuanya harus diluruskan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata, dan bisa menjalani hidup dengan tuntutan agama yang lurus dan benar.

Simbolisasi datangnya gelap malam, ketika berhentinya dinamika manusia dengan kemunculan sebuah bintang dan rembulan, lalu dimunculkan hari yang diwarnai hiruk pikuknya dunia dengan terbitnya matahari, semua menjadi tanda ada dan tiada. Benda-benda itu adalah ciptaan, menjadi tanda kebesaran Allah dan menjadi penuntun manusia mengimani kebesaran Allah. Oleh karena itu, kalau manusia terjebak pada materialistik “alam kasunyatan” maka seluruh indra manusia akan gagal memahami makna ketauhidan yang ada di depan matanya sendiri.

Begitu pula dalam hal kebudayaan yang jauh dari tauhid, kebudayaan itu akhirnya juga akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri.

Pengalaman nabi Ibrahim menjadi kesejatian yang bisa dijadikan rujukan dalam bertauhid, sehingga sampai pada sebuah keyakinan dan pengakuan akan keagungan dan ke-Esaan Allah. Manusia dikaruniai akal (berpikir), dilengkapi dengan nafsu yang mendorong manusia memiliki (keinginan), dan hati yang bisa memiliki (merasakan) atas segala sesuatu kebenaran dan kebathilan. Manusia dengan kemampuan akal pikiran, dorongan nafsu dan hati sebagai pengarah lahirnya budi pekerti yang dilengkapi dengan bimbingan wahyu, sehingga bisa memiliki pilihan kebenaran secara nyata. Produk berpikir manusia yang menjelma dalam kebudayaan harus mampu menjaga kemurnian tauhid, sehingga manusia tidak terjebak pada iman yang semu "nampaknya orang beriman tapi pikiran dan perilakunya diselimuti kemusyrikan".

A. Prinsip Tauhid sebagai Basis Relasi

Dalam sejarah perjalanan manusia yang diwarnai serba kontradiktif pada proses spiritual dan budayanya, membuat mereka benar-benar dilematis antara "yakin dan tidak yakin", padahal sebagai manusia keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan peran Tuhan. Namun realitasnya, kebutuhan manusia akan peran Tuhan dalam kehidupannya menjadi beragam dari sisi implementasi, ada yang benar-benar menjaga tapi tidak sedikit yang mengabaikannya. Orang bisa berbuat apa saja tanpa terkendali. Sifat abai terhadap ketauhidan ini bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Manusia ada yang tetap menjaga keimnanannya "mukmin" tapi ada manusia yang lalai terhadap ketauhidan "musyrik". Bagi orang yang mampu menunaikan kewajiban dan melaksanakan ajaran agama dengan sempurna, itu artinya seorang muslim yang terjaga shalat dan puasanya, terjaga zakat dan hajinya, karena memang mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk

menyempurnakannya.

Cara bertauhid secara benar menurut Islam sudah digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 56: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku sangat luas, maka sembahlah aku saja." Ayat ini memberi pelajaran bahwa bertauhid itu urusan hati "keyakinan" dengan segala kesungguhannya dari seorang hamba kepada yang Maha Kuasa dan yang berhak disembah. Oleh karena itu, Allah menandaskan kembali prinsip tauhid dalam surat Al-Hasr ayat 18, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tauhid menurut Islam sebagaimana di tegaskan Allah dalam Al-Qur'an tersebut, maka tauhid memiliki relevansi dengan pengakuan, penyembahan, ketaqwaan dan ketawakalan kepada Allah. Apa yang dikerjakan setiap makhluk tidak luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Tindakan apapun dari seorang hamba yang melebihi kewenangan Allah, mereka tidak bisa lepas dari pengawasan-Nya, maka sungguh sangat membahayakan ketauhidan mereka, karena keyakinan mereka diselimuti kesombongan, keangkuhan, dan merasa benar sendiri, menjadikan mereka sulit keluar dari kubangan kesesatan yang menjerumuskan.

Prinsip dasar ini menjadi penting sebagai argumentasi ketika Islam yang sosiologis harus membangun relasi dengan kebudayaan. Persoalan tauhid menjadi kerangka ukur dari sebuah proses ketika manusia mereproduksi sosial dan budaya. Kisah Luqman ketika menanamkan tauhid kepada anaknya, menjadi lembar pembuka bagimana tauhid itu harus disampaikan kepada manusia sejak usia dini. Kata-kata "Wahai anakku, janganlah musyrik kepada Allah" dari seorang Lukman kepada anaknya menjadi proses pembelajaran penting bahwa penanaman

tauhid memerlukan sentuhan humanis bukan ideologi yang keras dan menakutkan.

Penanaman ketauhidan dengan penuh kasih sayang, menjadikan eksistensi Tuhan, bisa terpatri dalam sanubari hamba-Nya. Harus disadari, proses ketauhidan memerlukan sebuah proses panjang dan mendalam dengan warna pengalaman spiritual masing-masing secara perlahan akan sampai kepada bangunan tauhid yang kuat. Ketika mata melihat berbagai keagungan Tuhan, telinga mendengar cerita-cerita tentang keimanan, dan qalbu menghayati desiran tauhid, maka yang terjadi adalah getaran jiwa-jiwa yang sejuk dan tenang dengan sebuah ketundukan dan kepatuhan akan keberadaan Tuhan yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang.

Kesadaran atas keyakinan yang dibangun dengan pondasi kasih sayang sebagai wujud pancaran Kasih Sayang Allah, akan melahirkan perilaku santun sebagai wujud hamba-hamba yang diselimuti kasih sayang-Nya. Sifat menghargai tahapan dan kadar kemampuan bertauhid seseorang, bukan perkara mudah dalam alam pluralisme kebudayaan ketika bersentuhan dengan modernisasi dan liberalisasi sosial keagamaan. Kesesatan tauhid sangat mudah terjadi pada siapa saja. Orang yang membanggakan diri atas pemikirannya yang jauh dari kemampuan keilmuan, berpeluang menggelincirkan tauhid seseorang.

Padahal kalau bicara soal tauhid, Allah dengan segala hak-hak-Nya secara jelas tegas menandaskan yang terdapat dalam surat Yunus (105); *Dan (Aku telah perintahkan): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. (106); Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberimu mudharat kepadamu selain Allah: sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.*

Memperhatikan ayat Al-Qur'an tersebut, batasan-batasan antara tauhid dan musyrik sudah sangat jelas (qath'i), bukan wilayah abu-abu

(dzanni) yang harus diperdebatkan dan diperselisihkan antara satu orang dengan orang yang lain. Janganlah dengan sebab sebuah kebodohan dan kesombongannya, manusia merangkak memasuki wilayah hak Allah, karena bukan mustahil orang akan dijerumuskan dalam lembah kesesatan akibat perilaku dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka.

Sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dibangun melalui aturan yang ada dalam kitab suci yang dilengkapi dengan ritual atau amalan ibadah akan menjadikan tingkat kesempurnaan keagamaan seseorang menjadi lebih baik. Iman yang dimiliki seseorang pada dataran implementatif berbentuk melalui sarana dan prasarana yang dalam agama disebut dengan simbol-simbol agama sebagai sarana mengempirikkan unsur-unsur empiris agama. Oleh karena itu menjadi logis, perbedaan agama seseorang akan berimplikasi pada terjadinya perbedaan keyakinan terhadap Tuhan, dan implikasi selanjutnya adalah terjadinya perbedaan cara ibadah, perbedaan kitab suci, dan perbedaan sarana dan prasarana agama.

Kita sudah terbiasa berpikir linier mengasumsikan atas sistem kepercayaan dan sarana ibadah yang dimiliki setiap agama, bahwa agama telah membantu mendorong terciptanya dan terlaksananya kewajiban-kewajiban sosial, sehingga agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kemudian agama juga telah berhasil memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa mendukung adat-istiadat yang berlaku, berhubungan erat dengan perasaan-perasaan kagum yang ditimbulkan oleh yang sakral (Nottingham, 1997: 36).

Poin penting yang bisa dipahami dari reproduksi "cipta, rasa, dan karsa" dalam tata kelola kehidupan manusia adalah perlunya nilai-nilai yang mewarnai proses produksi yang tetap berbasis pada nilai-nilai

tauhid. Alur pemikiran manusia atas reproduksi kebudayaan dipastikan akan melakukan penolakannya, kalau nilai-nilai tauhid sama sekali tidak diindahkan, terlebih lagi harus berseberangan dengan nilai-nilai tauhid. Untuk menjamin keharmonisan antara agama dan budaya dalam alam realitas, maka keduanya harus sama-sama menunjukkan eksistensinya bukan saling menegasikan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Agama

Setiap agama mengajarkan dan memerintahkan kepada umatnya, untuk mematuhi norma-norma yang sudah ditetapkan sebagai sebuah ajaran. Pelaksanaan pengamalan ajaran agama yang sudah disistematisasikan dalam keimanan dan ibadah, ada yang masuk dalam katergori wajib dan ada yang masuk dalam kategori ibadah sunah. Dalam pelaksanaan ibadah baik yang sifatnya wajib maupun sunah, tetap saja merupakan amalan yang mulia bagi manusia di hadapan Tuhan. Pembeda "wajib dan sunah", kadar dan posisinya saja berbeda, dan untuk tahap implementasinya ada kesamaan-kesamaan. Namun ketika iman dan ibadah tersebut diletakkan pada alam realitas sosial kemanusiaan, menjadi beragam wujudnya karena dipengaruhi beberapa nilai-nilai sosial dan kultural yang ada di masyarakat itu sendiri.

Perspektif Islam sebagai agama yang dilengkapi dengan seperangkat aturan dengan menempatkan keyakinan bahwa sejak awal agama Islam disyariatkan kepada nabi Muhammad Saw. terdapat beberapa ketentuan yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah keselamatan dan keridhaan Allah. Ketaatan manusia kepada Allah sudah ditata dengan baik dan sistematis oleh nabi ke dalam bentuk ibadah sebagai bentuk ketundukan manusia kepada Tuhan. Karena memang esensi dari agama Islam adalah ketundukan, kepasrahan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Sang Khaliq, yang pada akhirnya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 123 dengan tegas Allah akan

memberi jaminan surga kepada orang-orang yang setia menjalankan amal ibadah.

> "Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan shaleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar pekataannya dari pada Allah."

Untuk mengampu tanggung jawab sebagai muslim, setidaknya ada dua pintu masuk. Pertama, seseorang dikatakan beragama Islam, dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah, terhitung sejak seseorang itu bersyahadat melakukan pengakuan atas kebenaran Allah sebagai zat yang berhak disembah, dan pengakuan atas nabi Muhammad Saw sebagai rasulullah. Pengakuan dan kesaksian atas kebenaran Allah dan diutusnya nabi Muhaamd Saw. Dengan makna tekstual, "Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah rasulullah," yang kemudian dalam Islam disebut dengan dua kalimah syahadat, menjadi salah satu pilar penting pintu masuknya seseorang beragama Islam dan dikenai peraturan Islam.

Kedua, pintu masuk kedua khusus bagi anak-anak yang sejak kecil lahir menjadi muslim, lahir dari keluarga muslim, belajar agama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam, maka hukum wajib berlaku ketika anak berusia baligh (dewasa). Dengan berlakunya hukum wajib kepada orang yang sudah bersyahadat, dan ketika usia anak menjadi dewasa, maka sejak itu realitas sosialnya juga harus ditata dengan menggunakan norma Islam. Itu artinya setiap orang sudah bersyahadat dan anak-anak menjadi dewasa harus menanggung konsekwensi sebagai muslim dengan menjalankan ibadah wajib dan sunah. Yang lebih penting lagi adalah seorang muslim kemudian harus konsisten menjalankan amal ibadah untuk mencari keridlaan-Nya sebagaimana diperintahkan Allah. Perhambaan manusia, kepatuhan dan kepasrahan manusia, semata-mata

hanyalah mencari keridhaan Allah, dan itu menjadi kata kunci ibadah. Surat At-Tin ayat 4-6 menggaransi jika manusia tidak bisa menjaga konsistensi ibadah, sangat mungkin dikembalikan kedudukannya sebagai orang yang hina.

> "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

Penciptaan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, menurut pandangan Al-Ghozali merupakan kemurnian sifat dasar manusia. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan baik, dan untuk mendatangkan kebaikan, tetapi ia harus memelihara dan mengembangkan kebaikannya itu secara maksimal. Dalam diri manusia ada benih baik dan ada benih buruk, kalau kebaikan yang dipelihara, maka seseorang akan menjadi baik (Ali, 1988: 33).

Dari dasar pemikiran yang diserap dari Al-Qur'an dan pendapat Al-Ghozali tersebut, maka amal ibadah merupakan langkah lanjutan setelah seseorang bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Manusia memiliki kewajiban mengembangkan benih kebaikannya ke dalam amal shaleh. Oleh karena itu, sebutan ibadah dalam Islam, meliputi melaksanakan segala macam yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan larangan-Nya. Manusia melaksanaan ibadah dan mentaati peraturan Islam, agar terjadi keserasian interaksi hamba dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Menurut Abul A'la Al-Maududi ruang lingkup ibadah itu memang sangat luas, dan prinsipnya semakin banyak nilai ibadah seseorang, maka akan tinggi nilai kadar keimanannya. Sebaliknya, semakin besar perbedaan antara iman dan amal ibadah, maka semakin berkuranglah iman dan semakin tidak sempurna. Berbicara baik dengan orang lain,

menghindari kata-kata keji dan kotor dalam perkataan, dengan memilih kata-kata yang benar dan jujur, pantas dan baik, dengan diniatkan karena Allah, maka perbuatan-perbuatan ini adalah ibadah. Dengan demikian, semua perbuatan baik, dan menjauhi perbuatan jelek yang diniatkan karena Allah, maka masuk nominasi ibadah seorang hamba kepada Allah (Maududi, 1985: 10-16).

Doktrin Islam yang meliputi hukum wajib, sunah, makruh atau haram dengan segala perangkatnya sama-sama memiliki konsekuensi kebaikan dan keburukan. Seseorang yang tidak mau menjalankan ibadah wajib, maka yang bersangkutan hukumnya orang yang menjalani dosa. Apabila seseorang melaksanakan ibadah, maka hukumnya dia menjadi orang yang berpahala. Pahala amal ibadah seseorang akan diberikan oleh Allah seberapapun kadar kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, seberapapun pelanggaran yang ditempuhnya, kadar dosanya juga akan diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zalzalah ayat 6-8:

> "Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

Pemberlakuan hukum Allah pada tatanan kehidupan manusia, semua akan dipertanggung-jawabkan pasca kematian seseorang dan kehancuran dunia (qiamat). Manusia yang memiliki amal kebaikan yang cukup banyak atau pun sangat sedikit, posisinya jelas akan sangat berbeda dengan orang jahat yang tidak memiliki amal kebaikan sedikitpun. Ada perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang taat dengan orang-orang yang ingkar, dan Allah pada hari itu akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan manusia selama dia hidup di dunia. Bagi orang yang

ingkar terhadap perintah Allah, maka ia akan ditempatkan di neraka dengan kondisi yang memprihatinkan dan rasanya sungguh sangat pedih, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 106-107:

> "Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghedaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."

Ajaran Islam memang meliputi segala sesuatu dengan tanpa batas. Islam merupakan agama paling akhir dan sekaligus sebagai penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Dengan adanya konsep iman, Islam dan ihsan, menjadikan Islam memiliki daya fleksibelitas yang tinggi termasuk umatnya dalam menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi. Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi praktik pengamalan ajaran agama, beberapa faktor antara lain:

a. Faktor sejarah: proses perjalanan waktu telah menunjukkan adanya perubahan, mulai dari kondisi alam, faktor interaksi sosial, akulturasi agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam menentukan praktik pengamalan ibadah. Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan praktik agama masa lalu masih menjadi bagian yang dilestarikan dalam Islam, misal khitan bagi lagi-laki dan ibadah haji, meski dua hal ini merupakan praktik agama pada masa sebelum kerasulan nabi Muhammad.
b. Fungsi Agama: agama pada tingkatan bagi individu dan sosial memberikan sumbangannya untuk mewujudkan adanya kesalehan pribadi dan kesalehan sosial sekaligus, karena setiap manusia akan menjalankan perintah-perintah agama sampai pada titik kesempurnaannya. Agama menjamin kelancaran hubungan antara individu dengan Tuhan. Nottingham menyebut manusia

mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan memelihara sampai batas minimal. Agama memiliki daya paksa untuk melaksanakan kewajiban, minimal dipelukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kemudian agama juga telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat-istiadat (Nottingham, 1997: 35-36).

c. Kesadaran dan pemahaman terhadap agama: agama satu sisi memberi kelonggaran kepada umatnya untuk menjalankan ajaran agama dengan suka rela dan tanpa paksaan. Namun pada kondisi tertentu, Islam memberikan kewenangan dengan ketat dan memainkan peran daya paksanya untuk mewujudkan sebuah kesetabilan sosial. Namun secara sosiologis, praktik pengamalan agama itu sangat dipengaruhi oleh adanya kesadaran dan pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya. Proporsi kesadaran dan pemahaman agama memang menjadi lebih dominan ketimbang daya paksanya untuk pengamalan praktik agama. Allah dalam surat As-Sajdah ayat 22 menunjukkan dengan jelas, letak antara kesadaran dan paksaan diperlukan dalam praktik keagamaan.

   "*Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.*"

Pemberiaan peringatan dalam pengamalan ajaran Islam, lebih bersifat memberikan pendidikan untuk mendorong lahirnya sebuah kesadaran. Islam kemudian memberikan daya paksanya ketika keringanan yang sudah diberikan Allah sama sekali tidak diindahkan,

dan ada kecenderungan dilanggarnya, maka kemudian konsep sebutan zalim diberlakukan, sehingga Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat dosa.

C. Bertemunya Agama dan Budaya

Kebudayaan tidak bisa disamakan dengan agama, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses kreatif dan inovatif manusia dalam kesehariannya, karena pada praktiknya manusia membutuhkan agama dan kebudyaan sekaligus sebagai sarana penyempurna dirinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Sementara agama dalam membangun basis kultural di masyarakat juga akan membutuhkan kebudayaan. Hubungan fungsional tersebut, menjadikan kebudayaan yang ada tidak akan keluar dari bingkai tauhid. Oleh karena itu, kebudayaan yang sedang berkembang sangat membutuhkan agama dalam upaya menunjukkan eksistensinya. Posisi saling membutuhkan ini, akan menunjukkan hubungan keduanya bisa menemukan pola yang ideal, yaitu saling melengkapi dan saling mendukung pada wilayah religio-kultual dalam kehidupan manusia.

Kebudayaan dalam konteks ini dimaknai sebuah sistem yang terdiri atas ide-ide, gagasan, kelakuan sosial, dan benda-benda kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia untuk mencapai sebuah kemajuan baik dalam lingkup individu dan kolektif, maupun bentuk-bentuk yang dimanifestasikan dalam hasil penciptaan manusia. Kebudayaan ada bersama dengan adanya manusia berkarya, sehingga menghasilkan produk-produk kebudayaan, baik sifatnya mateial maupun immaterial. Manusia akan menemukan dan menghasilkan kebudayaannya, ketika masing-masing manusia memainkan peran kreatifitasnya untuk mewuudkan apa yang ada dalam benak pikirannya menjadi alam realitas (Poespowardojo, 1993: 110).

Kemampuan manusia mewujudkan alam pikiran menjadi alam realitas yang diprduk menjadi "kebudayaan" yang tidak pernah berhenti,

sudah menjadi tugas kekhalifahan yang disanggupinya, ketika makhluk lain tidak sanggup menanggungnya. Gambaran realitas kehidupan manusia yang lengkap dengan segala kebutuhannya tersebut, sekali lagi Allah menegaskan kembali dalam surat Al-Ahzab ayat 72: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat "tugas-tugas keagamaan" kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."

Relativisme manusia dalam berkarya memang tidak akan menemukan kesempurnaannya, jika manusia hanya bekerja seorang diri. Sebagai konsekwensi makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan rekan kerja, dalam berkarya memproduksi sebuah kebudayaan. Bukan itu saja, manusia sebagaimana digambar dalam surat Al-Ahzab di atas, manusia sangat membetuhkan agama dan pertolongan kekuatan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang ditanggungnya. Dengan meletakkan posisinya yang tidak sempurna, dan tidak memiliki kemampuan secara penuh, manusia membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.

Manusia memang dilengkapai oleh Allah hal-hal berkaitan dengan kecerdasaran, ide, pemikiran, rasa serba ingin, tingkah laku, dan perbedaan perilaku diantara manusia. Semua ini merupakan satu sistem yang mengarah kepada proses yang akan menghasilkan kebudayaan monumental sebagai hasil kongkrit usaha manusia. Pilihan manusia selalu berada dalam situasi membutuhkan bantuan untuk dirinya, merupakan bentuk kewajiban yang harus ditunaikan sebagai khalifah di muka bumi. Bertemunya agama dan kebudayaan dalam diri manusia, dimana agama akan masuk dalam keyakinan dan kebudayaan, maka titik utama berada pada **ide** atau **gagasan** secara universal yang sedang dibangun, sehingga tidak terjadi kontra produktif dengan sejumlah daftar keinginan manusia.

Hadirnya agama dan kebudayaan dalam setiap kehidupan manusia, karena keduanya sama-sama melekat pada manusia. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi secara timbal balik. Rukun Iman melampaui rasionalitas manusia, mau Islam atau kafir adalah pilihan sadar akal manusia. Setiap manusia diperintah untuk menggunakan akalnya, ini adalah perintah berbudaya. Dan akhirnya Islam dan budaya adalah dua hal yang hidup bersama tanpa pertentangan. Diskusi tentang agama dan kebudayaan merupakan tema yang tidak akan ada habisnya, dan selalu menarik untuk dikaji, karena memang keduanya bersifat dinamis, dan harus mampu memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi manusia. Kedekatan hubungan antara agama dan kebadayaan sebagai wujud perilaku manusia menuju kesempurnaan. Referensi utama dalam membangun hubungan ideal tersebut, patut kita renungkan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 7-8:

> "Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?, Allah tidak akan menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di atanra manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya."

Dari pelajaran ayat ini sudah sangat jelas, kebudayaan yang terpisah dari agama akan menjadi mala petaka, kecenderungan mementingkan yang serba materiil dan serba dunia, dan akan melalaikan manusia dari sisi akhiratnya. Sementara dalam hal dua kehidupan tersebut, agama tidak membedakan kecintaannya dan bahkan didorong untuk bisa seimbang untuk kebaikan pada dunia dan akhirat. Pertanyaan yang layak diajukan adalah kenapa ada upaya untuk memisahkan keduanya, yang ujungnya hanyalah mendisharmoniskan kehidupan manusia.

Agama dan budaya memang dalam praktik keseharian harus menunjukkan tingkat keharmonisannya, meski tanpa harus menghilangkan jati dirinya masing-masing, karena agama bersumber pada keyakinan dan kebenaran hakiki yang tidak mungkin lebur dalam sebuah kebudayaan yang memiliki sifat relatifistik di tengah perubahan sosial. Agama dan kebudayaan memungkinkan melakukan kerja bersama untuk mengantisipasi "masalah kemanusiaan" yang akan terjadi di era global. Problem-problem universal tentang kemanusiaan tersebut, merupakan pilihan paling mungkin untuk mempertemukan antara agama dan kebudayaan.

Dalam kaitan persoalan atau lebih spesifik bisa ditanggulangi secara bersama, sebagai akibat dari kemajuan jaman, menjadi tidak krusial ketika umat Islam juga ikut ambil bagian dalam menghadapi persoalan yang mungkin timbul di masyarakat. Isu-isu modernisasi dan globalisasi dengan segala efeknya, bukan menjadi alasan pembenar untuk tidak tampil menjadi penjembatan pengurai persoalan. Manusia berbudaya akan selalu hadir bersama problematikanya, dan kemampuan mengurai menjadi lebih manfaat, sehingga tatanan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Transformasi sosial yang pasti terjadi di masyarakat berbudaya, harus sama-sama dijaga oleh kelembagaan agama dan sosial. Peran ini jelas untuk mencari jalan keselamatan sebagai bentuk sumbangan agama terhadap kebudayaan agar tidak mengalami kepunahan. Dalam kasus ini, jelas kehadiran Islam mutlak diperlukan, ketika gempuran modernisasi akan terus menyerbu ke jantung-jantung tradisi, yang mengakibatkan budaya berada pada titik nadir dan harus diselamatkan. Dalam konteks ini jelas eksistensi agama menjadi bagian penting, dan harus bisa mendominasi pemikiran-pemikiran yang memiliki relevansi dengan kebudayaan.

Di tengah keruwetan sosio-budaya moderen, dengan kemunculan agenda-agenda global yang akan menggerus nilai-nilai budaya lokal,

pada akhirnya setiap orang akan membutuhkan perlindungan, agar keberadaannya tidak terancam dari kepunahan, sehingga budaya yang dimiliki masih tetap eksis. Islam dengan tawaran pembaharuan dan langkah-langkah penyempurnaan terhadap setiap budaya dan tradisi yang ada, pada prosesnya akan bertemu pada sebuah kebersamaan dan saling memberi manfaat. Langkah starategis inilah yang mempertemukan antara agama Islam sebagai sumber inspirasi kemajuan kebudayaan dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab pengelola dan sekaligus penjaga kebudayaan.

Peran manusia yang lengkap dengan potensi bawaan "agamis-sosial-kultural", pasti tidak akan bisa menghindar dari arah yang menuju pada perwujudan kebaikan dan kemajuan. Ikhtiar manusia ini lebih bersifat dinamis untuk mengelola dan mengarahkan atas dinamika sosial dan budaya yang terjadi dengan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam. Pada titik inilah agama bisa bertemu dengan kebudayaan dengan tampilan wajahnya yang harmonis, untuk sama-sama menuju sebuah kemaslahatan manusia.

BAB VIII

PERSINGGUNGAN PERADABAN ISLAM DAN PLURALISME

Umat Islam dalam menjalankan misi dakwah, dihadapkan pada sebuah kenyataan masyarakat beragam, dari sisi agama, budaya, tradisi dan etnisitasnya. Menghadapi kondisi masyarakat yang demikian, fleksibelitas Islam dan gerakan dakwahnya akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian di tengah-tengah kompleksitas masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan hidup harmonis dengan menjalankan misi dakwah yang syarat dengan ketauladanan dan kedamaian haruslah dikedepankan, dan itu merupakan pilihan mulia. Sebaliknya, kemungkinan membangun penguatan agama yang membuka ruang konflik di tengah-tengah masyarakat haruslah dihindari, termasuk benturan ideologi dan fisik antar pemeluk agama. Ada agenda utama dakwah bagi masyarakat yang beragam, yaitu secara bersama-sama bertanggungjawab membangun kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat dengan tetap menghargai perbedaan.

Islam memiliki sejarah yang panjang dalam merespon keberagaman masyarakat. Sosok ideal normatif Islam yang sudah dicontohkan Rasul dalam membangun kebersamaan harus tetap dijaga, dan tidak dicederai oleh gerakan yang hanya dipicu egoisme, dan arogansi masing-masing kelompok. Fakta yang terjadi atas konflik berkepanjangan antar komunitas dalam Islam, atau konflik dengan atas nama agama, merupakan problem yang harus dicarikan jalan keluar, agar kristalisasi internal yang cenderung kian menguat tidak mengarah ke konflik

terbuka, karena hanya akan membahayakan tatanan sosial masyarakat pluralis. Kenyataan ini seharusnya disadari betul, bahwa penataan dan pengaturan masyarakat akan menemukan kiatnya sampai pada batas yang sangat memungkinkan baik di internal agama maupun di eksternal antar agama.

Umat Islam pada dataran sosiologis dan politis, sejak awal disodori benih-benih ketidak harmonisan dalam komunitas umat Islam. Disharmonis ini terjadi dilatarbelakangi oleh keragaman yang belum tuntas ditata dengan dakwah Islam, dan kondisi itu mulai terasa sejak sepeninggal Rasulullah. Ketegangan antar komunitas terjadi dalam sebuah tempat yang dinamakan Bani Sa'idah untuk membahas siapa pengganti nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan. Meski sempat memanas pertemuan perdana pasca kenabian tersebut, umat Islam berhasil melewati masa sulitnya dengan berhasil memilih Abu Bakar menjadi khalifah (pengganti Rasulullah) dalam mengendalikan pemerintahan dan dakwah (Yatim, 1997: 35).

Memang pergantian kekhalifahan pada masa sahabat ini dapat terlaksana secara damai dan dilakukan musyawarah secara langsung ,tanpa diwarnai insiden berupa konflik fisik. Tapi harus diakui, benih-benih ketidak puasan di antara komunitas muslim itu ada, dan puncaknya adalah pada masa khalifah Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketidak harmonisan sosial dimunculkan secara terbuka, masing-masing komunitas memiliki klaim keabsahan untuk menduduki jabatan khalifah. Kontak fisik benar-benar tidak bisa dihindari, dendam dan permusuhan kembali mengemuka, akibatnya korban pun tidak bisa dihindarkan dan gerakan dakwah dihadapkan pada masa yang sulit. Pelacakan historis ini untuk membuktikan betapa problematiknya ketika komunitas yang terdiri dari unit-unit yang beragam, belum tuntas dikelola dengan baik, harus berhadapan dengan situasi sosial yang memungkinkan bangkitnya egoisme kelompok.

Paparan singkat yang mengurai benih-benih konflik dalam komunitas msulim yang beragam dari berbagai aspek tersebut, merupakan fenomena sosiologis yang menyelimuti umat Islam yang mencoba bangkit melanjutkan kegiatan dakwah setelah ditinggalkan Nabi. Pada kenyataannya, memang konflik yang ada tidak menjadi penghalang bagi gerakan dakwah yang dilakukan oleh lembaga kekhalifahan, dan komunitas-komunitas muslim. Gerakan dakwah Islam tetap berjalan dan mampu menembus kawasan di luar kota Makkah dan Madinah, bahkan dakwah Islam berhasil masuk di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Penyebaran Islam memang terus berlangsung dengan dinamika yang cukup tinggi, melalui ekspedisi dagang. Semangat memperjuangkan ideologi keagamaan yang dibangun oleh komunitas muslim, tidak dipungkiri adanya motif politik dan ekspansi dagang. Mereka melakukan kegiatan dakwah terutama di kawasan perdagangan, sehingga pengaruh Islam menjadi sangat kuat di daerah-daerah yang menjadi tempat singgah para saudagar muslim Arab, Gujarat dan Cina ini. Gerakan dakwah yang dilakukan komunitas muslim ini terus berkembang, dan jumlah kelompok muslim baru terus terbentuk. Meluasnya jangkauan dakwah mampu menambah jumlah umat Islam, sehingga gerakan dakwah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka memiliki ikatan idiologi, dan mereka berupaya mengembangkan pengikut yang lebih besar lagi.

Daulah Islamiyah sebagai pendukung dakwah Islam, mengalami perpecahan dan masing-masing semakin menunjukkan kekuatannya. A. Hasjmy dalam buku Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an, mengklasifikasi ada lima gerakan dakwah "aliran" yang kehadirannya memiliki latar belakang sendiri-sendiri, mereka saling berebut pengaruh dan saling bermusuhan. Ada Khawarij yaitu gerakan yang keluar dari barisan Ali, karena perang sesama muslim dinilai salah. Kemudian ada Syi'ah yang membela Ali dan setia menjadi pendukungnya, karena

Ali dan keturunannya yang berhak menjadi khalifah. Dua komunitas berikutnya adalah Murjiah dan Muktazilah, kedua aliran keagamaan ini dalam perkembangannya juga menjelma menjadi partai politik sedang Ahlussunnah Wal Jamaah tetap mengambil posisi sebagai aliran dalam Islam (Hasjmy, 1994: 322-324).

Aliran-aliran atau partai politik yang sudah disebutkan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengalami pasang surut. Keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh penguasa negara atau khalifah. Kalau penguasa negara berasal atau mendukung aliran tertentu, maka kondisi aliran yang bersangkutan menjadi kuat. Posisi negara bisa memainkan peran politiknya, dan aliran-aliran dalam Islam sebagai alat kekuasaan negara. Kemajuan yang dicapai oleh negara di berbagai bidang ilmu pengetahuan, keagamaan dan peradaban, kian menambah kekuatan syiar Islam. Dinamika kejatuhan dinasti Umayyah, kemudian digantikan Abbasiyah dari sisi politik, pada aspek bidang kajian teologi dan hukum Islam mengalami kemajuan. Kemudian muncul madzhab-madzhab fiqh seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Oleh karena itu, dinasti Abbasiyah dikenal dengan istilah zaman berdirinya madzhab-madzhab hukum Islam (Hassan, 1989: 145).

Kehadiran aliran, partai politik atau pun madzhab dalam gerakan dakwah memang satu sisi menambah syiar Islam, namun ketidakmampuan menekan atau mengelola konflik secara terbuka terhadap aliran atau partai politik yang ada, menjadikan gerakan dakwah Islam mengalami hambatan baik dari sisi teknis maupun sosiologis. Karena faktanya, mereka yang terlibat dalam pusaran konflik sulit untuk bisa menerima gagasan pemikiran yang disampaikan dari juru dakwah yang tidak berasal dari kelompoknya. Kondisi ini jelas merupakan problematika dakwah yang harus mendapat perhatian, karena dari waktu ke waktu problem ini sulit diatasi, bahkan problem itu cenderung meningkat dan masih terjadi pada era sekarang. Fakta historis yang memotret masih ada konflik,

merupakan bentuk kegagalan dalam pengelolaan pluralisme di tengah menguatnya ideologis dan kelompok masyarakat.

Paparan tentang kondisi sosial yang melingkupi internal umat Islam dan umat lain tersebut, tentu menjadi penekanan bahwa aspek kerukunan dan toleransi umat, tetap menjadi tema sentral dan aktual yang dibutuhkan, di tengah menguatnya pemahaman dan politik aliran di kalangan umat Islam. Dengan mengedepankan kerukunan dan toleransi, maka akan menghasilkan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Berbeda di antara kita merupakan sunnatullah. Berbeda tidak perlu dipersoalkan, dan harus diterima dengan wajar. Kalau kesadaran ini bisa menembus jumlah angka umat Islam, maka dampak selanjutnya adalah akan meredakan konflik yang berasal dari keragaman, baik yang sifatnya internal umat Islam maupun eksternal dengan umat lain.

Pada awal Islam masuk ke Indonesia, persoalan umat memang tidak serumit setelah Islam berkembang dan banyak mendapat pengikut. Relasi umat Islam dengan umat lain, umat Islam dengan budaya, umat Islam dengan politik dan tradisi, menjadi semakin rumit persoalan yang dihadapi umat Islam. Berbagai kebutuhan dasar keagamaan dan tuntutan sosial lainnya menjadi varian tambahan yang mengiringi perkembangan dinamika umat Islam. Menjawab akan kebutuhan dan tutuntan masyarakat tersebut, berdiri sebuah organisasi-organisasi Islam sebagai wadah gerakan dakwah dengan beragam argumentasi yang mengiringi latar belakang pendiriannya akhirnya menjadi sebuah kebutuhan.

Kehadiran organisasi-organisasi Islam, misal Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi organisasi sosial kemasyarakat Sarikat Islam (SI) pada tahun 1913 dengan tokoh sentralnya H. Samanhudi, Tjokroaminoto, H. Agus Salim. Meski rintisan awal organisasi ini menaruh perhatian pada perniagaan, setelah berubah menjadi SI organisasi ini memiliki kepedulian kepada kesatuan dan persatuan politik umat Islam Indonesia, dan mengesampingkan wacana kontraversi paham keagamaan.

Selain itu, komunitas Arab di Indonesia juga memiliki organisasi khusus yang mengemban misi dakwah yaitu Al-Irsyad berdiri pada tahun 1913 dengan tokohnya Ahmad Sorkati. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1923 umat Islam juga mendirikan organisasi Persatuan Islam (Persis) yang berbasis di Bandung. Dengan tokohnya Ahmad Hassan organisasi ini maju dan menjadi kekuatan pembela gerakan pembaharuan dan reformis Islam (Ismail, 2002: 168-169).

Pada era sebelum kemerdekaan, gerakan SI menekankan kepada umat Islam untuk memiliki semangat keagamaan, membangun usaha gotong royong, saling tolong menolong dan memberikan bantuan, sehingga umat Islam menjadi kuat terutama para pedagangnya. Akibat selanjutnya adalah bangkitnya sentimen ideologis pedagang muslim, gerakannya melembaga dan solidaritas mereka menjadi lebih kuat. Kuntowijoyo memotret kebangkitan dan persatuan pedagang muslim ini seperti terjadi di Kudus. Para pengusaha rokok kretek di Kudus memiliki kebersamaan, disusul para pengusaha batik di Solo, Yogyakarta dan Pekalongan yang dikuasai oleh kelompok muslim kelas menengah (Kuntowijyo, 1991: 87).

Kemajuan dan kesadaran sosial politik umat Islam dalam merespon berbagai persoalan yang melingkupi umat Islam, ternyata mampu menjadi daya dorong dan bisa membangkitkan kesadaran umat Islam kelas menengah ini untuk terus melakukan gerakan dibidang pendidikan, sosial dan dakwah. Kehadiran organisasi keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan tokoh sentralnya Ahmad Dahlan tidak luput dalam konteks ini, sehingga gerakan pemurnian ajaran Islam, reformasi pendidikan muslim, dan mengedepankan pelayanan kepada umat dalam bidang sosial dan kesehatan, sehingga berhasil mendorong berdiri sekolah-sekolah, panti asuhan dan rumah sakit Muhammadiyah.

Apa yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam gerakannya, mendorong pengikutnya dan masyarakat mulai membentuk kelompok-

kelompok yang disebut gerakan jama'ah dan dakwah jama'ah. Laku dakwah ini di masa Ahmad Dahlan disebut dengan pendidikan desa atau guru keliling yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah tabligh atau pengajian. Dalam tradisi santri, pengajian keliling ini banyak dijumpai pada acara pengajian rutin hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj atau kegiatan pengajian lain (Hefner dkk, 2008: 5). Bidang kegiatan yang menonjol dikembangkan Muhammadiyah adalah pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Di bidang kesehatan banyak berdiri rumah sakit Muhammadiyah, balai kesehatan dan poliklinik Muhammadiyah termasuk pelayanan sosial lainnya, yang kemudian dikenal dengan PKU Muhammadiyah.

Kompleksitas dan keluasan jangkauan dakwah memang sangat besar dan kian rumit, dan keberadaan organisasi-organisasi Islam yang sudah diuraikan di atas dirasa masih belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan umat Islam yang tersebar di seluruh Indonesia dengan beragam idiologi dan tradisi yang melingkupinya. Dalam menjawab kebutuhan dan persoalan umat tersebut, maka sejumlah ulama dari lembaga pesantren pada tahun 1926 mewujudkan semangat kebangkitannya dengan mendirikan sebuah organisasi sosial keagamaan dan dakwah bernama Nahdlatul Ulama (NU). Berdirinya organisasi NU dengan tokoh sentralnya KH. Hasyim Asy'ary dan KH. Wahab Hasbullah semakin menunjukkan eksistensi gerakan dakwah secara melembaga di kalangan kiai pesantren.

Kiai-kiai yang tergabung dalam organisasi NU dan ikut membesarkan organisasi NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan dakwah, memilih basis pengembangan umat melalui lembaga pendidikan pondok pesantren. Namun belakangan ini, tidak sedikit pondok pesantren yang semula hanya mengajarkan kitab kuning, lalu mendirikan lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi yang dikelola secara moderen. Kondisi ini tentu merupakan kemajuan

dari jam'iyah NU dalam merespon kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, adanya kemajuan lembaga pendidikan di bawah naungan NU, dan banyaknya santri melanjutkan ke sekolah umum atau perguruan tinggi, penempatan NU sebagai organisasi tradisional merupakan tesis yang harus diperdebatkan. Bahkan dikotomi reformis dan tradrisional dalam konteks kekinian menjadi sangat tipis dan menjadi sulit dibedakan di tingkat lapangan, karena banyak penganut organisasi modernis tapi memiliki perilaku tradisional, dan banyak pula penganut organisasi tradsional tapi memiliki perilaku modernis.

Seorang cendekiawan muslim Deliar Noer merumuskan sebuah gerakan itu masuk tradisional atau reformis, bisa dilihat dari empat aspek yang menjadi ciri khas reformis Islam. Pertama, mengakui Al-Qur'an dan Hadis sebagai perangkat prinsip dasar. Kedua, tetap membuka pintu ijtihad. Ketiga, menolak taklid. Dan keempat, mengindahkan fatwa imam untuk ditelaah (Anshoriy, 2010: 88). Empat kerangka dasar tersebut, untuk melabelkan tradisional kepada NU, dan reformis untuk organisasi di luar NU, pada era sekarang memang agak sulit dibuktikan, karena keduanya "tradisional dan reformis" sudah sama-sama melampaui batas-batas yang dilekatkan kepada masing-masing kelompok.

Narasi panjang ini sekedar untuk mengurai alur perjalanan dakwah Islam dari kawasan Timur Tengah hingga ke Indonesia, harapannya pembaca bisa memahami bahwa Islam dengan seperangkat norma yang disampaikan kepada masyarakat sudah memiliki keragaman. Penyadaran berikutnya adalah sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat sudah memiliki keragaman keyakinan agama, budaya dan tradisi. Dengan nalar kritis kita, kedatangan Islam di masyarakat bertemu dengan aneka ragam agama, keyakinan, budaya dan tradisi. Semua bentuk keragamaan itu sejak awal sama sekali tidak disoal oleh Islam, karena sejak pertama kali Islam di dakwahkan oleh nabi langsung bertemu dengan sebuah keragaman agama, aliran kepercayaan, budaya dan tradisi masyarakat.

Kesadaran akan keragaman sudah nampak dalam pewahyuan, dimana penciptaan laki-laki-perempuan, dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa menjadi pusat legitimasi akan adanya keragaman. Perbedaan yang ada di antara mereka harus mau untuk saling mengetahui dan saling mengenal. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka memiliki posisi dan derajat yang sama di hadapan Tuhan, tidak ada di antara mereka yang lebih tinggi kecuali mereka memiliki derajat ketaqwaan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujaraat ayat 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Adalah sebuah fakta Islam bukan agama anti pluralisme, dan Islam menyadari bukan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam beragama, meski Islam secara langsung mendeklarasikan sebagai agama paling akhir dan paling sempurna. Islam mengenal keragaman dan bisa membangun hidup toleransi di tengah masyarakat, sebagai wujud implementasi masyarakat pluralis. Bahkan Islam dalam hal pluralisme ini memiliki kutup ekstrim dalam persoalan ibadah dan keyakinan untuk menunjukkan sebagai agama yang paham dengan pluralisme, sebagaimana dinyatakan dalam suarat Al-Kafirun ayat 1-6:

> "Katakanlah, "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku."

Dalam konstelasi sosial politik antar agama sebagai pelaksanaan dari pluralisme, Islam masih mengenalkan konsep ahli kitab yang itu menunjuk langsung kepada entitas di luar Islam. Disamping itu, Islam juga mengenalkan konsep kafir dzimmi sebagai komunitas atau individu yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan sebagai warga negara. Dari data-data ini, semakin meneguhkan bahwa Islam merupakan agama yang menjaga dan menghormati pluralisme, bukan saja dalam bentuk konsep tapi sampai ke aplikasinya. Islam menjalankan pluralisme secara nyata dalam kehidupan, bukan semata-mata hanya melakukan pembelaan pada sisi konsep atau pluralisme semu.

A. Konsep Pluralisme

Pluralisme agama membawa kita pada kajian yang berkait dengan hal-hal yang sangat mendasar, karena berkaitan dengan konsep dasar agama dan interpretasi dari norma agama yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, membangun perspektif keragaman menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan yang beragam. Itu nantinya agama dan elit agama mampu menggerakan umatnya untuk menjaga harmonisasi kehidupan, menjaga nilai kemanusiaan, mewujudkan keadilan, dan bisa menghargai keberagaman yang ada di tengah-tengah kita. Menyiapkan mental hingga di tingkat lingkungan masyarakat terbawah, untuk bisa memahami dan menerima perbedaan mejadi kontribusi terbesar dalam penataan hidup bersama di tengah perbedaan.

Menurut sosiologi fungsional, pluralisme adalah diferensiasi atau lebih mudah dibaca sebagai perbedaan yang terjadi di masyarakat yang dapat diamati pada level individu, organisasi sosial, dan pada level masyarakat. Pada level individu perbedaan merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dibantah dan ditolak keberadaannya. Menyatunya individu-individu dalam sebuah organisasi bukan saja menempatkan keragamaan

sebagai fitrah, melainkan sudah menjadi kesadaran dalam setiap diri yang tergabung di dalam organisasi. Kalau kondisi ini diperluas dalam realitas sosial di masyarakat, maka paham kemajemukan akan menjadi kebutuhan kolektif, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari akan adanya realitas perbedaan. Pengakuan terhadap keragaman ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan kebersamaan dan keharmonisan masyarakat.

Di luar pelaksanaan pluralisme yang dipahami dan dipraktekkan oleh sebagian manusia tersebut, ada pluralisme yang belum sepenuhnya menjadi entitas yang harus disadari dan diakui sebagai kenyataan sosial dalam masyarakat. Pluralisme semacam ini bentuknya hanya pengakuan terhadap keragaman masyarakat (toleransi) yang terdiri dari budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda, namun tidak bersedia menyikapi dan menerima suatu keberagaman sebagai kenyataan sosio-kultural. Sikap dan pemikiran seperti ini dinamakan dengan pluralisme semu. Keberadaan pluralisme semu ini akan berbahaya di masyarakat. Beberapa praktik pluralisme semu adalah:

a. Diantara kita mengakui adanya perbedaan, namun penerimaan akan adanya suatu perbedaan belum sepenuhnya nampak dalam sikap dan perilaku pada sebagian besar manusia.
b. Pluralisme semu akan melahirkan sikap mendua atau standar ganda (double standard) dapat berimplikasi pada keretakan hubungan antar umat beragama, yang lambat laun berpotensi melahirkan konflik agama, akibat dari perbedaan antara pendapat yang sering dikemukakan dengan perilaku nyata dalam merespon pluralisme.
c. Pluralisme harus dipahami sebagai betuk kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai suatu kesatuan. Adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu harus diperlakukan sama oleh negara.

d. Konsep pluralisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokrasi dan anti-diskriminasi. Dengan perhatian yang besar terhadap persamaan, maka diskriminasi terhadap kaum minoritas harus ditiadakan. Langkah yang tidak pasti dalam menghubungkan pluralisme dengan anti diskriminasi, akan membahayakan banyak pihak yang mereka jelas-jelas berbeda.

Mendasarkan atas kemungkinan adanya pluralisme semu di tengah-tengah masyarakat, yang esensinya akan membahayakan posisi pluralisme itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya pluralisme semu, dan esensi pluralisme dapat dijalankan pada masyarakat pluralis, maka pemeluk setiap agama harus menyingkirkan padangan eksklusifnya, dan berusaha menerima asumsi-asumsi dari pihak lain. Proses dialogis merupakan langkah untuk mendapatkan kerja sama, meski di antara mereka memiliki agama yang berbeda. Dari sini nampak toleransi dan saling menghargai menjadi titik tekan pluralisme dengan tetap meyakini sungguh-sngguh kebenaran agamanya (Rachman, 2010: 61).

B. Pluralisme dalam Teori dan Praktik

Pluralisme bukan hanya merepresentasikan adanya kemajemukan (suku atau etnik, bahasa, budaya dan agama) dalam masyarakat yang berbeda-beda. Akan tetapi, pluralisme harus memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan, mereka adalah sama di dalam ruang publik. Pluralisme dalam konteks agama, akan terjadi jika para pemeluk agama membuka diri dengan bersedia berdialog secara terbuka. Di antara para pemeluk agama, mereka saling menghormati dan bisa bermitra dengan agama lain.

Dengan merujuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213 (Rachman, 2010: 68) ada tiga fakta penerimaan Islam terhadap pluralisme. Pertama, kesatuan umat di bawah satu Tuhan. Kedua, kekhususan agama-agama yang dibawa para nabi. Ketiga, peranan wahyu dalam mendamaikan

perbedaan di antara berbagai umat beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental Al-Quran yang tidak mengingkari kekhususan berbagai agama dan menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia serta menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Ada beberapa prasyarat yang harus dikedepankan kalau dalam sebuah perbedaan yang sulit untuk dipersatukan dan bisa menjalani sebuah kebersamaan yaitu:

a. Pluralisme agama hanya akan mungkin terjadi, kalau setiap pemeluk agama menyingkirkan pandangan eksklusifnya.
b. Setiap pemeluk agama harus memiliki sifat pluralis "bisa menerima perbedaan dan keragaman" di luar dirinya.
c. Dialog bersama harus dilakukan, guna merespon permasalahan umat.
d. Harus memahami tradisi agama sendiri dan tradisi agama lain.

Dengan demikian, pluralisme agama dalam praktik di Indonesia tidak hanya mengakui adanya keragaman pemikiran, kehidupan, tingkah laku dan perbedaan dalam setiap agama. Jauh lebih penting adalah adanya kesadaran untuk hidup bersama di atas perbedaan dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, ketentraman dan kemanusiaan. Kehidupan sosial yang semakin kompleks, persoalan yang dihadapi pluralisme juga menjadi semakin berat. Pada posisi ini paham pluralis agama bisa menyumbangkan perannya secara nyata di masyarakat.

Paham pluralis memberi ruang terbuka untuk terus melakukan dialog dari berbagai perspektif. Dari sisi yang paling ekstrim pun, paham pluralisme memberi ruang. Oleh karena itu, implementasi paham ini sangat membuka peluang akan lahirnya aliran-aliran baru atau sekte dalam agama. Aliran atau sekte berpeluang muncul dan beresiko juga dimasukkan dalam kategori aliran sesat. Munculnya aliran ini dengan pertimbangan pada aspek:

a. Kelompok pemahaman, keyakinan, dan pengamalan agama, bagian dari satu kelompok agama besar.
b. Biasanya tidak sama dengan pemahaman, keyakinan, dan pengamalan agama pada umumnya.
c. Merupakan kelompok minoritas
d. Dianggap sesat oleh kelompok mayoritas
e. Setiap kelompok agama baru yang berbeda dengan kelompok agama pada umumnya, akan selalu dianggap sesat.
f. Label sesat oleh kelompok mayoritas kepada minoritas
g. Aliran-aliran itu ada dalam setiap agama, dan muncul dalam setiap waktu.
h. Perlu penyadaran terhadap aliran yang dianggap sesat tersebut.

Di luar perimbangan munculnya aliran atau sekte sebagaimana sudah di paparkan di atas, maka secara internal dan eksternal munculnya aliran di Indoneisa lebih disebabkan:
a. Pemaknaan yang berbeda terhadap kitab suci.
b. Pengalaman Spiritual Pelaku.
c. Kurangnya keyakinan (*kurang puas*) terhadap ajaran yang ada (yang diterima dari para tokoh agama pada umumnya).
d. Keterbelakangan, kemiskinan, ketertindasan.
e. Kekurang-pedulian para tokoh agama.Bagi para pengikut, adanya kharisma seorang pendiri yang melebihi para tokoh agama yang ada.
f. Hegemoni kaum mayoritas terhadap kaum minoritas

Ruang kebebasan untuk berekspresi dan pengamalan agama diberikan dalam paham pluralisme. Bahkan sampai munculnya aliran atau sekte dalam agama bukan suatu hal tabu. Oleh karena munculnya aliran dalam agama mendapat kesempatan secara terbuka, maka untuk

antisipasi atas kebebasan tersebut perlu kiranya memberikan sebuah batasan yang bisa dijadikan alasan pembenar untuk memasukkan sebuah aliran dalam kategori sesat dan tidak sesat. Dalam Rakernas MUI 2007 aliran atau sekte akan dikatakan sesat jika:

a. Mengingkari salah satu dari rukun Islam dan rukun Iman,
b. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al Quran dan Sunnah,
c. Meyakini turunnya wahyu sesudah al Quran,
d. Mengingkari otentitas dan kebenaran al Quran,
e. Menafsirkan al Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir,
f. Mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam
g. Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para Nabi dan Rasul,
h. Mengingkari nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir,
i. Mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at, seperti haji tidak ke Baitullah (Mekkah), shalat fardhu bukan lima waktu, dll,
j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan dari kelompoknya.

Meski MUI sudah memiliki beberapa kriteria soal aliran sesat, maka yang perlu diantisipasi adalah klaim penyesatan sering datang dari otoritas yang hanya didasarkan pada sebuah kekuatan dorongan dari pihak luar yang memiliki otoritas. Desakan penyesatan Ahmadiyah yang sampai sekarang tidak memiliki kata akhir, sebuah contoh buram pluralisme di Indonesia.

Pada masa Orde Baru problem pluralisme memang relatif kecil, karena aliran diwadahi dalam aliran kepercayaan,tapi pengikutnya harus

menganut satu agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, dan Budha. Perkembangan semua agama dan aliran kepercayaan saat itu diawasi secara ketat, apalagi yang mrp gerakan protes. Praktis tidak ada lagi berbagai aliran-aliran yang muncul masa Orde Baru

Pada masa reformasi, ketika ruang kebebasan dibuka secara luas, ekspresi orang dalam pengamalan dan pemahaman terhadap agama sering pula di bawa ke ranah publik. Seiring dengan kebebasan dalam bidang sosial dan politik, ternyata membawa implikasi kepada berbagai aspek kehidupan manusia. Keragaman budaya dan tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan, tiba-tiba terbangunkan dari sejumlah persoalan, karena keberadaannya dipersoalkan oleh para penentangnya dari sisi teologis, sehingga harmonisasi budaya dan tradisi menjadi terusik. Padahal dalam prinsip hidup yang faktanya beragam, hal itu semestinya tidak harus terjadi. Namun ini kenyataan, pada masa Reformasi berbagai kelompok sosial, politik, dan agama mudah berdiri, dan sulit dikendalikan dengan dalih sebuah kebebasan. Kasus Al–Qiyadah Al-Islamiyah, Lia Eden, Eyang Subur dan kasus Ahmadiyah, merupakan fenomena keberagaman yang menuai sebuah petaka dari ketidak harmonisan dalam sebuah tatanan kehidupan yang serba plural.

Pada kesempatan lain, kehadiran FPI, MMI, HTI dan MTA seakan tidak dipermasalahkan dalam jagad pluralisme Islam. Menguatnya politik Islam dan gerakan ekstrimis, membawa umat Islam pada kondisi yang disorot kurang memberi kontribusi kepada pluralisme. Bahkan aktifitas politik Islam harus berhadapan dengan sebuah kekuatan global. Gerakan Islam dan politik Islam harus dibawa pada ketundukan untuk memberi dukungan pada demokratisasi. Pilihan-pilihan logis modernisasi yang sudah ada di depan kita, pada akhirnya harus memaksa kita untuk menjadi lebih paham dan lebih mengerti terhadap sebuah perbedaan dan keragaman.

Dengan membuka cakrawala pluralisme sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri adanya, dari sisi positip dapat dipastikan diantara mereka

pasti berkarya menorehkan kreasi dan kreatifitasnya ikut menyokong tegakkanya peradaban Islam. Plurasime yang menjadi bagian dari umat Islam terus bentuk produk peradaban. Oleh karena itu, tidak ada lasan bagi kita, untuk tidak mau mengakui dan menerima pluralisme sebagai bagian dari peradaban Islam kontemporer. []

B A B IX
DAKWAH KULTURAL

Kegiatan dakwah dalam penyebaran agama Islam di Indonesia memiliki posisi sangat strategis, fakta historis menunjukkan Islam bisa diterima oleh masyarakat dan menyebar ke berbagai daerah, bukan melalui jalan intimidasi, peperangan atau tindak kekerasan, melainkan disampaikan melalui cara-cara damai dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh juru dakwah secara berkesinambungan.

Pada fase awal sejarah perkembangan Islam, juru dakwah yang terdiri dari saudagar Islam Gujarat dan diteruskan pada masa Wali Songo khususnya di tanah Jawa, para juru dakwah nampak dengan gigih melakukan akulturasi dengan budaya setempat, sehingga memudahkan langkah untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk mau menerima Islam, terlebih setelah para penguasa lokal (raja) selaku panutan masyarakat memeluk agama Islam. Masuknya elit masyarakat kepada agama Islam ini, menjadi faktor penting dalam proses penyampaian ajaran Islam, dan perluasan sebaran dakwah kepada masyarakat.

Penyebaran agama Islam oleh juru dakwah dilakukan dalam bentuk pengajian-pengajian terbatas, pengajian bimbingan keagamaan di mushala dan di masjid, atau lewat lembaga pendidikan di madrasah-madrasah, dengan tipe yang sangat sederhana. Justru dari kesederhanaan gerakan dakwah inilah para juru dakwah dan guru ngaji tiada berhenti menyampaikan dakwah, hasilnya secara kualitas dan kuantitas Islam berkembang dibarengi dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian berkembangan di berbagai tempat.

Penyebaran Islam kepada masyarakat di Jawa, jika ditarik dalam konteks historis sebagaimana ditulis Nur Syam, tidak bisa lepas dari peran para Wali atau dalam konstruksi pemahaman masyarakat sering disebut dengan Wali Songo. Para wali ini awalnya mengembangkan Islam di daerah sekitar tempat tinggalnya, sehingga ada nama-nama wali yang melegenda dengan tempat tinggal dan tempat makamnya. Ada Sunan Ampel menyebarkan Islam di Surabya dan sekitarnya, Sunang Bonang di Tuban, Sunan Giri berdakwah di daerah Giri, Sunan Drajat di Drajat, Sunan Muria di daerah Muria, Sunan Kudus di daerah Kudus, Sunan Kalijaga di Kadilangu dan sekitarnya dan Sunan Gunung Jati di daerah Ceribon dan kota-kota sekitarnya. Disamping mereka berdakwah di tingkat lokal, kegiatan dakwah antar daerah juga sudah dilakukan, misalnya Sunan Giri menyebarkan Islam hingga di wilayah Hitu Ambon (Nur Syam, 2005: 71).

Sejarah dakwah para wali yang membangun basis gerakan di tingkat lokal, kalau kemudian dikontekskan pada era kekinian, bisa menginspirasi lahirnya gerakan dakwah di masyarakat dengan berdirinya majelis ta'lim atau kelompok pengajian yang pengelolaannya bersifat tradisional dengan mengikuti kehendak guru ngaji, baik dari sisi penentuan pesan maupun metode dakwah yang diterapkan. Penyampaian ajaran Islam oleh juru dakwah ini tidak lepas dari perintah Allah kepada umat Islam mau menjalankan perintah terlibat langsung dalam proses menyebarkan agama Islam, seperti tercantum dalam surat An-Nahl ayat 125:

> "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk."

Dengan adanya perintah dakwah ini, mendorong umat Islam berlomba-lomba menyelenggarakan kegiatan dakwah, baik dakwah dalam skala kecil maupun dakwah di lingkup yang besar. Para penyeru agama Islam ini, berjuang tak kenal lelah siang dan malam. Mereka

rela berkorban dengan jiwa, raga dan hartanya untuk penyebaran Islam dan kemajuan umat Islam. Tidak berlebihan jika para juru dakwah ini kemudian mereka mendapat sebutan sebagai umat terbaik dalam kaca mata Al-Qur'an.

Sandaran utama mereka berdakwah adalah mencari keridlaan Allah, dan wajar kalau kemudian mereka oleh Allah ditempatkan pada posisi mulia menjadi orang yang beruntung. Alasan sosiologis dan teologis ini benar-benar menjadi kekuatan untuk menggerakkan orang mau melangkah berdakwah, menyebarkan Islam, dan mereka mau mengelola pengajian sebagai langkah strategis membimbing umat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104: "*Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.*"

Melihat begitu strategisnya gerakan dakwah Islam, dan begitu mulia para pelakunya dalam penyebaran agama Islam, maka hampir semua umat Islam dengan segala kemampuannya sampai sekarang masih tetap gigih dengan suka rela menyelenggarakan kegiatan dakwah di lingkungan masing-masing. Begitu semangatnya mereka dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah, sampai-sampai dalam setiap gerakan dakwah sudah tidak lagi memperhatikan apakah harus mengedepankan strategi dakwah dengan metode penyiaran atau melakukan dakwah dengan metode pembinaan umat. Mengambil peran penting dalam penyiaran ajaran Islam atau melakukan pembinaan umat menuju kondisi umat menjadi yang terbaik (khoiru ummah) merupakan tindakan mulia. Langkah teknis dalam gerakan dakwah yang menjelma dalam kelompok-kelompok pengajian atau model lain, jelas merupakan usaha para juru dakwah memfasilitasi kemauan masyarakat, untuk memahami ajaran Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

Efektifitas gerakan dakwah dengan pendekatan kultural menjadi hal penting untuk dipertimbangkan, dalam setiap upaya membawa

perubahan umat menjadi lebih baik. Keberhasilan itu tentu memiliki relevansi antara kegiatan dakwah yang diberikan kepada masyarakat dengan realitas sosial yang menjadi lebih baik dalam hal penguasaan pemahaman, dan pengamalan ajaran agama Islam sebagai hasil dari kegiatan dakwah. Kerja dakwah dan pembinaan umat, dalam kaitan ini akan menjadi penuntun dari setiap kegiatan yang bercita-cita yaitu membangun dan mengangkat harkat dan martabat umat, baik dari sisi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

A. Konsep Dakwah Kultural

Kata dakwah secara etimologi memiliki arti dorongan, seruan dan ajakan. Sedang secara terminologi dakwah dapat dipahami secara beragam dari berbagai sudut pandang. Meski memiliki keberagamaan makna dakwah dari sisi terminologi, tetap saja pemaknaan itu bermuara pada sebuah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang da'i kepada umatnya agar menjadi lebih baik.

Hamzah Ya'qub memaknai dakwah Islam dengan mengajak umat manusia dengan lisan maupun tulisan secara hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya (Ya'qub, 1981: 52). Sedang Thoha Jahya Omar memaknai dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Omar, 1971: 1).

Dengan mengacu pada kajian di atas, istilah dakwah memberi pemahaman tentang aktivitas orang atau kelompok orang untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, demi tegak dan terlaksanannya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Seperti sudah dipaparkan di awal pembahasan, bahwa dakwah merupakan ajakan, seruan atau dorongan (Muhtarom, 1996: 14).

Sudah jelas yang dimaksudkan adalah mengajak, menyeru dan mendorong orang kepada kebaikan sebagaimana sudah diajarkan dan

digariskan oleh agama Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis nabi Muhammad Saw. Dakwah sebagai gerakan memiliki relevansi dengan aktivitas kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Dakwah juga diartikan mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran Islam dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Helmy, 1973: 31).

Konsep dakwah menurut Asmuni Syukir mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara bijaksana, nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula (Syukir, 1983: 19). Gagasan pemikiran ini dengan merujuk dalam QS an-Nahl 125 artinya: *"Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Rumusan dakwah Syamsuri Siddiq dengan memberikan batasan tentang segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam wujud sikap, ucap dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan baik langsung atau tidak langsung yang ditujukan kepada orang-perorangan, masyarakat maupun golongan supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajaran Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Siddiq, 1993: 8).

Pada akhirnya kata dakwah dapat dirumuskan sebagai usaha berupa aktifitas guna penyampaian ajaran Islam dengan menggunakan metode yang baik, agar masyarakat sebagai sasaran dakwah dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penggunaan metode dakwah tentu disesuaikan dengan kondisi mad'u atau obyek dakwah, kemampuan pelaku dakwah dan tujuan dakwah yang sudah dirumuskan pada level individu juru dakwah atau rumusan secara kolektif kelembagaan.

Dalam perkembangan kajian dakwah, memang tidak saja berputar pada persoalan proses penyampaian pesan dari juru dakwah

kepada jama'ah. Dakwah harus dimaknai sebagai proses penyadaran dan mendorong masyarakat agar mau berpikir dan bertindak mengubah dirinya sendiri lebih maju. Inti gerakan dakwah menurut Didin Solahudin dan Ahmad Sarbini merupakan upaya penyadaran masyarakat agar mau berpikir dan bertindak. Dakwah bukan semata-mata kegiatan penyampaian atau mengindoktrinasi kepada sesama mengenai kandungan-kandungan ajaran Islam, melainkan suatu gerakan penyadaran masyarakat untuk melakukan perubahan. Paradigmanya juga mengalami perubahan, masyarakat ditempatkan sebagai subyek dakwah bukan obyek, sementara juru dakwah diposisikan sebagai fasilitator sebuah perubahan (Solahudin, 2014: 13).

Keberadaan juru dakwah pada tingkatan ini memang dituntut mampu menjadi mitra bagi jama'ahnya. Juru dakwah tidak saja diberi tugas menjadi penceramah atau guru ngaji, melainkan harus pula mampu membumikan ajaran Islam menjadi lebih mudah dipahami dan diamalkan baik dalam koredor ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, posisi kegiatan dakwah satu sisi harus memahamkan jama'ah tentang ajaran Islam agar mereka lebih mengerti dan memahaminya, tapi di sisi yang lain kegiatan dakwah juga harus menuntun dan membimbing jama'ahnya untuk lebih berdaya dilihat dari berbagai sisi kehidupan.

Kajian dakwah ini akhirnya membuka spektrum yang amat luas, dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan beragam profesi, karena kenyataannya dakwah meliputi banyak hal dan harus menjawab sejumlah permasalahan yang ada di masyarakat. Dakwah tidak sebatas ladang kegiatan orang-orang ahli ceramah, akan tetapi aktifitas dakwah sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu agama atau tenaga profesional lain yang mau menjadi pembimbing setia jamaah. Dengan ruang gerak dakwah yang sangat luas ini, maka juru dakwah dituntut mampu menjadi pengendali jamaah, memecahkan masalah yang ada dan sekaligus menjadi mitra dalam rangka mewujudkan

kondisi umat yang maju, dinamis dan berkembang menjadi lebih baik. Tatanan masyarakat baru dalam kegiatan dakwah ini yang oleh Hasan al-Bana disebut sebagai tujuan dakwah dengan rumusannya menjadikan masyarakat berkeadilan sosial dengan tatanan ekonomi yang mantap (Sufri, 2000: 446).

Setelah kita pahami konsep dakwah baik secara etimologi maupun terminologi, yang ternyata semua mengarahkan pada adanya sebuah perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Proses dakwah dikatakan berhasil, jika dari sebuah proses dakwah mampu membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik, dan dakwah akan dinilai gagal jika dari kegiatan dakwah itu tidak mampu melakukan perubahan masyarakat sasaran dakwah menjadi lebih baik. Dengan mengetahui posisi demikian, maka selanjutnya pembahasan akan dikontekstualisasikan dengan aspek kultural sebagai sebuah pelaksanaan dakwah di masyarakat. Karena masyarakat sebagai sasaran dakwah kenyataannya sudah memiliki kebudayaan dan tradisi sendiri, ketika mereka belum mengenal Islam.

Setiap kegiatan dakwah akan selalu berhadapan, bertemu, bersinggungan dan bergulat dengan multikultur masyarakat dimana dakwah itu dilaksanakan. Begitu juga hasil dari kegiatan dakwah, pengaruh kultur masyarakat masih sangat terasa dalam kehidupan keagamaan. Kondisi saling mempengaruhi ini memang benar adanya, yang perlu dijaga dalam hubungan timbal balik ini adalah prinsip teologi tidak boleh dilanggar. Setiap budaya atau tradisi masyarakat yang masih menjaga dan mengakui atas keberadaan Allah, bukan menjadi penghalang untuk mengikuti proses dakwah yang akhirnya menemukan tujuan bersama yaitu sebuah kebudayaan Islam.

Masih kuatnya tradisi kejawen di kalangan muslim Jawa, tidak lepas adanya persinggungan antara dakwah Islam dan tradisi masyarakat Jawa yang sangat beragam. Posisi budaya dan tradisi menjadi posisi strategis bagi pintu masuknya Islam kepada masyarakat. Dengan demikian, dakwah

kultural secara sederhana bisa dipahami sebuah aktifitas dakwah yang menggunakan pendekatan kultur yang ada di masyarakat. Paparan ini sekaligus akan mengerucutkan pemaknaan dakwah kultural pada setiap aktifitas dakwah yang memanfaatkan tradisi, adat-istiadat (kebiasaan), seni, kegemaran-kegemaran masyarakat (Sukriyanto, 2002: 120-121).

Paparan pemikiran dan kajian dakwah termasuk di dalamnya dakwah kultural menempatkan wilayah dan cakupan dakwah menjadi lebih luas dan persoalan yang dihadapi juga menjadi lebih rumit. Dakwah Islam tidak semata-mata sebuah proses penyampaian ajaran Islam secara terbuka kepada masyarakat, melainkan dakwah harus bersentuhan dengan persoalan kemanusiaan dengan kerumitan persoalannya, dakwah berhadapan dengan kebudayaan dan dakwah juga berhadapan dengan tradisi masyarakat. Khusus soal kebudayaan dan tradisi ini, ada yang harus dikembangkan dan diperbaharui agar tidak berseberangan dengan Islam, dan memang ada yang harus dihapuskan karena memang tidak bisa diterima oleh Islam dan kondisinya juga tidak bisa diperbaharui secara Islami.

Istilah Islamisasi kebudayaan dan tradisi dalam gerakan dakwah, menunjukkan bahwa produk budaya dan tradisi masyarakat itu masih bisa diadaptasi dan diakulturasi, sehingga keberadaan kebudayaan dan tradisi setelah diperbaharui posisinya tidak lagi bertentangan dengan prinsip tauhid. Kebudayaan dan tradisi masyarakat yang sudah mengalami proses Islamisasi, keberadaannya sudah menjadi bagian dari kebudayaan Islam dan eksistensinya harus kita jaga bersama.

B. Gerakan, Arah dan Tujuan Dakwah Kultural

Aktifitas dakwah memiliki ragam tujuan sesuai dengan latar belakang dan misi penyelenggaraan dari kegiatan dakwah. Dalam kegiatan Dakwah sudah tentu mengandung unsur adanya seorang juru dakwah (da'i), orang yang menerima (mad'u), adanya pesan dakwah, media dakwah, adanya metode dan terakhir adanya tujuan dakwah. Tujuan

adalah menyampaikan kebenaran ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan mengajak manusia mengamalkan ajaran Islam. Tujuan dakwah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan materi dan obyek dakwah (Amin, 1980:168-179).

M. Masyhur Amin dalam *Metode Dakwah dan beberapa Kumpulan Peraturan Tentang Aktifitas Keagamaan* dilihat dari aspek tujuan obyek dakwah ada empat tujuan yang meliputi: *pertama*, tujuan perorangan, terbentuknya pribadi muslim yang taat kepada Allah dan berakhlak mulia; *kedua*, tujuan keluarga yaitu terbentuknya keluarga sakinah; *ketiga*, tujuan untuk masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera dan Islami; *keempat*, tujuan manusia sedunia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian, ketenangan serta tegaknya keadilan tanpa adanya diskriminasi dan eksploitasi.

Sedang tujuan dakwah dilihat dari aspek materi, menurut Masyhur Amin ada tiga tujuan yang meliputi: *pertama***,** tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-tiap manusia, *kedua***,** tujuan hukum, aktifitas dakwah bertujuan terbentuknya umat manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt, *ketiga***,** tujuan akhlak, yaitu terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah (Amin, 1980: 24-25).

Dari keseluruhan tentang kajian tujuan dakwah yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan tujuan dakwah dalam Islam merupakan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang langsung bersinggungan dengan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah terjadinya kemungkaran sebagaimana dalam hadits Nabi: "Barang siapa diantara kamu sekalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila tidak mampu maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya, bila ia tidak mampu maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman." (Bahreisy, 1981: 189).

Hadits Nabi ini menjelaskan betapa pentingnya mencegah sebuah kemunkaran agar tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini artinya bahwa aktifitas dakwah harus mampu menciptakan masyarakat dalam situasi damai, tidak diliputi kecemasan akibat dari kemunkaran baik dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun kemungkaran dari sisi agama. Konsep dakwah yang ditawarkan Al-Qur'an yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman tanpa konflik, karena dakwah memiliki sifat universal, tidak didasarkan pada fanatisme golongan atau kedaerahan (etnisitas), menekankan pada perikemanusiaan dan proporsional, dan Islam adalah agama yang menyelamatkan seluruh umat manusia (Az-Zuhaili, 1996: 198).

Eksistensi dan penyebaran Islam dengan mendasarkan fakta historis menempatkan aktifitas dakwah memainkan peran strategis dari dulu hingga sekarang. Dengan melihat begitu banyaknya aktifitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan di masjid, di lembaga-lembaga keagamaan, dan pada kelompok-kelompok kecil di masyarakat, hal ini menandakan bahwa keberadaan kegiatan dakwah masih mendapat respon positip dari masyarakat. Meski kegiatan dakwah sangat banyak jumlahnya, kalau dilihat dari sisi tujuannya relatif memiliki kesamaan yaitu memberi bimbingan, tuntunan dan pengajaran agama Islam kepada masyarakat (Sarbini, 2014: 86).

Ada sejumlah problem dari dakwah kultural, jika proses dakwah tidak bisa dilaksanakan dengan tuntas. Lain halnya kalau dakwah yang dilaksanakan bisa tuntas tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan dakwah kultural di masyarakat: Pertama, bercampurnya ajaran agama dengan budaya (tradisi), sehingga sulit dibedakan antara agama dan budaya. Kedua, budaya seringkali mewarnai ajaran Islam yang dipahami oleh masyarakat. Ketiga, budaya dianggap sebagai ajaran agama atau sebaliknya, agama dianggap sebagai budaya. Keempat, agama tidak dipahami sebagaimana mestinya. Begitu kulturalnya, sehingga

seseorang kurang adanya semangat mengkaji kembali Islam yang benar, dan terpeliharanya apa yang sering disebut "Islam Abangan" di tengah masyarakat.

C. Landasan Dakwah Dakwah Kultural

Setiap kita berpikir, setiap kita bersikap dan berbuat tentu tidak bisa lepas dengan sebuah prinsip dasar yang mengkerangkainya. Begitu juga kita melakukan dakwah dengan pendekatan kultural, tentu memiliki landasan dasar sebagai basik gerakan. Landasan teologis dalam gerakan dakwah akan menjadi arahan dalam pelaksanaan dakwah kultural, agar kegiatan yang dilaksanakan memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Prinsip ini dapat dilacak dari landasan yang bisa dipakai ketika dakwah kultural menjadi sebuah pilihan dakwah, dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan ayat-ayat dakwah yang bisa dijadikan landasan teologis bagi dakwah kultural.

1. Dakwah Sebuah Perintah Agama

Dakwah kultural sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dakwah pada umumnya, hanya model dan pendekatan yang dipakai dalam melaksanakan dakwah yang berbeda. Pada posisi dakwah kultural, kita diperintahkan untuk mau mengajak kepada umat Islam selalu berada di garis depan dalam kegiatan dakwah. Tampilnya orang-orang yang mau menjadi juru dakwah ini, oleh Allah akan diberi penghargaan menjadi orang yang beruntung. Sungguh Allah telah memotivasi nabi Muhammad dan umatnya untuk mau menjadi manusia terbaik itu, sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran 104. *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"*.

Motivasi Al-Qur'an ini mendorong kepada kita dengan sebuah harapan akan pemberian Allah berupa nilai-nilai kebaikan. Bagi

orang-orang yang memiliki kemampuan dan mau menjadi orang yang beruntung, menjadi juru dakwah adalah sebuah pilihan pemenuhan atas perintah Allah. Tentu ayat ini memiliki daya penggerak kepada setiap umat Islam untuk menjadi juru dakwah profesional dan memiliki militansi yang cukup tinggi. Orang-orang yang berada di garda depan menyampaikan ajaran Islam, atau bahkan rela membela umat untuk mengembangkan dan mempertahankan aqidah Islam, mereka oleh Allah dijanjikan keberuntungan.

2. Dakwah dengan Hikmah

Dakwah kultural menitik beratkan pada aspek hikmah "bijaksana" dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dakwah. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dakwah menjadi senang, mudah menerima dan mudah pula mengamalkan anjuran-anjuran yang disampaikan juru dakwah. Persoalan-persoalan prinsip yang menyangkut harkat dan martabat manusia dielaborasi sedemikian rupa, sehingga materi yang menyangkut pribadi dengan pendekatan hikmah mereka tidak merasa tersinggung dan tidak menimbulkan kemarahan, termasuk dalam hal pembenahan dan pembaharuan kebudayaan dan tradisi mereka yang selama ini dijalani secara turun-temurun.

Kegiatan dakwah ini mengasumsikan adanya penghargaan kepada masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan dan tradisi sendiri, sehingga tidak terjadi ketegangan antara juru dakwah selaku penyampai ajaran Islam dengan masyarakat selaku pemegang tradisi. Oleh karena itu, ukuran dakwah dikatakan bijaksana, jika dalam pelaksanaan terkandung tiga unsur yaitu dakwahnya menggunakan pendekatan bijaksana, pelajaran yang baik dan ada dialog atau perdebatan. Metode dakwah ini berdasarkan Q.S. An-Nahl 125:

> "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk."

3. Tidak Ada Paksaan dalam Dakwah

Kesadaran adalah prinsip yang harus dibangun dalam setiap kegiatan dakwah yang menggunakan pendekatan kebudayaan, adat-istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan dakwah tidak boleh ada paksaan, tekanan dan intimidasi. Proses penyadaran yang harus dikedepankan, sehingga orang memilih agama Islam memang atas dasar kesadarannya sendiri, bukan atas dasar dakwah dengan paksaan atau intimidasi.

Hadirnya umat dengan pilihan sadar mau memeluk dan menjalankan ajaran Islam menjadi prioritas dalam dakwah kultural. Kalau pun terjadi pelurusan dan pembenahan atas budaya dan tradisi yang dinilai menyimpang dari prinsip ajaran Islam, dilakukan masih dalam kategori kasih sayang dan persaudaraan sebagai sesama muslim. Penekanan pelaksanaan dakwah yang dilaksanakan dengan santun dan tidak memaksa ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah 256:

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bukhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

4. Prinsip Kebersamaan Bukan Perselisihan

Nilai-nilai kebersamaan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan dakwah Islam, bukan mengeksplorasi perselisihan di antara umat yang secara fisik memang sudah memiliki banyak perbedaan.

Islam tidak membenarkan adanya perselisihan, pertengkaran dan tindak kekerasan yang dipicu oleh gara-gara hal kecil, yaitu terjadinya saling mengolok-olok. Karena orang yang diolok-olok memiliki kecenderungan untuk membalasnya, dan pasti di dalamnya timbul sakit hati. Orang yang dicederai perasaan dan hatinya, sedikit banyak akan menjadi penyebab disharmonis dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang kepada juru dakwah dan umatnya melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengolok-olok atas kekurangan orang lain. Larangan Allah terhadap perilaku tidak baik berupa saling mengolok-olok terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat 11:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sutau kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokan) dan janganlah pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

D. Model Dakwah Kultural

Ada pemaknaan yang harus dikedepankan dalam mengkaji dakwah kultural ini, meski pada pembahasan di atas sudah disinggung tentang pendekatan dakwah kultural. Proses pelaksanaan penyampaian ajaran Islam bisa dengan menempatkan aktifitasnya menginspirasi bagaimana Al-Qur'an merespon kondisi sosio-kultural masyarakat yang sudah lebih dulu mapan. Ada beberapa pilihan, mulai dari pengakuan, pembaharuan hingga pengharaman. Pilihan terakhir ini karena memang sosio-kultural yang dimiliki masyarakat sudah melanggar prinsip-prinsip agama Islam.

Dengan kajian ini paling tidak ada tiga perspektif, yaitu dakwah dengan mengikuti alur budaya, dakwah dengan media budaya, dan dakwah mengangkat tema-tema budaya.

1. Dakwah Mengikuti Alur Budaya

Pelaksanaan dakwah model ini da'i selaku aktor dalam berdakwah harus membaur dengan masyarakat, dan berpartisipasi aktif mengikuti alur budaya masyarakat. Karakter personal tampil dengan kuat pada model dakwah ini. Oleh karena itu, sejak awal proses dakwah sudah menyadari akan adanya subyektifitas dalam dakwah.

Subyektifitas dakwah yang berpeluang muncul dalam setiap gerakan dakwah model ini adalah subyektifitas pemahaman Islam pada diri da'i. Subyektifitas pemahaman terhadap Islam ini sebenarnya memiliki akar kesejarahan yang cukup panjang. Melembaganya firqah dan aliran-aliran dalam Islam juga tidak lepas dari persoalan kepemilikan subyektifitas pemahaman ajaran Islam.

Ada kecenderungan dan kesukaan secara subyektif dalam pemilihan materi dakwah yang akan disampaikan kepada jamaah. Subyektifitas materi yang dipilih untuk disampaikan ini memang tidaklah mutlak, karena ruang untuk mendialogkan materi memang masih terbuka, tapi dengan adanya kekuatan subyektifitas juru dakwah, akhirnya jamaah menjadi lentur mengikuti arah juru dakwah.

Penggunaan metode dakwah pada model dakwah ini posisi juru dakwah memang memiliki otoritas dan itu menjadi wilayah subyektifitas masing-masing juru dakwah. Hanya saja metode yang dipilih untuk menyampaikan ajaran Islam benar-benar sudah didasarkan kepada kemampuan karakter juru dakwah yang disesuaikan dengan masyarakat penerima dakwah.

2. Dakwah dengan Media Budaya

Paradigma budaya sebagai media dakwah, pemikiran kita tentang pelaksanaan dakwah akan menjadi lebih fleksibel dan jangkauan dakwah menjadi lebih luas. Budaya dan tradisi masyarakat yang bisa dijadikan media dakwah jumlahnya sangat banyak. Prinsip umum memang semua budaya dan tradisi bisa dijadikan media dakwah, namun dalam praktik di medan dakwah ada standar normatif yang dijadikan acuan yaitu dipakainya prinsip tauhid dalam kebudayaan dan tradisi masyarakat.

Dakwah dengan media budaya menjadi lebih menarik dan banyak diminati jama'ah, karena memang berangkat dari apa yang dimiliki dan senangi masyarakat. Pada masa Islamisasi masyarakat Jawa, ada sosok ulama kharismatik, budayawan dan seniman yang masuk jajaran wali songo dan mampu dengan piawai berdakwah dengan pendekatan budaya yaitu Sunan Kalijaga.

Sunan Kalijaga sebagai seorang pujangga, seniman dan budayawan memang banyak menciptakan kreasi seni. Dalam bidang kebudayaan, Sunan Kalijaga sebagai pencipta budaya yang kreatif dan produktif. Bersama Sunan Bonang berhasil memodifikasi lakon wayang sesuai lakon Islam dan untuk kepentingan dakwah, seperti lakon Dewa Ruci, Wahyu Makuto Rama dan hadirnya punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dalam setiap pertunjukan wayang sebagai pengiring perjalanan Pandawa Lima merupakan murni kreasi dua wali Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang.

Karakter multi segmen Sunan Kalijaga menjadikannya dia bisa berdakwah di berbagai kalangan, mulai dari kaum santri berbasis di masjid atau langgar, kaum petani dengan filosofi pertanian, terlebih dakwah di kalangan kaum seniman dan budayawan. Dihadirkannya gamelan dan gending-gending Islami menunjukkan sosok Sunan Kalijaga memiliki kedalaman filsafat, wawasan sosial, seni budaya yang mumpuni, dan kealiman dibidang ilmu dan ketiggian spiritual (Suprapto, 2009: 764-765).

Dakwah dengan menggunakan kebudayaan dalam konteks kekinian, ada fenomena kiai Kanjeng dengan tokoh sentralnya Emha Ainun Najib yang ternyata dalam setiap dakwahnya mampu menyedot partisipasi masyarakat dalam jumlah besar baik dakwah yang sifatnya rutin maupun temporal atas permintaan masyarakat dengan momentum tertentu. Gejala munculnya kegemaran masyarakat dengan dakwah yang menggunakan media budaya dari masa lalu hingga masa kini, menandakan bahwa pintu masuk dakwah menjadi lebih luwes dan mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Dakwah dengan media budaya bisa mempertemukan antara kepentingan syiar dan kepentingan penanaman nilai-nilai Islam satu sisi, dan pada sisi yang lain memang masyarakat memiliki watak dasar mencintai budaya dan kesenian, sehingga kebudayaan dan kesenian ini tumbuh subur di masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa dakwah dengan pendekatan budaya lebih diterima masyarakat, terutama masyarakat "santri dan abangan" yang keberadaan mereka tidak pernah menyoal Islami dan tidak Islaminya sebuah kebudayaan dan tradisi masyarakat.

3. Dakwah dengan Tema Budaya

Pelaksanaan dakwah kultural pada tataran implementasi selanjutnya bisa diwujudkan dengan tema kajian tentang budaya atau tradisi, agar budaya dan tradisi bisa dipahami dengan baik. Karena faktanya masih banyak nilai-nilai budaya dan tradisi yang belum tersentuh juru dakwah dalam mengisi pengajian di masyarakat, sehingga kebudayaan dan tradisi yang ada masih menjadi silang pendapat di tengah-tengah masyarakat. Budaya masa lalu sebagai hasil kreasi dan dinamika Sunan Kalijaga dalam memahamkan Islam kepada masyarakat, juga masih banyak yang belum dipahami dengan baik.

Filosofi bedug dan kentongan yang ada di masjid-masjid menjadi produk budaya yang dikesampingkan dan digantikan dengan budaya

moderen berbasis elektronik. Belum lagi dolanan anak-anak, dan gending-gending yang dicipta untuk mendekatkan kepada umat untuk penyampaian ajaran Islam juga sudah banyak dilupakan orang. Konsep tata kota, dimana selalu ada kantor tata pemerintahan, masjid, alun-alun, penjara dan pasar merupakan kerangka filosofis yang harus tersampaikan kepada umat sebagai hasil kreasi para wali, agar tidak terhenti pemaknaannya pada sisi keindahan semata (Suprapto, 2009: 765).

Dengan begitu menariknya ajaran budaya dan tradisi yang dikupas sampai ke dataran filosofis, maka menjadi alasan akan pentingnya tema-tema budaya atau tradisi menjadi materi kajian dakwah kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat kita tidak terasing dengan budaya dan tradisinya sendiri. Pemahaman dengan baik terhadap budaya dan tradisi sendiri tersebut, kita tidak cepat menyalahkan budaya dan tradisi yang ada. Pengukuhan berbagai budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam merupakan tugas dakwah kultural. Tugas mengislamkan budaya dan pikiran sesat dalam melihat budaya dan tradisi kita, merupakan tugas mulia dari setiap juru dakwah. []

BAB X
INTERAKSI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL

Pada pembahasan ini, penulis mengajak pembaca untuk merekonstruksi pemikiran dengan melihat latar belakang sosio-budaya masyarakat, baik dalam konteks masyarakat Arab untuk menjelaskan bentuk interaksi Islam pertama kali bersama Nabi, maupun masyarakat Indoneisa lebih khusus masyarakat Jawa untuk memastikan bagaimana Islam melakukan interaksi. Dengan melihat latar belakang adanya interaksi Islam dengan sosio-kultural masyarakat, paling tidak akan membuat kita menjadi lebih bijak dalam merespon tata kelola budaya dan tradisi di masyarakat.

Praktik Islamisasi di Arab yang langsung dilaksanakan nabi Muhammad, satu sisi Islam menunjukkan ketegasannya kepada budaya lokal dan tradisi, namun pada sisi yang lain Islam menunjukkan sikap akomodatifnya. Dua model interaksi yang berbeda ini lebih disebabkan oleh faktor yang menyangkut prinsip dasar ajaran tauhid dan praktik budaya lokal itu sendiri. Oleh karena standarnya adalah normatif dan sosiologis, maka dalam perjalanan interaksi Islam dan budaya lokal menunjukkan dinamikanya. Agama Islam ketika memasuki kawasan baru, seperti di Indoneisa dan lebih-lebih Jawa yang kaya akan tradisi dan ritus-ritus pada awal penyebaran Islam tentu jejaknya masih bisa kita lacak dan identitfikasi.

Langkah interaksi dengan mengedepankan prinsip tauhid, membuat kita harus lebih cermat dalam menganalisis produk budaya dan tradisi masyarakat, karena budaya dan tradisi masyarakat yang tidak

memiliki watak kontradiksinya dengan tauhid tidak perlu direspon berlebihan apalagi sampai ke tingkat pengharaman dan pemusnahan. Sebaliknya, tradisi-tradisi yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dan norma Islam yang lain, maka Nabi sendiri sudah memberikan contoh ada budaya yang harus dihapuskan dan dilarangnya. Penyembahan berhala-berhala, minum-minuman keras, merendahkan martabat perempuan, menjadi tidak berlaku dan Islam tidak menunjukkan sikap adaptifnya. Sikap penghapusan dan pelarangan dengan tegas ini bisa menjadi ukuran, bagaimana Islam harus mereformasi budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.

Islam memberikan pilihan dan arahan kepada umatnya untuk menjalani dan memegangi agamanya dengan teguh dalam level individu dan sosial. Berkaitan dengan ini Allah telah menurunkan ayat-Nya dalam surat Ali-'Imran ayat 102-103:

> "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."

Pesan ayat ini sudah sangat tegas, prinsip keimanan tidak boleh goyah dan Islam harus menjadi pegangan agar hidup menjadi lebih terarah dan menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Pintu keselamatan sudah pula ditunjukkan dengan melalui ayat-ayat Allah, maka manusia haruslah mau melakukan perenungan, biar dalam perjalanan perenungan kita mendapat pertolongan dan petunjuk-Nya. Tidak bisa dipungkiri, ada

langkah-langkah yang bisa menggelincirkan manusia ke dalam neraka, tapi dengan petunjuk Allah manusia bisa selamat meski sudah berada di tepi jurang neraka. Inilah kebesaran Islam dan ini pula kemurahan dan kasih sayang Allah untuk umat manusia yang kaya dengan budaya dan tradisi sebelum Islam datang.

Sebelum kajian lebih lanjut tentang interaksi Islam dengan budaya lokal, maka penting kiranya pada pembahasan ini memaparkan setting sosial masyarakat sebagai titik masuk kajian tentang interaksi Islam. Langkah ini dianggap penting, agar budaya lokal masyarakat bisa didudukan secara bijak ketika harus disandingkan dengan ajaran Islam sebagai basis interaksi.

A. Sejarah Budaya Lokal Bangsa Arab

Ada dua perspektif yang penting dikemukakan dalam melihat budaya lokal masyarakat Arab sejak sebelum dan sesudah masa penyebaran Islam. *Pertama*, agama Islam merupakan agama terakhir dalam proses kenabian. Statemen ini menunjukkan tidak akan ada nabi lagi setelah kerasulan Muhammad, sehingga Islam merupakan agama paripurna. Tidak saja dari aspek sistem kepercayaan dan universalitas normatifnya, tapi juga dari aspek kejelian dan ketelitian Islam dalam menata kehidupan termasuk dalam merespon soal budaya lokal masyarakat. *Kedua*, kondisi peradaban Arab sebelum Islam dari aspek teologis dan sistem sosial kemanusiaan sudah berada di titik nadir "jahiliyah" yang perlu direkontruksi karena budaya masyarakat sudah melenceng jauh dari prinsip ketauhidan dan ajaran Islam.

Dengan mengetahui setting sosio-kultural masyarakat tersebut, bahwa kita menjadi paham sejak awal Islam sudah berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Arab yang lengkap dengan kondisi budaya positif dan negatif. Dalam proses interaksi dan menjaga kesinambungan sebuah budaya lokal, maka pada batas-batas tertentu memang harus

dijaga keberadaannya untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan fitrah manusia dan memajukan kebudayaan. Dari semua kebudayaan dan tradisi masyarakat Arab, setelah berinteraksi dengan Islam, pada akhirnya memang tidak semua budaya dan tradisi lokal masyarakat Arab bisa diadaptasikan dengan Islam. Oleh karena itu, Islam dengan panduan Al-Qur'an memberikan arahan dengan sangat jelas, sehingga secara terbuka dinyatakan ada budaya lokal yang bisa diterima Islam, dan ada budaya yang harus ditolak karena memang keberadaannya bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam.

Model interaksi Islam dengan budaya lokal pada fase pertama mencapai puncak kesempurnaannya adalah pada masa pembentukan negara Madinah. Kehadiran nabi Muhammad di Madinah tidak semata-mata dimaknai secara pendekatan agama, tapi sudah melalui pendekatan multi fungsi, nabi sebagai tamu yang harus dilindungi, sebagai utusan Allah yang harus dihormati dan dipatuhi, dan nabi sebagai pembaharu sistem sosial dan kultural di masyarakat. Multi perspektif juga diimplementasikan nabi dalam mengembangkan dan mengelola masyarakat Madinah, penghargaan terhadap budaya lokal menjadi prioritas sehingga kedatangan Islam tidak menjadi ancaman, justru kedatangannya sangat diharapkan. Kondisi interaksi nabi dengan masyarakat lokal Madinah ini akan menjadi acuan dalam pembahasan, kajian interaksi Islam dengan budaya lokal di Indonesia.

B. Sejarah Islam dan Budaya Lokal di Indonesia

Paparan kondisi sosio-kultural masyarakat Arab dilihat dari sisis tantangan penyebaran Islam dan interaksi Islam dengan budaya lokal, problematika yang dihadapi juru dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesai sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena dalam sosio-kultural masyarakat Indonesia kondisinya sama, ada yang bisa diadaptasikan dengan Islam dan ada pula yang tidak bisa diadaptasi, sehingga

keberadaan budaya lokal tersebut harus ditolak, hanya saja bedanya tingkat konfrontasi masyarakat Arab jauh lebih tinggi dibanding dengan sikap masyarakat Indonesia ketika menerima kedatangan para juru dakwah.

Masyarakat Indonesia dilihat dari sisi kepercayaan dan keagamaan, sebelum Islam datang mereka sudah memiliki kepercayaan "animisme dan dinamisme" dan mereka juga sudah memeluk agama-agama besar "Hindu, Buda, dan Kristen" yang banyak memiliki pengaruh dalam kehidupan keseharian masyarakat. Selain masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan dan agama, mereka juga memiliki budaya dan tradisi yang kuat, bahkan keberadaannya hampir menyamai posisi agama, sehingga budaya dan tradisi tersebut harus diadaptasikan dengan ajaran Islam. Langkah ini untuk mengantisipasi, agar budaya dan tradisi lokal tidak keluar dari kaidah-kaidah tauhid.

Dari perspektif sosiologis dan antropologis yang dikaitkan dengan religiusitas masyarakat, tipologi masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan, agama, preferensi etnis dan ideologi politik sebagaimana temuan Geertz dapat digeneralisasikan menjadi tiga tipe utama yang mencerminkan moral organisasi kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu masyarakat Abangan, masyarakat Santri, dan masyarakat Priyayi (Geertz, 1989: 5-6).

Kalau perspektif ini ditarik kepada masa lalu, dimana Islam baru mulai diperkenalkan dan diajarkan kepada masyarakat, maka kategori masyarakat santri secara faktual menjadi tidak ada, karena tipologi santri tidak menjadi varian dalam penentuan kategorisasi. Akan tetapi secara ensensi "lebih bijak" kalau kemudian masyarakat Indonesia dilabelkan memiliki tingkat kepatuhan kepada agama. Tingkat religiusitas masyarakat sudah mencapai peradaban yang tinggi, terbukti agama-agama besar sudah menjadi agama masyarakat Indonesia, baik pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, maupun pada masa kolonialisme yang juga tidak

bisa dijauhkan dengan peran penyebaran agama kepada masyarakat.

Islamisasi masyarakat di kawasan pesisir utara pulau Jawa seperti temuan Nur Syam menunjukkan adanya proses interaksi antara Islam dan budaya lokal, sehingga menghasilkan Islam yang khas dan unik. Keunikan tampak dari berbagai ritual keagamaan yang menggambarkan masyarakat santri yang akomodatif terhadap budaya lokal. Wujud interaksi Islam dengan budaya lokal sebagai bentuk pengakomodasian terhadap budaya lokal nampak seperti adanya petik laut, manganan (tasyakuran desa), dan nyadran (khaul makam), upacara-upacara hari-hari naas, upacara berdasar kalender Islam, dan upacara lingkaran hidup (kehamilan, kematian) yang diselenggarakan secara rutin oleh masyarakat, meski mereka sudah menjalani hidup menjadi santri.(Nur Syam, 2005: 167-168).

Ketika Islam sudah mencapai kemajuannya dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, juru dakwah yang terdiri dari para saudargar Islam ini memang tidak henti-hentinya mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Setting kultural para pendakwah dan masyarakat Indonesia nampak bisa menemukan keseimbangannya, sehingga sikap menerima menjadi lebih dominan ketimbang sikap konfrontasi kepada para juru dakwah. Model interaksi Islam berjalan tidak hanya didasarkan pada "hitam putih" bunyi teks Al-Qur'an dan Hadis dalam menanamkan ajaran Islam, tetapi aspek budaya dan tradisi masyarakat menjadi pertimbangan sebagai langkah bijak menanamkan ajaran Islam.

Berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada banyak versi dan data sejarah yang bisa dijadikan argumentasi untuk kapan Islam mulai masuk ke Indonesia. Tanpa bermaksud memberi legitimasi dan menjustifikasi kebenaran dimulainya Islamisasi di Indonesia, maka berikut akan dipaparkan data-data sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam Masuk ke Indonesia abad 7 M, pada masa kerajaan Sriwijaya abad 7-8 M, karena pada saat itu di Selat Malaka sudah ada penduduk muslim,

meski belum terbentuk komunitas. Ada data Islam masuk ke Indonesia pada abad 9 M, dan sumber lain menyebut pada abad 10-15 M. Pada masa itu sudah terbentuk kerajaan Islam (Perlak 918 M, Samudra Pasai 1297 M, Aceh Darussalam 1511M). Ketika ditemukan nisan kubur Fatimah binti Maimun di Gresik (1082) membuktikan Islam sudah mulai menyebar (Maryam, 2003: 374-376). Versi lain menyebut Islam masuk ke Nusantara sebagaimana diceritakan dalam Babad Tanah Jawi Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647, yaitu terjadi pada masa kerjaan Majapahit ketika posisi kerajaan sudah lemah, meski tanpa menyebut kepastian tahun (Olthof, 1941: 23-29).

C. Dialektika Islam dengan Budaya Lokal

Islam adalah agama dakwah, yang keberadaannya harus disebarkan dan disampaikan kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Para pemeluknya juga diperintah untuk melaksanakan penyebaran Islam. Ketika proses Islamisasi berlangsung, maka dapat dipastikan Islam bertemua dengan agama, kepercayaan, budaya dan tradisi masyarakat. Kedatangan Islam tidak semena-mena melakukan penghapusan dan pelarangan terhadap agama, kepercayaan, kebudayaan dan tradisi masyarakat. Budaya local dalam konteks ini, harus dipahami setiap budaya masyarakat yang sudah ada sebelum Islam berkembang, maka penyebutannya bisa menuju kepada budaya Arab sebelum Islam, bisa budaya barat sebelum Islam dan bisa menunjuk kepada budaya Indonesia yang belum terkena dakwah Islam.

Dakwah Islam adalah salah satu bentuk aktifitas juru dakwah dengan setiap manusia yang menjadi sasaran penyebaran Islam. Komunikasi dan interaksi (amar-ma'ruf) dari juru dakwah kepada masyarakat sebagai ukuran. Proses dialogis dalam komunikasi timbal-balik (mujadalah) menjadi media efektif dan merupakan satu metode dakwah yang diajarkan dalam surat An-Nahl 125. Dengan melalui beberapa model

interaksi dalam penyampaian Islam tersebut, maka Islam mengenalkan adanya prosedur akulturasi dalam membangun interaksi dengan agama, kepercayaan, budaya dan tradisi masyarakat.

Ketika Al-Qur'an diturunkan, bangsa Arab sudah memiliki kebudayaan yang kokoh. Begitu juga ketika Islam di dakwahkan ke nusantara, masyarakatnya juga sudah memiliki agama, kepercayaan, budaya dan tradisi yang kokoh, namun semua bisa dilalui dengan damai. Kondisi ini menjadi bukti, bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat bukan konfrontatif, melainkan dengan cara hikmat ketika berinteraksi budaya lokal.

Tradisi keagamaan berupa haji dan umrah, jumatan, sakralisasi bulan Ramadhan dan bulan haram sudah menjadi keyakinan yang kuat di hati masyarakat. Keyakinan dan pengakuan atas bulan-bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, oleh masyarakat tersebut, dalam Islam tidak ditentang dan dimusnahkan melainkan justru diabadikan dan dirasionalisasikan dalam surat at-Taubah 36:

> "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia mencipatakan langit dan bumi, di anaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa."

Dalam penyebaran Islam pada masa awal yang dilakukan oleh para saudagar muslim dan para wali terutama di tanah Jawa, masyarakat memiliki kesenangan dengan ritual-ritual untuk pemujaan kepada para leluhur dan para danyang. Potensi spiritual masyarakat itu oleh juru dakwah dijadikan media penyampaian ajaran Islam, dan sekaligus merasionalisasi terhadap ritual-ritual dan pemujaan yang mereka

lakukan. Mereka diyakinkan dengan legitimasi wahyu, bahwa ritual pemujaan terhadap rah-rah leluhur adalah harus diluruskan dan perlu diadaptasikan dengan tauhid. Dengan tanpa menghilangkan ritual tradisi mereka, para juru dakwah mengisi ritual-ritual yang ada dengan tauhid, sehingga pemujaan yang dilakukan hanya tujukan kepada Allah bukan kepada nenek moyang. Pengalihan dan pengisian ritual-ritual dengan ajaran Islam ini merupakan bentuk akulturasi yang sudah dijalankan sejak fase awal Islam disampaikan.

Dengan mencermati begitu beragamnya agama, aliran-aliran, budaya dan tradisi lokal yang masih eksis sampai sekarang, dan agar Islam tidak kehilangan momentumnya ketika membangun interaksi dengan budaya lokal, maka kajian model interaksi Islam dengan budaya lokal menjadi kajian yang harus dilakukan. Budaya kufur, musyrik, dan munafik yang selalu melakukan penentangan terhadap dakwah nabi memang harus ada dua pilihan, mereka dimusuhi atau mau menerima untuk diakulturasi menjadi kebiasaan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Ali Sodiqin dalam Islam dan Budaya Lokal (2009: 16-17) menyebut model akulturasi Islam dengan Budaya lokal dikenal ada tiga model yang sekaligus menjadi sebuah pengakuan dan penerimaan Islam terhadap tradisi yang direkontruksi dengan prinsip tauhid.

1. Model Tahmil: peran yang dimainkan Islam dengan model ini adalah menerima dan menyempurnakan budaya lokal dengan cara-cara elegan dan Islami. Model perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram, haji dan umrah, merupakan kebiasaan yang sudah berjalan sebelum Islam datang. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan subtansinya, dalam pandangan Islam memang harus disempurnakan. Sumbangan prinsip-prinsip Islam terhadap budaya lokal yang demikian, menjadikan reaksi masyarakat pengampu budaya lokal menjadi lebih lunak dan lebih bisa menerima ajaran Islam.

2. Model Taghyir: Islam dengan model ini menerima keberadaan tradisi, tetapi Islam mengubah atau merekonstruksi tata cara pemberlakuannya. Tradisi masyarakat masih tetap ada tapi pelaksanaannya dirubah sehingga tidak bertentangan prinsip tauhid. Sejak dulu masyarakat sudah punya tradisi berpakain menutup aurat perempuan, perkawinan, warisan, adopsi dan qisas-diyat. Semua tradisi masyarakat tersebut dirubah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
3. Model Tahrim: model ini secara tegas Islam melarang atau menghentikan pelaksanaannya, karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi judi, minum khamar, riba, dan perbudakan sudah lama berlaku di masyarakat, dengan datangnya Islam semua harus dihentikan, ditolak dan tidak ditolerir lagi.

Dialektika Islam melalui Al-Qur'an dengan budaya bangsa Arab bukan sekedar mengadaptasi tradisi yang ada dan menyesuaikan dengan ajaran al-Qur'an (*model of reality*), tapi juga membentuk model baru (*model for reality*) sebagai hasil interaksi dengan budaya masyarakat, sehingga ada respon yang berbeda-beda. Tidak semua tradisi di tolak atau diterima oleh Islam, tapi ada tradisi yang diolah kembali sehingga menjadi tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Umat Islam melakukan interaksi dengan budaya lain, sudah berlangsung sejak awal Islam diajarkan. Dalam proses interaksi dan akulturasi, penghormatan terhadap budaya lokal benar-benar diwujudkan. Islam tidak saja menonjolkan dari aspek tahrim ketika berhadapan dengan budaya masyarakat. Di luar tahrim, dengan model tahmil dan taghyir ketika Islam juga dilakukan Islam terhadap budaya lokal, sehingga hasil interaksi model ini tidak sulit ditemukan oleh umat Islam.

Dengan menerapkan model akulturasi Islam dalam bentuk tahmil, taghyir dan tahrim ketika bersinggungan dengan budaya dan tradisi masyarakat, menunjukkan Islam tidak membatasi diri dan menjaga jarak

dengan budaya, sehingga umat Islam tidak mengalami keterputusan dengan masa lalunya. Tradisi-tradisi yang sudah berlaku di masyarakat hendaknya dilihat secara cermat dan hati-hati. Selama dalam tradisi tidak ada yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun keyakinan, maka tidak salah kalau dilakukan proses akulturasi, sampai menemukan titik keseimbangan, sehingga Islam dan tradisi bisa berjalan tanpa adanya pelanggaran secara tauhid, sosial dan kebudayaan. []

BAB XI

DINAMIKA PERADABAN ISLAM "SEBUAH CATATAN AKHIR"

Islam hadir sebagai agama penyempurna dan sekaligus agama paling akhir dalam sejarah kenabian dan pensyariatan agama. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam bertemu dengan banyak ajaran dan kebudayaan yang sudah lama dulu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sikap penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap Islam tentu tidak semata-mata didasarkan pada pembenaran teologis, melainkan Islam harus menyelesaikan interaksinya dalam persoalan kemanusiaan, kebudayaan dan tradisi masyarakat.

Proses penyampaian ajaran Islam ketika bertemu dengan kebudayaan dan tradisi masyarakat, tentu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh juru dakwah, sehingga agama Islam mampu menunjukkan fleksibelitasnya di tengah-tengah masyarakat yang sudah berbudaya dan terlanjur mencintai tradisi sebagai peninggalan masa lalu. Penampilan Islam yang adaptif di tengah pluralisme agama, kebudayaan dan tradisi, dan bahkan Islam mampu meyakinkan kepada masyarakat kehadirannya bukan menjadi ancaman terhadap kebudayaan masa lalu.

Dengan kepastian Islam memiliki caranya dalam respon budaya dan tradisi masyarakat tersebut, Islam dengan mudah masuk dan diterima dari berbagai kalangan umat manusia. Banyak orang yang tadinya memusuhi dan mengancam nabi, berbalik arah menjadi mencintai Islam dan mendukung dakwah nabi, sehingga dakwah yang tadinya dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi kemudian dilaksanakan secara

terbuka. Jangkauan dakwah menjadi luas, tingkat penerimaan masyarakat terhadap Islam juga semakin tinggi.

Dua momentum telah menjadi fakta sejarah, yaitu Islam berkembang dengan cepat pada era Madinah dan era Makkah pada jilid dua "fatkhul Makkah" karena Islam benar-benar menunjukkan kepada masyarakat, bahwa kehadirannya bukan sebagai ancaman bagi kebudayaan dan tradisi mereka. Islam sangat menghargai kebudayaan dan tradisi masyarakat, bahkan pada titik tertentu Islam sangat menghargai dengan dilakukan penyempurnaan. Pengedepanan konsep akulturasi budaya dan tradisi, benar-benar mampu meyakinkan masyarakat atas komitmen Islam memiliki penghargaan kepada kebudayaan dan tradisi masyarakat.

Islam memiliki tawaran agak longgar kepada masyarakat ketika harus merespon kebudayaan dan tradisi masyarakat, yaitu dengan dasar prinsip tauhid. Selama kebudayaan dan tradisi masyarakat itu tidak bertentangan dengan tauhid Islam memberi kebebasan kepada budaya dan tradisi untuk tetap eksis. Kalau kebudayaan dan tradisi itu bertentangan dengan prinsip tauhid, Islam masih pula memberi kelonggaran dengan memberi kesempatan untuk dilakukan penyesuaian dengan melalui tiga model. Pertama, kebudayaan dan tradisi masyarakat direspon dengan tahmil, bahwa Islam menerima dan menyempurnakan. Islam sangat mengapresiasi terhadap kebudayaan dan tradisi. Kedua, kebudayaan dan tradisi direspon dengan taghyir, bahwa kebudayaan itu prinsipnya masih bisa berkembang dengan syarat dilakukan perubahan atau direkontruksi. Model ini akan menempatkan kebudayaan untuk tetap berlaku, setelah dilakukan perubahan agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Ketiga, kebudayaan dan tradisi masyarakat direspon dengan tahrim, bahwa Islam dengan tegas melarang dan menghentikan berlakunya kebudayaan dan tradisi masyarakat karena bertentangan dengan prinsip tauhid (Sodiqin, 2009: 16-18).

Dengan mendasarkan prinsip reaksi atas interaksi Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat, ada hal yang bisa digaris bawahi dan ditoleransi. Ada argumentasi yang bisa dijadikan pegangan untuk kita semua, bahwa tidak semua kebudayaan dan tradisi masyarakat yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Haidts nabi itu harus dihancurkan dan dijadikan musuh oleh Islam. Karena dari setiap budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat masih ada sisi baik dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia.

Ketika Islam harus didialogkan dengan kebudayaan, maka ada sebuah pertanyaan mendasar dalam merekonstruksi dinamika kebudayaan Islam, yaitu berkaitan soal waktu yang cukup panjang dan kapan kebudayaan Islam itu dimulai. Kebudayaan Islam berkembang secara dinamis, mengikuti sebuah perubahan baik masa kenabian, masa sahabat maupun masa yang dikembangkan oleh para khalifah pasca sahabat. Dalam konteks ini jelas dapat dikatakan bahwa kebudayaan Islam lahir sejak wahyu pertama kali turun kepada nabi Muhammad (periode Makkah) yang ditandai dengan munculnya komunitas masyarakat muslim di Makkah, tapi juga bisa dikatakan bahwa kebudayaan Islam itu dimulai sejak negara Madinah berdiri yaitu di Madinah, yang artinya kebudayaan Islam berkembang setelah Rasulullah dan para sahabat melakukan perpindahan dari Makkah ke Madinah yang populer disebut dengan periode Madinah.

Pada paparan ini, penulis tidak melakukan justifikasi soal kapan kebudayaan Islam itu dimulai, melainkan penulis hanya memaparkan fakta-fakta yang dinominasikan sebagai kebudayaan Islam, baik masa kenabian, khulafaurrasyidin maupun pada jaman kekhalifahan (dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Usmani, Safawiyah dan Mughal). Para pengendali kekuasaan tersebut, tentu dengan berbagai ragam kemajuan dan kelemahan dalam pengembangan kebudayaan Islam.

Kehadiran nabi Muhammad Saw di tengah-tengah masyarakat Arab, keberadaannya memang sudah menjadi simbol perubahan dan

pembaharuan. Fakta atas pembaharuan sosial dan keagamaan yang dilakukannya mampu mendorong lahirnya tatanan kehidupan baru yang bersendikan pada agama dan kemanusiaan. Kemajuan kebudayaan yang dicapai umat pada waktu itu, tidak lepas dari bimbingan wahyu melalui nabi Muhammad, sehingga kehidupan manusia bisa berkembang mencapai kesempurnaannya.

Mengingat panjangnya kurun waktu perkembangan kebudayaan Islam, penulis sejarah ada yang membagi perkembangan kebudayaan Islam itu dibagi ke dalam kurun waktu tiga babak utama, yaitu periode klasik, periode pertengahan dan periode modern (Maryam, 2003: 12). Periode klasik pada saat perkembangan kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad kali pertama menerima wahyu, disusul masa penyebaran Islam dari Timur Tengah ke wilayah lain dan periode perkembangan modern umat Islam yaitu abad 19-20 M.

Pembagian periodesasi akan memudahkan untuk meletakkan sebuah karya besar yang pernah dihasilkan umat Islam pada jamannya. Pada masa Nabi Muhammad sebagaimana sudah penulis paparkan data-data kebudayaan yang dihasilkan, merupakan lompatan kebudayaan yang semula tidak diperhitungkan oleh suku-suku atau bangsa-bangsa lain menjadi simbol perubahan dari sisi kebudayaan dan kemanusiaan. Begitu juga pada masa Khulafaurrasyidin banyak kemajuan kebudayaan yang dihasilkannya, terlebih lagi pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam mampu menunjukkan sebagai kekuatan kebudayaan, ilmu pengetahuan, politik dan kekuatan ekonomi.

Perkembangan peradaban Islam di Kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, tidak mengalami kemandegan dengan jatuh bangunnya kekuasaan Islam di kawasan Timur Tengah. Para saudagar Arab dan Gujarat telah merintis dan memulai mengembangkan peradaban Islam dengan memasuki ke kawasan Asia Tenggara secara mandiri. Berdirinya kerajaan Islam semenanjung Malaya dan wilayah Sumatra

seperti Samudra Pasai, Darussalam Aceh, dan di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan Islam (Banten, Cirebon, Demak) atau di luar Jawa ada kerajaan Ternate dan Tidore, semua memiliki tekad untuk mengembangkan Islam dan peradaban Islam. Fakta atas berdirinya kerajaan-kerajaan Islam tersebut, semakin membuktikan peradaban Islam menunjukkan kekokohannya di nusantara.

Di Indonesia sendiri, peradaban Islam berkembang dengan pesat melalui institusi pemerintah dan masyarakat. Pasca kemerdekaan misalnya, keberadaan Departemen Agama yang sekarang dengan sebutan Kementrian Agama (Kemenag) memiliki posisi strategis dalam mengembangkan peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden RI ke-dua tersebut memotori berdirinya yayasan Muslim Pancasila yang banyak membangun masjid di berbagai daerah dengan arsitektur yang memiliki karakteristik yang unik.

Sementara di luar usaha pemerintah, ada dua institusi masyarakat yang cukup besar dan memiliki pengaruh kuat yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan basis institusinya, NU dan Muhammadiyah tidak henti, terus mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bertumpu pada dua institusi ini, berkembang lembaga pendidikan pesantren dan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang jelas dengan majunya pendidikan dari dua basis Islam Indonesia "NU dan Muhammadiyah" telah melahirkan intelektual muslim yang sama-sama memiliki andil dalam pengembangan kebudyaan dan tradisi yang ada di masyarakat.

Fenomena lain dalam kebudayaan Islam di Indonesia adalah munculnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah institusi yang mengembangkan tradisi intelektual. Dalam perkembangannya, ICMI melakukan pembaharuan di bidang sosial dan politik. Islamisasi birokrasi menjadi sebuah produk budaya yang sempat mencengangkan banyak pihak. Keberadaan ICMI benar-benar telah

membangkitkan semangat Islam di kalangan kaum terdidik di Indonesia, sehingga keberadaannya menjadi hal penting dalam kebangkitan peradaban Islam.

Paparan produk peradaban umat Islam sampai pada pembahasan akhir ini, penulis menyadari masih banyak peeradaban Islam yang belum dipaparkan. Akhirnya, penulis mengakui buku yang hadir ini masih jauh dari kesempurnaan. semoga masih akan lahir buku baru yang jauh baik dan sempurna. Amin []

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin. *Study Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.

----------, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.

Al-Affendi, Abdel Wahab. *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam.* Yogyakarta: LkiS, 1994.

Al-Khatib, Muhammad Abdullah. *Makna Hijrah dulu dan Sekarang*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Al-Ma'arif. *Qishashul-anbiya (Sejarah 25 Rasul)*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.

Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim.* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama (FkBA), 2001.

Amanah, Siti & Bashori. *Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Semarang: Toha Putra, 1992.

Amin, M. Masyhur. *Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan-Keputusan Tentang Aktivitas Keagamaan*. Yogyakarta, Sumbangsih Offset, 1980.

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Ash-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Asyur, Muhammad Ahmad. *Khotbah dan Wasiat Umat Ibnul Khaththab*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ath-Thahir, Hamid Ahmad. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Bik, Muhammad Hudhari. *Tarjamah Tarikh Al-Tsyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*. Semarang: Darul Ikhya, 1980.

Cholil, Munawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1971.

Diya'al 'Umari, Akram. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rosulullah SAW*. Jakarta: Media Dakwah 1994.

Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

———.(ed.) *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Iman dan Realitas Sosial.* Jakarta, Inisiasi Press, 2004.

Fu'adi, Imam. *Sejarah Peradaban Islam.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Ghofir, Jamal. "Toleransi dan Dakwah Rasulullah: Upaya Menciptakan Masyarakat Humanis dan Toleran" dalam *Jurnal Dakwah Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. VII No. 1*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Tintamas, 1984.

Hamka. *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hak, Nurul. *Buku 2: Sejarah Peradaban Islam, Rekayasa Sejarah Islam Daulah Bani Umayyah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hassan, Hassan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

———. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Hassaballa, Hesham A., & Kabir Helminski. *Sejarah Islam*. Yogyakarta: Diglossia, 2007.

Himayah, Ahmad Mahmud. *Kebangkitan Islam di Andalusia*. Jakarta: Gemaa Insani, 2004.

Ismail, Faisal. *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI Yogya, 2002.

———. *Perdagangan Mekkah dan Kemunculan Islam (Mendiskusikan Tesis Montgomery Watt dan Patricia Crone*. Yogyakarta: Jurnal Al-Jami'ah No 64 tahun 1999.

Jazuli, Ahzami Samiun. *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Kadziq. "Dakwah Islam Masa Rasulullah: Upaya Menuju Terwujudnya Masyarakat Islam", dalam *Jurnal Dakwah, Media Komunikasi dan Dakwah, Nomor 03 Th.II.* Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Khathir, Khalil Ibrahim Mulla. *Mukjizat Kota Madinah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Koentowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.

Malik Sy, Maman A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Maryam, Siti dkk,. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Kalasik Hingga Moderen*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab & Lesfi, 2003.

Mujani, Saiful, dkk. *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat.* Jakarta: PPIM-UIN Jakarta bekerjasama dengan Freedom Institue dan Penerbit Nalar, 2005.

Murad, Musthafa. *Kisah Hidup Abu Bakar Al-Shiddiq*. Jakarta: Zaman, 2012.

———. *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab*. Jakarta: Zaman, 2012.

———. *Kisah Hidup Utsman Ibn Affan*. Jakarta: Zaman, 2012.

———. *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*. Jakarta: Zaman, 2012.

Nasr, Seyyed Hossein. *Islam Agama, Sejarah dan Peradaban*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Olthof, W.L. *Babad Tanah Jawi*. Jakarta: Buku Seru, 2014.

Purwadi. *Babad Demak*. Yogyakarta: Pustaka Utama, 2012.

Rachman, Budi Munawar. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Refileli. "Peradaban Islam Di Andalusia (Perspektif Sosial Budaya)", *Jurnal Tsaqofah & Tarikh* Vol.2 No.2 Juli-Desember 2017, hal. 165.

Sayyid, Majdi Fathi. *Mari Mengenal Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Setiawan, M. Nur Kholis, dkk. *Merajut Perbedaan, Membangun Kebersamaan*. Yogyakarta: Dialogue Centre Press, 2011.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang,1986.

———. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Sodikin, Ali. “Dasar Teologis Integrasi Islam dan Budaya Lokal” dalam Ali Sodikin,dkk., *Islam & Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBI) Jurusan SKI UIN Sunan Kalijaga, 2009.

———. *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu & Budaya.* Yogyakarta, Ar-Ruzz Media Group, 2008.

Sou’yb, Joesoef. *Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk.* Jakarta: UI Press, 1996.

Suharsono. *Islam dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Insani Press, 2004.

Suhud, Moh. Abu. “Pra Kondisi Kebangkitan Dakwah di Makkah: Kajian terhadap Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam”, dalam *Jurnal PMI, Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat,* Vol.VI Nomor 1. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

———. “Problematika Dakwah Internal Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Upaya Mengatasinya”, dalam *Jurnal MD, Membangun Profionalisme* Vol.I No. 1. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid I.* Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987.

Syam, Nur. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKiS, 2005.

Ummatin, Khoiro, “Dakwah masa Rosulullah: Telaah Pesan Ayat Makkiyah dan Madaniyah” dalam *Jurnal Dakwah, Media Komunikasi dan Dakwah, Nomor 07 TH. IV*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

———. “Tiga Pilar Penyangga Esistensi Dinasti Umayyah”, dalam *Jurnal Dakwah, Media Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume XIII,

Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Watt, W. Montgomery. *Islam dan Peradaban Dunia, Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan.* Jakarta: Gramedia, 1997.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

Yamin, Muhammad, "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw", *Ihya al-Arobiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan sastra arab*, 2017, hal 108.

Zainal A., Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

———. *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

TENTANG PENULIS

KHOIRO UMMATIN, S.Ag. M.Si lahir di Kemiri Subah Batang Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1971, Putri dari Pasangan KH. Ahmad Damanhuri Ya'qub (Alm) dan Hj. S. Rochmah (Almh) adalah staff pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan yang ditempuh adalah di MIN "Darun Najah" Kemiri Subah, lulus tahun 1983, kemudian melanjutkan ke MTsN Subah lulus tahun 1986, dan jenjang SLTA-nya di MAN I Yogyakarta, lulus tahun 1989. Gelar Sarjana Lengkap diperoleh tahun 1996 pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program PPAI. Gelar Magister diperoleh tahun 2000 pada Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Sosiologi.

Karya buku yang sudah diterbitkan adalah "Perilaku Politik Kiai" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002); "40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Hubungan Bertetangga" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006); "40 Hadits Sahih Pedoman Mendidik Buah Hati Anda" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006); "Pedoman Pembinaan Muallaf (Tim)", (Yogyakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag kerjasama dengan Kelompok Studi Al-Fikroh, 2011); Sejarah Kebudayaan Islam (Yogyakarta: Teras, 2013); Sejarah Islam dan Budaya Lokal:

Kearifan Islam atas Tradisi Masyarakat (Yogyakarta: Kalimedia, 2015); "Kedahsyatan Sedekah" dalam dalam bunga rampai, "Berkah Serkileran Umrah" (Jakarta: Rumedia, 2019); "Menghadang Covid-19 dengan Local Wisdom dan Sedekah" dalam Covid 19 dan Transformasi Keberagamaan, (Yogyakarta: Ladang Kata & PSDT, 2020)

N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

Buku ini akan memudahkan pembaca yang ingin melihat hasil peradaban Islam pada setiap periode, karena memang buku ini tidak memprioritaskan kajian perjalanan kekhalifahan Islam dari perspektif politik, terutama sekali dalam hal perebutan kekuasaan. Masih banyak sisi-sisi yang bisa dikaji lebih mendalam lagi, sehingga dengan kajian lanjutan itu bisa mendapatkan informasi peradaban lebih detail dan lebih progresif yang bisa disumbangkan untuk dokumen sejarah Islam.

Buku ini merupakan satu dari sekian banyak buku yang mengungkapkan kembali tentang sejarah Islam, dimulai dari masa pra Islam, awal Islam dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan pasca kenabian. Hanya saja, penulis tidak memfokuskan pada pembahasan tentang sejarah perang dan perebutan kekuasaan dalam Islam secara lengkap. Kalau pun ada pembahasan menyinggung soal perang dan perebutan kekuasaan, itu semata-mata penulis tempatkan sebagai informasi skunder yang sifatnya melengkapi kajian tentang perkembangan Peradaban Islam itu sendiri.

Kajian peradaban Islam yang kurang memprioritaskan persoalan sisi politik, akan menemui banyak kesulitan dalam pembahasan. Pada kenyataannya, memang banyak data sejarah Peradaban Islam yang sarat dengan politik dan perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, bicara soal sejarah umat Islam, mau tidak mau harus bersinggungan dengan politik, peperangan dan perebutan kekuasaan. Untuk mengantisipasi berbagai kesulitan dalam pembahasan yang sudah penulis perkirakan tersebut, akhirnya mendorong untuk berfikir serius menemukan hasil peradaban Islam sebagai jendela pembuka pertama. Langkah kedua adalah mengklasifikasi dengan penuh hati-hati di setiap zaman pada pemegang kekuasaan yang lengkap dengan pasang surutnya untuk ditemukan hasil peradaban yang telah dicapainya. Data sejarah ini tentu akan menjadi bukti sisi-sisi kemajuan dan kemuliaan peradaban Islam yang memanusiakan manusia di setiap jamannya.

Penerbit:
Kurnia Kalam Semesta
Jl. Solo Km.8, Nayan No.109A, Depok, Yogyakarta
Email: kksjogja@gmail.com

ISBN 978-602-278-105-9